



**GURU PEMBELAJAR**

**MODUL PELATIHAN GURU**

**Mata Pelajaran**  
**SOSIOLOGI SMA**

**Kelompok Kompetensi C**

**Profesional :  
Struktur Sosial**

**Pedagogik :  
Model-Model Pembelajaran**

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2016**



# **GURU PEMBELAJAR**

## **MODUL**

**Mata Pelajaran Sosiologi  
Sekolah Menengah Atas (SMA)**

**KELOMPOK KOMPETENSI C**

**Profesional : Struktur Sosial  
Pedagogik : Model-Model Pembelajaran**

**Penulis : Susvi Tantor, S.Sos, M.A, dkk**

**Lilik Tahmidaten, S.Sos., M.A.**

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2016**

**Penulis:**

Susvi Tantoro, S.Sos., M.A., 081232883033, [densusvi@gmail.com](mailto:densusvi@gmail.com)  
Lilik Tahmidaten, S.Sos., M.A. 081334260742, [liek\\_pppg@yahoo.com](mailto:liek_pppg@yahoo.com)

**Penelaah:**

Dr. Sugeng Harianto, M.Si 08123229551, [harianto1964@yahoo.com](mailto:harianto1964@yahoo.com)  
Dr. M. Jacky, S.Sos., M.Si., 085648602271, [mjacky@unesa.ac.id](mailto:mjacky@unesa.ac.id)

*Copyright* © 2016

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Bidang PKN dan IPS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengkopi sebagian maupun keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## KATA SAMBUTAN

Peran guru professional dalam proses pembelajaran sangat penting bagi kunci keberhasilan belajar siswa. Guru professional adalah guru kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi focus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG ) untuk kompetensi pedagogic dan professional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi tersebut dibedakan menjadi 10 (sepuluh) peta kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui tatap muka, daring (*on line*), dan campuran (*blended*) tatap muka dengan daring.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP on line untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya

Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal  
Guru dan Tenaga Kependidikan



Sumarna Surapranata, Ph.D  
NIP. 195908011985032001

## KATA PENGANTAR

Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah peningkatan kompetensi guru. Hal ini menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kewajiban bagi Guru. Sejalan dengan hal tersebut, peran guru yang profesional dalam proses pembelajaran di kelas menjadi sangat penting sebagai penentu kunci keberhasilan belajar siswa. Disisi lain, Guru diharapkan mampu untuk membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Sejalan dengan Program Guru Pembelajar, pemetaan kompetensi baik Kompetensi Pedagogik maupun Kompetensi Profesional sangat dibutuhkan bagi Guru. Informasi tentang peta kompetensi tersebut diwujudkan, salah satunya dalam Modul Pelatihan Guru Pembelajar dari berbagai mata pelajaran.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn dan IPS) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, mendapat tugas untuk menyusun Modul Pelatihan Guru Pembelajar, khususnya modul untuk mata pelajaran PPKn SMP, IPS SMP, PPKn SMA/SMK, Sejarah SMA/SMK, Geografi SMA, Ekonomi SMA, Sosiologi SMA, dan Antropologi SMA. Masing-masing modul Mata Pelajaran disusun dalam Kelompok Kompetensi A sampai dengan J. Dengan selesainya penyusunan modul ini, diharapkan semua kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Guru Pembelajar baik yang dilaksanakan dengan moda Tatap Muka, Daring (Dalam Jaringan) Murni maupun Daring Kombinasi bisa mengacu dari modul-modul yang telah disusun ini.

Semoga modul ini bisa dipergunakan sebagai acuan dan pengembangan proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran PPKn dan IPS.

Batu, Januari 2016  
Kepala PPPPTK PKn dan IPS  
  
Drs. M. Mahadjir, M.A  
NIP. 195905241987031001

# DAFTAR ISI

Kata Sambutan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar.....	v
Daftar Tabel.....	vi
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	2
B. Tujuan .....	2
C. Peta Kompetensi .....	2
D. Ruang Lingkup.....	2
E. Saran Cara Penggunaan Modul .....	2
<b>KEGIATAN PEMBELAJARAN 1:</b>	
Stratifikasi Sosial dan Diferensiasi Sosial (9 JP)	
A. Tujuan.....	3
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	3
C. Uraian Materi .....	3
D. Aktivitas Pembelajaran.....	25
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	25
F. Rangkuman.....	25
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	26
<b>KEGIATAN PEMBELAJARAN 2:</b>	
Ketimpangan Sosial (9 JP)	
A. Tujuan .....	27
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	27
C. Uraian Materi .....	27
D. Aktivitas Pembelajaran.....	41
E. Latihan/ Kasus/Tugas .....	42
F. Rangkuman .....	43
G. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut.....	43
<b>KEGIATAN PEMBELAJARAN 3:</b>	
Dimensi-Dimensi Ketimpangan Sosial (12 JP)	
A. Tujuan .....	45
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	45
C. Uraian Materi .....	45
D. Aktivitas Pembelajaran.....	66
E. Latihan/ Kasus/Tugas .....	66
F. Rangkuman .....	67
G. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut.....	68

**KEGIATAN PEMBELAJARAN 4:****Model – Model Pembelajaran (9 JP)**

A. Tujuan .....	69
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	69
C. Uraian Materi .....	69
D. Aktivitas Pembelajaran.....	84
E. Latihan/ Kasus/Tugas .....	84
F. Rangkuman .....	85
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	86
H. Kunci Jawaban.....	86

**KEGIATAN PEMBELAJARAN 5:****Metode *Field Trip* dalam Pembelajaran Sosiologi (9 JP)**

A. Tujuan.....	88
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	88
C. Uraian Materi .....	88
D. Aktivitas Pembelajaran.....	108
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	108
F. Rangkuman.....	108
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	109
H. Kunci Jawaban.....	109

**Kunci Jawaban Latihan/Kasus/Tugas****Evaluasi****Penutup**

<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>110</b>
----------------------------	------------

<b>Glosarium.....</b>	<b>111</b>
-----------------------	------------

**Lampiran**

## DAFTAR GAMBAR

No	Nama	Halaman
1.	Ketimpangan atau kewajaran.....	30
2.	Mencari akar ketimpangan sosial.....	31
3.	Menjalankan fungsi domestik atau ISTI.....	46
4.	Ras – ras Manusia.....	54
5.	Keramahan Hitler yang mengorbankan 6 juta jiwa orang “semit” .....	57
6.	Ketimpangan Ekonomi.....	58
7.	Koefisien Gini provinsi tahun 2013.....	60
8.	Penduduk Dunia dan Pembagian Kekayaan untuk Orang Dewasa dengan Berbagai Tingkatan.....	62
9.	Peta Angka Pembunuhan di Area Konflik-Tidak Konflik per 100.000 penduduk.....	63



## DAFTAR TABEL

No	Nama	Halaman
1.	Ringkasan Pemikiran Teori-teori Sosiologi Klasik tentang Ketimpangan Sosial.....	36
2.	Laki – laki versus Perempuan dalam perspektif Nature.....	48
3.	Pendapatan Berdasarkan Jenis Kelamin & Lokasi di Indonesia Bulan Agustus 2015	49
4.	Koefisien Gini Indonesia tahun 1996, 1999, 2002, 2005, 2007 s/d 2013 (BPS, 2014).....	59
5.	Peran guru, peserta didik dan masalah dalam pembelajaran berbasis masalah.....	80
6.	Langkah – langkah pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah.....	84

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Program Guru Pembelajar sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Program Guru Pembelajar akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan.

Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan Program Guru Pembelajar baik secara mandiri maupun kelompok. Khusus untuk Program Guru Pembelajar dalam bentuk diklat dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Penyelenggaraan Program Guru Pembelajar dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK KPTK, salah satunya adalah di PPPPTK PKn dan IPS. Pelaksanaan diklat tersebut memerlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta diklat.

Modul tersebut merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat Guru Pembelajar Sosiologi SMA. Modul ini berisi materi, metode, batasan-batasan, tugas dan latihan serta petunjuk cara penggunaannya yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Dasar hukum dari penulisan modul ini adalah :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- 2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK.

#### **B. Tujuan**

- a. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai Standar Kompetensi yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Memenuhi kebutuhan guru dalam peningkatan kompetensi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- c. Meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.

#### **C. Peta Kompetensi**

Melalui modul Guru Pembelajar diharapkan peserta diklat dapat meningkatkan kompetensi antara lain :

1. Memahami Stratifikasi Sosial dan Diferensiasi Sosial
2. Memahami Ketimpangan Sosial
3. Menganalisis Dimensi –Dimensi Ketimpangan Sosial

#### **D. Ruang Lingkup**

1. Stratifikasi Sosial dan Diferensiasi Sosial
2. Ketimpangan Sosial
3. Dimensi –Dimensi Ketimpangan Sosial

#### **E. Saran Cara Penggunaan Modul**

1. Bacalah modul dengan seksama sehingga bisa dipahami
2. Kerjakan latihan tugas
3. Selesaikan kasus/permasalahan pada kegiatan belajar kemudian buatlah kesimpulan
4. Lakukan refleksi

## Kegiatan Pembelajaran 1

# STRATIFIKASI SOSIAL DAN DIFERENSIASI SOSIAL

### A. Tujuan

Melalui modul ini, peserta diklat guru Sosiologi SMA diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi stratifikasi sosial
2. Mengidentifikasi diferensiasi sosial

### B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Mendeskripsikan konsep stratifikasi sosial
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk stratifikasi sosial
3. Mendeskripsikan perbedaan stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial
4. Mengidentifikasi wujud diferensiasi sosial

### C. Uraian Materi

#### 1. Konsep Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial dan kelas sosial adalah dua hal yang berbeda, namun sering digunakan secara bergantian hingga dalam berbagai bagian menjadi rancu (Suyanto dan Narwoko, 2004:169). Stratifikasi sosial lebih merujuk pada pembagian sekelompok orang ke dalam tingkatan (strata) yang berjenjang secara vertikal. Jadi, ketika dibahas tentang stratifikasi sosial, biasanya akan lebih banyak mengkaji tentang posisi yang tidak sederajat antar orang per orang atau kelompok dalam masyarakat. Secara umum, stratifikasi sosial juga sering dikaitkan dengan persoalan kesenjangan sosial atau polarisasi sosial.

Kelas sosial sebenarnya lebih sempit dari stratifikasi sosial. Istilah kelas sosial lebih merujuk pada satu tingkatan (strata) tertentu dalam sebuah stratifikasi sosial. Kelas sosial, cenderung diartikan sebagai kelompok yang anggota-anggotanya memiliki orientasi politik, nilai budaya, sikap, dan perilaku sosial yang secara umum bersifat sama. Masyarakat kelas menengah ke atas, dalam banyak hal memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat kelas bawah.

Secara sederhana, perbedaan kelas sosial dapat dilihat dari perbedaan faktor ekonomi seseorang. Namun, seperti yang dikatakan Horton dan Hunt (1999:7-8) bahwa terbentuknya stratifikasi dan kelas-kelas sosial tidak hanya berkaitan dengan uang. Para anggota suatu strata sosial tertentu memiliki jumlah penghasilan atau uang yang relatif sama, sehingga mereka cenderung memiliki sikap, nilai-nilai, dan gaya hidup yang sama. Semakin rendah kedudukan seseorang didalam stratifikasi sosial, biasanya semakin sedikit pula perkumpulan dan hubungan sosialnya. Orang-orang dari lapisan sosial kelas bawah lebih sedikit berpartisipasi dalam jenis organisasi (klub), organisasi sosial, lembaga formal atau bahkan lembaga keamanan daripada orang-orang strata menengah dan atas. Ada kecenderungan kuat, lapisan masyarakat bawah umumnya lebih menarik diri dari tata krama umum, mereka mengembangkan subkultur tersendiri yang sering berlawanan dengan subkultur kelas sosial di atasnya.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:228), di dalam setiap masyarakat selalu dan pasti mempunyai sesuatu yang dihargai. Sesuatu yang dihargai di masyarakat bisa berupa kekayaan, ilmu pengetahuan, status haji, status “darah biru” atau keturunan dari keluarga tertentu yang terhormat, atau apapun yang bernilai ekonomis. Di berbagai masyarakat sesuatu yang dihargai tidaklah selalu sama. Di lingkungan masyarakat pedesaan, tanah sewa dan hewan ternak sering dianggap jauh lebih berharga daripada gelar akademis. Sementara itu, di lingkungan masyarakat kota yang lebih kompleks, yang terjadi pendidikan (gelar akademis) lebih penting dari perhiasan emas.

Sebagian pakar meyakini bahwa stratifikasi masyarakat sesungguhnya mulai ada sejak masyarakat mengenal kehidupan bersama. Di dalam masyarakat yang masih sederhana lapisan-lapisan masyarakat pada awalnya didasarkan pada perbedaan seks, perbedaan antara pemimpin dan yang dipimpin, perbedaan umur, bahkan perbedaan yang berdasar pada kekayaan. Pada masyarakat yang demikian perbedaan kedudukan dan peran bersifat sederhana, karena warganya masih sedikit dan pembagian kerja belum terspesialisasi. Sebaliknya,

semakin kompleks suatu masyarakat, semakin kompleks pula sistem lapisan-lapisan dalam masyarakat.

Pitirim A. Sorokin (Soekanto, 2002:227) mengemukakan bahwa sistem stratifikasi dalam masyarakat itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup dengan teratur. Mereka yang memiliki barang atau sesuatu yang berharga dalam jumlah yang banyak akan menduduki lapisan atas dan sebaliknya mereka yang memiliki sesuatu yang relatif berharga dalam jumlah yang relatif sedikit akan menduduki lapisan bawah.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (*hierarkis*). Perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Selanjutnya disebutkan bahwa dasar dan inti dari lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, kewajiban dan tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat.

Menurut Henslin (2006:178), stratifikasi sosial diartikan sebagai suatu sistem dimana kelompok manusia terbagi dalam lapisan-lapisan sesuai dengan kekuasaan, kepemilikan, dan prestise relatif mereka. Penting untuk dipahami bahwa stratifikasi sosial tidak merujuk pada individu. Stratifikasi sosial merupakan cara untuk menggolongkan sejumlah besar kelompok manusia ke dalam suatu hirarki sesuai dengan hak-hak istimewa relatif mereka.

Sejak zaman kuno, menurut Aristoteles (Suyanto dan Narwoko, 2004:153), di dalam tiap negara setidaknya terdapat tiga unsur yaitu, mereka yang kaya sekali, mereka yang miskin, dan mereka yang ada di tengah-tengahnya. Hal itu menunjukkan bahwa pada zaman dahulu orang telah mengenal dan mengakui adanya sistem stratifikasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya sesuatu yang mereka anggap berharga, sehingga ada yang mempunyai kedudukan di atas ada pula yang di bawah.

Pada umumnya mereka yang menduduki lapisan atas tidak hanya memiliki satu macam saja dari sesuatu yang dihargai oleh masyarakat, akan tetapi lapisan atas tersebut bersifat kumulatif. Artinya mereka yang

mempunyai uang banyak, misalnya, akan mudah mendapatkan tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, bahkan mungkin kehormatan tertentu.

Konsep stratifikasi sosial (*social stratification*) berbeda dengan konsep ketidaksamaan sosial (*social inequality*) (Sanderson, 2003:145-146). Ketidaksamaan sosial umumnya lebih berkaitan dengan adanya perbedaan derajat dalam pengaruh atau prestise sosial antar individu dalam suatu masyarakat tertentu. Ada dua ciri penting yang menandai ketidaksamaan sosial, yaitu: *pertama*, ketidaksamaan sosial hanya mengenai perbedaan prestise atau pengaruh antar individu satu terhadap individu lainnya. Jadi ketidaksamaan sosial bukan berkenaan dengan derajat kekuasaan atau kekayaan. Ketidaksamaan sosial ada dan dapat terjadi dalam masyarakat yang relatif homogen. *Kedua*, ketidaksamaan sosial mengimplikasikan ketidaksamaan antar individu, bukan antar kelompok yang berlainan.

Stratifikasi sosial lebih berkenaan dengan adanya dua atau lebih kelompok-kelompok bertingkat dalam suatu masyarakat tertentu, yang anggota-anggotanya mempunyai kekuasaan, hak-hak istimewa dan prestise yang tidak sama pula. Inti dari stratifikasi sosial adalah perbedaan akses golongan satu dengan golongan masyarakat lain dalam memanfaatkan sumber daya. Jadi, dalam stratifikasi sosial, tingkat kekuasaan, hak istimewa dan prestise individu tergantung pada keanggotaannya dalam kelompok sosial, bukan pada karakteristik personalnya.

## **2. Bentuk-Bentuk Stratifikasi Sosial**

Stratifikasi sosial terjadi dari kebiasaan hubungan antarmanusia, yang kemudian ditingkatkan menjadi sebuah simbol sosial. Menurut Raymon Firth, pembentukan stratifikasi awalnya didasarkan pada perbedaan usia dan jenis kelamin (Susanto, 1979:93). Dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi, maka terbentuklah stratifikasi ekonomi. Di dalam kehidupan politik dikenal adanya jarak politik, sehingga terjadilah stratifikasi politik.

Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat selalu mengenal bentuk dasar stratifikasi, yaitu stratifikasi ekonomi, stratifikasi

pendidikan/pekerjaan, dan stratifikasi politik (Susanto, 1979:94). Biasanya ketiga bentuk stratifikasi ini tidak berhimpit, kecuali dalam negara totaliter. Justru perbedaan stratifikasi ini menjadi inti dari mobilitas sosial dan alam demokrasi.

### **1) Stratifikasi Ekonomi**

Jika dalam suatu masyarakat, faktor ekonomi merupakan salah satu hal yang dihargai maka memungkinkan terjadinya pelapisan atau stratifikasi sosial di bidang ekonomi. Orang-orang yang mampu memperoleh kekayaan akan menduduki lapisan atas. Istilah kaya identik dengan orang-orang yang memiliki banyak benda-benda bernilai ekonomi. Sebaliknya, mereka yang kurang atau tidak mampu akan menduduki lapisan bawah.

Pelapisan ekonomi dapat dilihat dari segi pendapatan, kekayaan dan pekerjaan. Kemampuan ekonomi yang berbeda-beda dapat menyebabkan terjadinya stratifikasi ekonomi. Orang-orang yang penghasilannya sangat kecil dan tidak memiliki harta benda akan menduduki lapisan bawah. Lapisan atas, misalnya konglomerat, pengusaha besar, pejabat dan pekerja profesional yang berpenghasilan tinggi. Lapisan bawah, misalnya gelandangan, pemulung, buruh tani dan orang-orang miskin lainnya.

Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa stratifikasi sosial dalam bidang ekonomi ini bersifat terbuka, jadi perpindahan antarkelas dapat terjadi secara bebas sesuai dengan kemampuan seseorang. Seseorang dari golongan pekerja kasar, yang karena keuletannya berhasil mengumpulkan harta kekayaan, secara ekonomis telah merubah statusnya menjadi kelas yang lebih tinggi. Akan tetapi dari sisi perilaku dan kebiasaan, dia tampak tertinggal untuk mengimbangi anggota kelas atas.

Berikut pendapat para ahli mengenai stratifikasi ekonomi:

- a) Aristoteles, membagi masyarakat secara ekonomi menjadi kelas atau golongan (Suyanto dan Narwoko, 2004:153):
  - Golongan sangat kaya; merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat. Mereka terdiri dari pengusaha, tuan tanah dan bangsawan.



- Golongan kaya, merupakan golongan yang cukup banyak terdapat di dalam masyarakat. Mereka terdiri dari para pedagang, dan lain-lain.
  - Golongan miskin, merupakan golongan terbanyak dalam masyarakat. Mereka kebanyakan rakyat biasa.
- b) Karl Marx juga membagi masyarakat menjadi dua golongan (Johnson, 1986:120-159), yakni:
- Golongan kapitalis atau borjuis, adalah mereka yang menguasai tanah dan alat produksi.
  - Golongan proletar, adalah mereka yang tidak memiliki tanah dan alat produksi.
- c) Pada masyarakat Amerika Serikat, pelapisan masyarakat dibagi menjadi enam kelas yakni (Horton dan Hunt, 1999:6; Susanto, 1979:106):
- Kelas sosial atas lapisan atas (*Upper-upper class*) meliputi keluarga-keluarga yang telah lama kaya
  - Kelas sosial atas lapisan bawah (*Lower-upper class*) terdiri dari kelompok yang belum lama menjadi kaya
  - Kelas sosial menengah lapisan atas (*Upper-middle class*) meliputi pengusaha, kaum profesional
  - Kelas sosial menengah lapisan bawah (*Lower-middle class*) meliputi pegawai pemerintah, kaum semi profesional, supervisor, pengrajin terkemuka.
  - Kelas sosial bawah lapisan atas (*Upper lower class*) meliputi pekerja tetap atau golongan pekerja.
  - Kelas sosial lapisan sosial bawah-lapisan bawah (*Lower-lower class*) meliputi para pekerja tidak tetap, pengangguran, buruh musiman, orang bergantung pada tunjangan.

## **2) Stratifikasi Pendidikan/Pekerjaan**

Dalam bidang pendidikan dapat dijumpai stratifikasi sosial yang tersusun berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

- a) Pendidikan sangat tinggi (profesor, doktor)
- b) Pendidikan tinggi (sarjana)
- c) Pendidikan menengah (SMA)
- d) Pendidikan rendah (SD dan SMP)
- e) Tidak berpendidikan (buta huruf)

Stratifikasi di bidang pendidikan dan pekerjaan ini bersifat terbuka, artinya seseorang dapat naik pada lapisan pendidikan yang lebih tinggi jika mampu berprestasi. Pelapisan yang berbentuk pelapisan sosial dapat ditemukan pula dalam bidang pekerjaan. Pelapisan sosial berdasarkan bidang pekerjaan berpatokan pada keahlian, kecakapan dan keterampilan. Menurut klasifikasi Morell (Susanto, 1979:108-110) pelapisan sosial berdasarkan ukuran pekerjaan adalah sebagai berikut:

- a) Elit, adalah orang kaya dan orang-orang yang menempati kedudukan yang oleh masyarakat sangat dihargai.
- b) Profesional, orang yang berijazah serta bergelar di dunia pendidikan yang berhasil.
- c) Semi-profesional, seperti pegawai kantor, pedagang, teknisi berpendidikan menengah dan mereka yang tidak berhasil mencapai gelar
- d) Tenaga terampil, misalnya orang-orang yang mempunyai keterampilan mekanik, pekerja pabrik yang terampil dan pemangkas rambut
- e) Tenaga semi terampil, misalnya pekerja pabrik tanpa keterampilan, dan pelayan restoran.
- f) Tenaga tidak terlatih atau tidak terdidik, misalnya pembantu rumah tangga, tukang kebun dan penyapu jalan.

Sedangkan pada masa lalu, stratifikasi sosial di desa-desa yang umumnya merupakan masyarakat petani terutama didasarkan pada hak milik atas tanah, sawah, kebun dan rumah. Pada masyarakat Jawa Tengah terdapat stratifikasi didasarkan pada

kepemilikan tanah. Stratifikasi itu adalah sebagai berikut (Susanto, 1979:102):

- a) Golongan priyayi, yaitu golongan pegawai pemerintah desa atau para pemimpin formal di desa
- b) Golongan kuli kenceng, yaitu golongan pemilik sawah yang juga berperan sebagai pedagang perantara
- c) Golongan kuli gundul, yaitu golongan penggarap sawah dengan sistem maro (bagi hasil).
- d) Golongan kuli karang kopek, yaitu golongan buruh tani yang mempunyai tempat tinggal dan pekarangan saja, mereka tidak mempunyai tanah pertanian sendiri.

### 3) Stratifikasi Politik

Stratifikasi dalam bidang politik dilihat dari faktor kekuasaan. Mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang terbesar akan menempati lapisan teratas. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki kekuasaan sama sekali menduduki lapisan politik terbawah. Kekuasaan dalam suatu masyarakat biasanya dijalankan oleh segolongan kecil masyarakat. Golongan tersebut dinamakan *the ruling class* atau golongan yang berkuasa. Mereka ini menduduki lapisan tertinggi dalam stratifikasi politik sebagai elit politik. Mereka inilah yang memegang dan menjalankan kekuasaan dalam suatu negara.

Stratifikasi politik atau pelapisan sosial berdasarkan kekuasaan bersifat bertingkat-tingkat (hierarki) yang menyerupai suatu piramida. Menurut Mac Iver, ada tiga tipe umum dalam sistem dan lapisan kekuasaan atau piramida kekuasaan, yaitu tipe kasta, tipe oligarki dan tipe demokrasi (Keesing, 1999:80-85).

- a) **Tipe Kasta**, adalah sistem pelapisan kekuasaan dengan garis pemisah yang tegas dan kaku. Tipe ini biasanya terdapat pada masyarakat yang menganut sistem kasta, dimana hampir tidak terjadi mobilitas vertikal. Garis pemisah antara masing-masing lapisan hampir tak mungkin ditembus

- b) **Tipe Oligarki** adalah sistem lapisan kekuasaan yang masih mempunyai garis pemisah tegas, tapi dasar pembedaan kelas sosial ditentukan oleh kebudayaan masyarakat, terutama kesempatan bagi para warga masyarakat untuk memperoleh kekuasaan tertentu. Bedanya dengan tipe kasta adalah walaupun kedudukan warga masih didasarkan pada kelahiran, individu masih diberi kesempatan untuk naik lapisan.
- c) **Tipe Demokratis.** Pada tipe demokratis, garis-garis pemisah antarlapisan sifatnya fleksibel dan tidak kaku. Kelahiran tidak menentukan kedudukan dalam lapisan-lapisan, yang terpenting adalah kemampuan dan kadang-kadang juga faktor keberuntungan, misalnya anggota organisasi dalam suatu masyarakat demokratis yang dapat mencapai kedudukan tertentu melalui organisasi politiknya.

Seperti dikatakan Jeffries dan Ransford (Sunarto, 2004; Suyanto dan Narwoko, 2004:171), di dalam masyarakat pada dasarnya bisa dibedakan tiga macam stratifikasi sosial, yaitu: 1) *Hierarki kelas*, yang didasarkan pada penguasaan atas barang dan jasa; 2) *Hierarki kekuasaan*, yang didasarkan pada kekuasaan; 3) *Hierarki status*, yang didasarkan atas pembagian kehormatan dan status sosial.

### **1) Hierarki Kelas (*Class Hierarchies*)**

Indikator yang digunakan untuk membagi stratifikasi atas dasar dimensi ekonomi relatif bermacam-macam. Pada masyarakat tradisional, kekayaan dalam beberapa bentuk, seperti tanah, umumnya lebih berharga ketimbang kekayaan dalam bentuk lain, seperti uang. Dan, warisan kekayaan lebih bernilai daripada kekayaan yang diperoleh dari kegiatan perdagangan atau bisnis. Sedangkan dalam masyarakat modern, dasar bagi terbentuknya kelas ekonomi agak berbeda.

Karl Marx, membagi stratifikasi pada masyarakat industri atas dasar kepemilikan alat-alat produksi. Tesis utama Marx adalah struktur internal sistem ekonomi terdiri dari kelas-kelas sosial yang

muncul dari perbedaan dalam kesempatan memiliki alat produksi serta ketidaksesuaian yang dihasilkan dalam kepentingan ekonomi.

Di dalam bukunya yang terkenal *Das Kapital*, Marx menyatakan bahwa kehancuran feodalisme yang diikuti dengan berkembangnya kapitalisme dan sektor industri modern telah mengakibatkan terpecahnya masyarakat ke dalam dua kelas ekstrem, yaitu kelas borjuis yang memiliki dan mengendalikan alat produksi dan kelas proletar yang tidak memiliki alat produksi (Johnson, 1986:120-159).

Di mata ekonomi yang konservatif, sepiantas hubungan antara kelas borjuis dan kelas proletar dalam dunia industri memang akan terlihat satu sama lain saling mengisi atau membutuhkan. Tetapi, menurut Marx yang sebenarnya terjadi adalah hubungan yang eksploitatif dan merugikan kelas proletar. Marx menyatakan bahwa seluruh sejarah dinyatakan sebagai sejarah perjuangan atau pertentangan antar kelas. Menurut Marx perubahan sosial selalu bersumber dari revolusi kelas. Konflik antara kaum kapitalis dan buruh bermula dari adanya bentuk produksi kapitalis yang tidak adil, yang kemudian memicu revolusi kaum proletar menuju masyarakat sosialis baru yang lebih baik dan adil.

Walaupun tesis Marx tidak terbukti di lapangan, gagasan dan pembagian kelas yang dikemukakan Marx telah memberi ilham bagi peneliti-peneliti ilmu sosial sesudahnya, hingga dewasa ini. Hanya saja, di dalam masyarakat industri yang makin modern dan kompleks, pemilihan kelas versi Marx yang hanya membagi masyarakat dalam dua kelompok ekstrem (kaum borjuis dan proletar) telah banyak dipersoalkan, dan dinilai tidak lagi relevan. Stratifikasi ekonomi yang didasarkan pada pemilikan alat produksi dinilai sifatnya terlalu khusus dan cenderung hanya bisa dipergunakan untuk menjelaskan hubungan antara majikan dengan kaum buruh perusahaan saja. Di dalam komunitas yang makin kompleks, indikator pemilihan kelas ekonomi yang sifatnya lebih umum adalah pemilikan kekayaan dan penghasilan, termasuk

pemilikan aset produksi. Yang dimaksud penghasilan adalah pemasukan atau pendapatan bersih yang diperoleh seseorang atau keluarga, baik rutin atau tidak.

Di Indonesia salah satu patokan yang dipergunakan untuk menentukan apakah seseorang dikategorikan miskin atau tidak adalah dengan mengacu pada kriteria yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik (BPS). BPS, hampir setiap tahun mengeluarkan batasan pendapatan per kapita per tahun, dan dibedakan antara wilayah pedesaan dengan perkotaan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan kekayaan adalah menyangkut kepemilikan benda-benda berharga atau aset produksi seseorang atau keluarga. Di kalangan masyarakat desa, yang termasuk benda-benda berharga bisa berupa tanah, perhiasan, mesin perahu, rumah, dan sebagainya. Sementara itu, untuk masyarakat perkotaan, sesuatu yang termasuk berharga selain tanah biasanya adalah kepemilikan barang-barang elektronik, kepemilikan kendaraan bermotor, rumah, deposito, dan sebagainya.

Di wilayah pedesaan agraris di Pulau Jawa, Sajogyo (1978), misalnya membagi masyarakat petani atas dasar luas kepemilikan tanah, seseorang disebut sebagai petani cukup apabila memiliki tanah diatas 0,5 hektar, disebut sebagai petani miskin apabila luas tanahnya antara 0,25-0,5 hektar, dan dikelompokkan sebagai petani miskin sekali apabila luas tanahnya di bawah 0,25 hektar atau kelompok buruh tani yang tidak memiliki tanah.

Di lingkungan masyarakat pesisir, terbentuknya stratifikasi sosial berbeda dengan masyarakat petani. Penggolongan kelas sosial masyarakat nelayan biasanya dapat dilihat dari tiga sudut pandang. *Pertama*, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring, dan perlengkapan lainnya). Struktur masyarakat ini terbagi menjadi kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh yang tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan produksi sebuah unit perahu, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. *Kedua*, dari skala investasi modal

usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi menjadi nelayan besar dimana jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif banyak, dan nelayan kecil justru sebaliknya. *Ketiga*, dari tingkat teknologi peralatan tangkap ikan, yang terbagi menjadi nelayan modern yaitu nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dari nelayan tradisional. Perbedaan ini membawa implikasi pada tingkat pendapatan dan kemampuan atau kesejahteraan sosial-ekonomi. Di dalam stratifikasi yang ada dibandingkan nelayan pemilik, tingkat kehidupan sosial-ekonomi nelayan buruh sangat rendah dan bahkan dapat dikatakan sebagai lapisan sosial yang paling miskin di desa-desa pesisir (Kusnadi, 2002:2-3).

## **2) Hierarki Kekuasaan (*Power Hierarchies*)**

Indikator yang dipergunakan untuk memilah masyarakat atas dasar dimensi politik adalah distribusi kekuasaan. Kekuasaan berbeda dengan kewenangan. Seseorang yang berkuasa tidak selalu memiliki kewenangan atau menduduki jabatan formal. Yang dimaksud dengan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi individu-individu lain dan mempengaruhi pembuatan keputusan kolektif. Putnam (Suyanto dan Narwoko, 2007:174) mengatakan bahwa kekuasaan adalah probabilitas untuk mempengaruhi alokasi nilai-nilai otoritatif. Sementara itu, menurut Weber (Suyanto dan Narwoko, 2007: 174), yang dimaksud dengan kekuasaan adalah peluang bagi seseorang atau sejumlah orang untuk mewujudkan keinginan mereka sendiri melalui suatu tindakan komunal meskipun mengalami tentangan dari orang lain yang ikut serta dalam tindakan komunal itu.

Sejak berabad-abad sudah menjadi dalil pemikiran politik bahwa kekuasaan dalam masyarakat selalu didistribusikan dengan tidak merata. Seperti dikatakan Mosca (Suyanto dan Narwoko, 2007:174), dalam setiap masyarakat selalu terdapat dua kelas penduduk, yaitu satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas penguasa, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan

oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas yang dikuasai, diatur dan dikendalikan oleh kelas penguasa itu.

Menurut Pareto, Mosca, dan Micheis (Suyanto dan Narwoko, 2007:174), beberapa asas umum yang menjadi dasar bagi terbentuknya stratifikasi sosial, khususnya yang berkaitan dengan kekuasaan politik adalah:

- (1) Kekuasaan politik, seperti halnya barang-barang sosial lain didistribusikan dengan tidak merata;
- (2) Pada hakekatnya orang hanya dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik “penting” dan mereka yang “tidak memilikinya”
- (3) Secara internal, elit itu bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadaran kelompok;
- (4) Elit itu mengatur sendiri kelangsungan hidupnya dan keanggotaannya berasal dari lapisan masyarakat yang sangat terbatas; dan
- (5) Kelompok elit pada hakekatnya bersifat otonom, kebal akan gugatan dari siapapun di luar kelompoknya mengenai keputusan-keputusan yang dibuatnya.

Di dalam masyarakat yang demokratis, pembagian dikotomis antara kelas yang berkuasa dan dikuasai tentu sudah tidak lagi sederhana sebagaimana dikemukakan Mosca di atas. Kendati kelas yang berkuasa jumlahnya selalu sedikit, tetapi dalam masyarakat yang demokratis biasanya distribusi kekuasaan lebih terfragmentasi ke berbagai kelompok. Dalam pemerintahan yang diktator, mungkin benar kekuasaan mutlak berada di tangan pihak yang berkuasa. Tetapi, di negara yang demokratis, siapapun yang berkuasa biasanya akan selalu dikontrol oleh kelompok-kelompok yang ada di luar sistem, dan jumlahnya lebih dari satu.

### **3) Hierarki Status (*Status Hierarchies*)**

Menurut Weber, manusia dikelompokkan dalam kelompok-kelompok status atas dasar ukuran kehormatan. Kelompok status ini, didefinisikan Weber sebagai kelompok yang anggotanya



memiliki gaya hidup tertentu dan mempunyai tingkat penghargaan sosial dan kehormatan sosial tertentu pula (Sanderson, 1993:283).

Dalam bentuk sederhana, stratifikasi atas dasar status ini membagi masyarakat ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok masyarakat yang disegani atau terhormat dan kelompok masyarakat biasa. Kelompok masyarakat yang terhormat ini, mereka biasanya selalu menekankan arti penting akar sejarah yang dijadikan dasar untuk membenarkan kenapa mereka pantas memiliki kedudukan istimewa di masyarakat. Sebagai contoh, seorang keturunan bangsawan, akan selalu tampil terhormat di masyarakat, dan dalam beberapa hal enggan masuk atau dimasuki kelompok rakyat biasa karena ada keinginan untuk mempertahankan kemurnian darah kebangsawannya. Di Inggris dan Jepang, misalnya, terdapat perbedaan antara kelompok bangsawan dan rakyat jelata. Di wilayah Jawa ada perbedaan antara Kaum Priyayi dan Wong Cilik. Sedangkan di Sumba terdapat perbedaan antara Maramba dan Ata.

Kelompok masyarakat yang menduduki posisi terhormat, biasanya memiliki gaya hidup yang eksklusif. Dalam pergaulan hidup sehari-hari bisa diwujudkan dalam bentuk pembatasan terhadap pergaulan erat dengan orang yang berstatus lebih rendah. Para anggota suatu kelompok status cenderung menjalankan endogami dan menghindari pernikahan dengan kelompok yang statusnya lebih rendah (Sunarto, 2004:113). Di lingkungan keluarga kerajaan atau kelompok bangsawan yang “berdarah biru” lazimnya menganggap hal menyimpang bila ada salah satu anggota keluarganya yang menikah dengan orang biasa. Di Inggris, sempat terjadi polemik ketika Pangeran William, putra mahkota pewaris tahta kerajaan Inggris memilih menikah dengan Kate Middleton yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Di Jepang, hal yang sama juga terjadi ketika Putra Mahkota Naruhito (putra pertama Kaisar Akihito) memilih dengan Putri Masako yang bukan berasal dari keluarga bangsawan.

Kelompok masyarakat yang dihormati ini tidak selalu mutlak harus dari mereka kaum bangsawan atau keluarga raja. Di lingkungan masyarakat yang masih tradisional, kelompok yang disegani bisa berupa tokoh-tokoh agama atau orang-orang tertentu yang dianggap sesepuh desa, atau mereka yang dianggap telah banyak berjasa pada usaha pembangunan masyarakat tersebut. Di lingkungan masyarakat Madura, figur Kiai umumnya sangat disegani masyarakat setempat dan menjadi tempat untuk bertanya, dan sekaligus menjadi *patron* yang dihormati serta dituruti setiap tutur katanya.

### **3. KONSEKUENSI STRATIFIKASI SOSIAL**

Dalam kehidupan bermasyarakat stratifikasi sosial yang dipengaruhi oleh perbedaan pendidikan, kekayaan, atau kekuasaan membawa beberapa konsekuensi, antara lain (Horton & Hunt, 1987):

#### **a. Gaya hidup dan tindakan**

Orang-orang dari kelas atas cenderung mengembangkan gaya hidup yang eksklusif untuk membedakan dirinya dengan kelas sosial yang lain. Orang kelas menengah atas sehari-hari bepergian kemanapun dengan mobil pribadi, makan di restoran terkenal bersama keluarga, model berpakaianpun selalu rapi, bersih, dan bermerk. Hal ini jauh berbeda dengan kelas bawah, apalagi yang tergolong miskin, bepergian dengan sepeda motor yang kepanasan, kehujanan, berdebu, atau naik angkutan umum yang berdesakan dengan bau badan orang yang jelas membikin tidak nyaman. Makanpun hanya seadanya dengan masak sendiri, beli hanya sekali-kali itupun di warung biasa-biasa saja.

#### **b. Peluang hidup dan kesehatan**

Orang dari kelas atas dalam memenuhi kebutuhan makan memperhatikan gizi dan bias memilih apa yang akan dimakan. Kondisi sangat berbeda dengan kelas bawah atau miskin, mereka makan hanya untuk memenuhi perut kenyang, jenis makananpun tidak banyak variasi karena keterbatasan ekonomi. Dengan pola konsumsi yang semacam itu, maka kelas bawah lebih banyak yang

rentan terhadap gangguan kesehatan, sehingga peluang hidupnya semakin kecil dibandingkan kelas atas.

c. Peluang bekerja dan berusaha

Kelas atas dengan pendidikan yang cukup tinggi dan mudah dalam memperoleh berbagai keterampilan/keahlian yang dimiliki, maka memberikan peluang untuk bekerja lebih besar dan untuk membuka usaha semakin besar kesempatannya.

d. Respon terhadap perubahan

Kelas bawah yang rata-rata pendidikannya rendah atau cukup, ketika ada perubahan yang ada di masyarakat susah mengikutinya atau setidaknya butuh waktu yang lebih lama menerima perubahan yang terjadi.

e. Pola sosialisasi dalam keluarga

Tindak kekerasan dalam keluarga probabilitasnya akan cenderung lebih besar dialami oleh keluarga yang serba susah (Horton & Hunt, 1987).

f. Perilaku politik

Untuk kalangan yang berpendidikan tinggi, khususnya kelas menengah, tingkat partisipasi politiknya lebih tinggi dibandingkan kalangan yang berpendidikan lebih rendah. Hal ini dikarenakan pendidikan yang tinggi semakin tumbuhnya sikap kritisnya terhadap kehidupan sosial di sekitarnya.

#### **4. DIFERENSIASI SOSIAL**

Ada dua proses sosiologis yang mempengaruhi perilaku kelompok secara mendalam dan menyeluruh. Pertama, integrasi sosial, yakni kecenderungan untuk saling menarik, tergantung dan menyesuaikan diri. Kedua, diferensiasi sosial, yakni kecenderungan kearah perkembangan sosial yang berlawanan seperti pembedaan menurut ciri-ciri biologis antar manusia (Svalastoga, 1989) atau atas dasar agama, jenis kelamin, dan profesi.

Diferensiasi sosial dan integrasi sosial yang muncul bersamaan dengan terbentuknya stratifikasi sosial--tumbuh sebagai konsekuensi dari perubahan sosial akibat pembagian kerja yang semakin rinci. Dengan

kata lain, pertumbuhan dalam pembagian kerja bukan saja meningkatkan suatu perubahan dalam struktur sosial secara vertikal, tetapi juga secara horisontal.

Seperti organisme biologis, masyarakat berkembang makin lama makin terspesialisasi dan kompleks atau heterogen. Heterogenitas dan kompleksitas pembagian kerja dalam masyarakat modern diyakini oleh Durkheim tidak akan menghancurkan solidaritas sosial; sebaliknya, karena pembagian kerja semakin tinggi, individu dan kelompok dalam masyarakat merasa semakin lebih tergantung satu sama lain daripada hanya mencukupi kebutuhannya sendiri (Johnson, 1986).

Apakah keyakinan Durkheim di atas selalu terbukti benar? Apakah seiring dengan tumbuhnya diferensiasi sosial, maka integrasi dan solidaritas antar anggota masyarakat bisa tetap terjaga? Jika ya, faktor-faktor apakah yang menyebabkan integrasi sosial bisa tetap terjaga kendati di dalamnya ada sejumlah perbedaan yang terkadang ekstrim. Di sisi lain, faktor-faktor apa yang menyebabkan integrasi sosial itu rusak dan terjadi disorganisasi sosial?

#### **a. Perbedaan Diferensiasi dan Stratifikasi Sosial**

Di masyarakat manapun, struktur sosial yang ada umumnya ditandai dua cirinya yang khas. Secara vertikal, struktur sosial ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan antar kelas sosial dan polarisasi sosial yang cukup tajam. Secara horisontal, masyarakat ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, profesi, ras, adat serta perbedaan kedaerahan (Nasikun, 2004:30).

Perbedaan masyarakat secara vertikal disebut stratifikasi sosial, sedangkan perbedaan masyarakat secara horisontal disebut diferensiasi sosial. Stratifikasi sosial muncul karena ketimpangan distribusi dan kelangkaan barang berharga yang dibutuhkan masyarakat, seperti uang, kekuasaan, pendidikan, ketrampilan dan sebagainya. Sementara itu, diferensiasi sosial muncul karena pembagian kerja, perbedaan agama, ras, etnis (pengelompokan individu atas dasar ciri persamaan

kebudayaan, seperti bahasa, adat, sejarah, sikap, wilayah), atau perbedaan jenis kelamin.

Di dalam stratifikasi sosial, hubungan antar kelas dalam banyak hal cenderung tidak seimbang dimana ada pihak tertentu yang lebih dominan dan berkuasa daripada pihak yang lain. Sementara itu, di dalam diferensiasi sosial yang dipersoalkan bukanlah antara berbagai kelompok (bukan antara berbagai kelas) itu seimbang atau tidak melainkan yang lebih ditekankan bahwa masyarakat pada dasarnya bersifat pluralistik dan di dalamnya terdapat sejumlah perbedaan.

Secara normatif, di dalam diferensiasi sosial, hak dan kewajiban antara kelompok yang satu dengan yang lain relatif sama di mata hukum. Di dalam kenyataan yang terjadi diferensiasi sosial umumnya selalu tumpang-tindih dengan stratifikasi sosial.

Hubungan antar kelompok dalam diferensiasi sosial entah itu atas dasar perbedaan profesi, ras, etnis, agama, atau jenis kelamin selalu tidak pernah netral dari dimensi-dimensi stratifikasi sosial. Hak dan kewajiban seorang buruh dan majikan, misalnya, di mata hukum secara normatif sama. Akan tetapi, karena antara keduanya dari segi kekuasaan dan ekonomi jauh berbeda, maka pola hubungannya pun menjadi tidak seimbang. Seorang majikan, jelas posisinya akan lebih dominan dan berhak memerintah para buruhnya. Sebaliknya, para buruh akan selalu bersikap hormat kepada majikan yang membayarnya. Memperoleh upah yang layak, secara hukum adalah hak kaum buruh. Namun, karena para buruh itu menyadari bahwa mencari pekerjaan itu susah dan tidak memiliki alternatif untuk bekerja di sektor lain, maka sering ditemui banyak kaum buruh bersifat pasrah begitu saja kendati diberi upah di bawah ketentuan upah minimum.

#### **b. Wujud Diferensiasi Sosial**

Masyarakat pada dasarnya bisa dibedakan atau terdiferensiasi menurut berbagai kriteria, seperti ciri fisiologis dan ciri kebudayaan. Berikut ini akan diuraikan beberapa wujud diferensiasi sosial yang menonjol, yakni atas dasar: (1) Ras, (2) Etnik, (3) Agama, dan (4) Gender

## 1. Diferensiasi Ras

Menurut Horton dan Hunt (1999: 60), ras adalah suatu kelompok manusia yang agak berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya selain dalam segi ciri-ciri fisik bawaan, dalam banyak hal juga ditentukan oleh pengertian yang digunakan oleh masyarakat.

Dengan demikian, perbedaan masyarakat atas dasar ras bisa didasarkan atas perbedaan ciri fisik maupun sosial. Para ahli antropologi fisik umumnya membedakan ras berdasarkan lokasi geografis, ciri-ciri fisik seperti warna mata, warna kulit, bentuk wajah, warna rambut, bentuk kepala dan prinsip evolusi rasial.

Ras dalam definisi antropologis adalah kumpulan individu atau kelompok yang serupa dalam sejumlah ciri dan yang menghuni suatu teritori dan berasal-mula sama. A.L. Kroeber secara garis besar, melakukan klasifikasi ras-ras yang terpenting di dunia sebagai berikut (Koentjaraningrat, 1996:66-67):

- 1) Austroloid, mencakup penduduk asli Australia (Aborigin)
- 2) Mongoloid :
  - Asiatic Mongoloid (Asia Utara, Asia Tengah dan Asia Timur)
  - Malayan Mongoloid (Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Philipina, penduduk asli Taiwan)
  - American Mongoloid (penduduk asli Amerika)
- 3) Kaukasoid :
  - Nordic (Eropa Utara, sekitar Laut Baltik)
  - Alpine (Eropa Tengah dan Eropa Timur)
  - Mediteranian (sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arab, Iran)
  - Indic (Pakistan, India, Bangladesh, Srilanka)
- 4) Negroid :
  - African Negroid (Benua Afrika)
  - Negrito (Afrika Tengah, Semenanjung Malaya yang dikenal dengan nama orang Semang, Filipina)
  - Melanesian (Irian, Melanesia)
- 5) Ras-ras khusus (tidak dapat diklasifikasikan ke dalam empat ras pokok) :

- Bushman (gurun Kalahari, Afrika Selatan)
- Veddoit (pedalaman Sri Lanka, Sulawesi Selatan)
- Polynesian (kepulauan Micronesia dan Polynesia)
- Ainu (di pulau Hokkaido dan Karafuto Jepang)

Seiring dengan perubahan sosial yang terjadi, perbedaan masyarakat ras akhirnya makin lama makin kompleks karena masyarakat semakin terbuka, baik secara budaya, sosial, maupun geografis.

## **2. Diferensiasi Etnik**

Kalau konsep ras didasarkan pada persamaan ciri fisik, maka konsep golongan etnik atau suku bangsa didasarkan pada persamaan kebudayaan. Menurut Koentjaraningrat (1996:165), konsep yang tercakup dalam istilah suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan, serta kesadaran dan identitas tadi seringkali dikuatkan oleh kesatuan atau persamaan bahasa.

Para ahli sosiologi menggunakan istilah kelompok etnik untuk menyebutkan setiap bentuk kelompok yang secara sosial dianggap berada dan telah mengembangkan subkultur sendiri. Dengan kata lain, suatu kelompok etnik adalah kelompok yang diakui oleh masyarakat dan oleh kelompok etnik itu sendiri sebagai suatu kelompok yang tersendiri. Istilah etnik dengan demikian bukan hanya menyangkut kelompok-kelompok ras, melainkan juga menyangkut kelompok-kelompok lain yang memiliki asal-muasal yang sama, dan mempunyai kaitan satu dengan yang lain dalam segi agama, bahasa, kebangsaan, asal daerah atau gabungan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya.

Dalam suatu negara seringkali terdapat beberapa kelompok etnik yang berbeda. Di Indonesia, setidaknya terdapat lebih dari 300 etnik dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda-beda. Menurut Skinner beberapa etnik yang tergolong paling besar diantaranya, Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau, Bugis, Batak, Bali, dan Sumbawa (Nasikun, 2004:44). Keberadaan kelompok etnik tersebut

tidak selamanya permanen dan bahkan sering kali hilang karena adanya interseksi.

Interseksi adalah persilangan atau pertemuan keanggotaan suatu kelompok sosial dari berbagai seksi baik berupa suku, agama, jenis kelamin, kelas sosial, dan lain-lain dalam suatu masyarakat (Soekanto, 1985). Interseksi dapat berbentuk *asimilasi* dan *amalgamasi*. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru (Soekanto, 2002: 80). Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama.

Sedangkan yang dimaksud dengan **amalgamasi** adalah pembauran biologis antara kelompok manusia yang masing-masing memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda sehingga keduanya menjadi satu rumpun. Amalgamasi merupakan pembauran biologis dua kelompok manusia yang masing-masing mempunyai ciri fisik berbeda, sehingga keduanya menjadi serumpun (Horton dan Hunt, 1999:62). Amalgamasi merupakan faktor paling menguntungkan bagi lancarnya proses asimilasi (Soekanto, 2002:84). Di berbagai negara akibat globalisasi dan proses keterbukaan, kecenderungan terjadinya asimilasi dan amalgamasi makin lama makin meningkat.

### 3. Diferensiasi Agama

Menurut Emile Durkheim agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci, dan bahwa kepercayaan dan praktek tersebut mempersatukan semua orang yang beriman ke dalam suatu komunitas moral yang disebut umat (Suyanto dan Narwoko, 2004:165).

Kenyataan bahwa Indonesia terletak diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia (Nasikun, 2004:46). Menurut ketentuan yang berlaku, di Indonesia beberapa agama yang secara



resmi diakui dan dijamin keberadaannya oleh pemerintah adalah agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, dan Hindu. Perbedaan agama di satu sisi memang rawan karena bisa menjadi benih perpecahan. Tetapi, sepanjang masing-masing umat saling mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati hak masing-masing umat, niscaya kerukunan dan kestabilan akan tetap bisa terjaga dengan baik.

#### **4. Diferensiasi Gender**

Di dalam masyarakat primitif dan tradisional, perbedaan jenis kelamin merefleksikan perbedaan hak dan kewajiban di mana kedudukan kaum wanita dalam banyak hal ditempatkan lebih rendah daripada kaum pria (Budiman, 1981). Tetapi, seiring dengan meningkatnya gerakan emansipasi dan jumlah keterlibatan kaum wanita dalam sektor publik sedikit-banyak telah menyebabkan makin menguatnya tuntutan agar antara wanita dan pria ditempatkan dalam kedudukan yang sejajar.

Di Indonesia, akibat tekanan kemiskinan dan perkembangan lebih lanjut dari ekonomi dan teknologi, sekurang-kurangnya dalam satu dekade terakhir pelan-pelan partisipasi tenaga kerja wanita di sektor publik tampak mulai meningkat. Wanita makin lama tampak sebagai sumber daya ekonomi yang tidak kalah penting dibandingkan dengan pria. Mereka memberikan sumbangan yang besar bagi kelangsungan ekonomi rumah tangga. Studi yang dilakukan Miralao tahun 1983 (Suyanto dan Narwoko, 2004:198), menemukan bahwa meningkatnya partisipasi kerja wanita tidak hanya menyebabkan meningkatnya penghasilan rumah tangga, tetapi juga meningkatkan peran istri dalam pengambilan berbagai keputusan urusan keluarga.

#### **D. Aktivitas Pembelajaran**

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi lebih mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta diklat menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :

1. Aktivitas individu, meliputi :
  - Memahami dan mencermati materi diklat
  - Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar, menyimpulkan
  - Melakukan refleksi
2. Aktivitas kelompok, meliputi :
  - mendiskusikan materi pelatihan
  - bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan penyelesaian masalah /kasus
  - melaksanakan refleksi

#### **E. Latihan/kasus/tugas**

1. Jelaskan yang dimaksud stratifikasi sosial!
2. Jelaskan yang dimaksud wujud diferensiasi sosial!

#### **F. Rangkuman**

Stratifikasi sosial diartikan sebagai suatu sistem dimana kelompok manusia terbagi dalam lapisan-lapisan sesuai dengan kekuasaan, kepemilikan, dan prestise relatif mereka.

Diferensiasi sosial adalah suatu sistem yang mengelompokkan manusia dalam perbedaan yang setara. Misal jenis kelamin, warna kulit, agama, dan sebagainya.

## **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran, Anda dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Anda pahami setelah mempelajari materi stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial?
2. Pengalaman penting apa yang Anda peroleh setelah mempelajari materi stratifikasi dan diferensiasi sosial?
3. Apa manfaat materi stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial terhadap tugas Anda?
4. Apa rencana tindak lanjut Anda setelah kegiatan pelatihan ini?

## Kegiatan Belajar 2

# KETIMPANGAN SOSIAL (*SOCIAL INEQUALITY*)

### A. TUJUAN

Dengan mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat memahami pengertian dan teori-teori tentang ketimpangan sosial atau ketidaksetaraan sosial.

### B. INDIKATOR

1. Menjelaskan pengertian tentang ketimpangan sosial atau ketidaksetaraan sosial;
2. Menjelaskan teori sosiologi klasik tentang penyebab ketimpangan sosial atau ketidaksetaraan sosial;
3. Menjelaskan teori sosiologi modern tentang penyebab ketimpangan sosial atau ketidaksetaraan sosial.

### C. URAIAN MATERI

#### 1. PENGERTIAN

Sebelum memahami tentang ketimpangan atau ketidaksetaraan sosial, perlu juga untuk mendalami penggunaan pilihan istilah. Dalam bahasa Inggris, ketimpangan atau ketidaksetaraan sosial ini diwakili dengan kata "*Social Inequality*." Kata yang digunakan adalah *inequality*. Dalam bahasa Inggris, hal itu menunjukkan kondisi atau kualitas ketidak-samaan atau ketidaksetaraan (*unequal*), bisa juga diartikan ada kesejangan (*disparity*).

**Inequality** *n, pl -ties*

1. *the state or quality of being unequal; disparity*
2. *an instance of disparity*
3. *lack of smoothness or regularity*
4. *social or economic disparity*

(diakses dari <http://www.thefreedictionary.com/inequality>)

Bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka seharusnya kata yang mudah adalah ketidaksetaraan. Kata “sama” bisa juga digantikan dengan kata “setara” bila digunakan dalam kemasyarakatan. Dengan demikian, *social inequality* bisa diterjemahkan sebagai ketidaksetaraan atau ketidaksejajaran.

**setara**/se·ta·ra/ *n*

1. sejajar (sama tingginya dan sebagainya)
2. sama tingkatnya (kedudukannya dan sebagainya); sebanding.
3. sepadan; seimbang (*diakses <http://kbbi.web.id/tara>*)

Namun demikian, lazimnya orang lebih suka menggunakan kata *ketimpangan sosial* daripada ketidaksetaraan sosial. Penggunaan kata ini sebenarnya lebih memberi penekanan bahwa gejala tersebut seharusnya tidak boleh hadir di dalam negara berkesejahteraan (*welfare state*). Di dalam negara berkesejahteraan, setiap orang memiliki hak hidup dengan layak dan seterusnya. Di Indonesia, hal itu dituangkan pada pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4, “..... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa....”. Penggunaan kata ketimpangan sosial menunjukkan kondisi masyarakat yang tidak sehat atau cacat sebagai arti “timpang” yang merupakan kata dasar dari “ketimpangan.”

**ketimpangan**/ke·tim·pang·an/ *n*

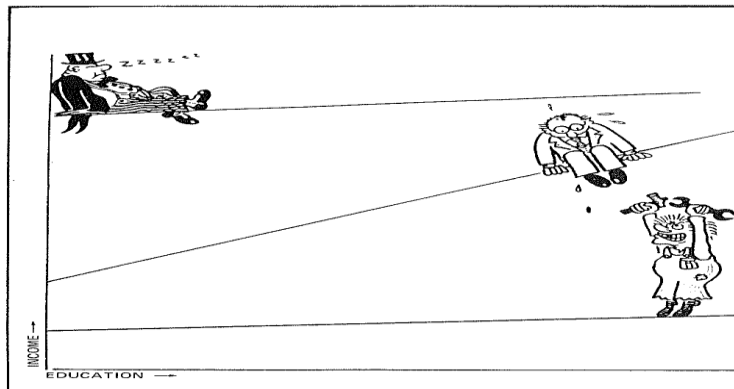
1. kepincangan:
2. cacat; cela;
3. hal yang tidak sebagaimana mestinya (seperti tidak adil, tidak beres) (*diakses dari <http://kbbi.web.id/timpang>*)

Pada kenyataannya, ketimpangan sosial merupakan gejala yang selalu hadir. Ketimpangan sosial merupakan konsekuensi dari pelapisan sosial (*social stratification*). Sistem pelapisan sosial terbentuk oleh tatanan nilai. Melalui tatanan nilai, seseorang memperoleh status dan perannya. Dengan statusnya, orang diletakkan dalam posisi tertentu di masyarakatnya. Posisi itu tidak saja berisi orang dengan status tertentu, tetapi sekumpulan orang dengan status yang setara. Bisa dibayangkan

seperti kue lapis, setiap lapis itu berisi sekumpulan orang dengan posisi tertentu.

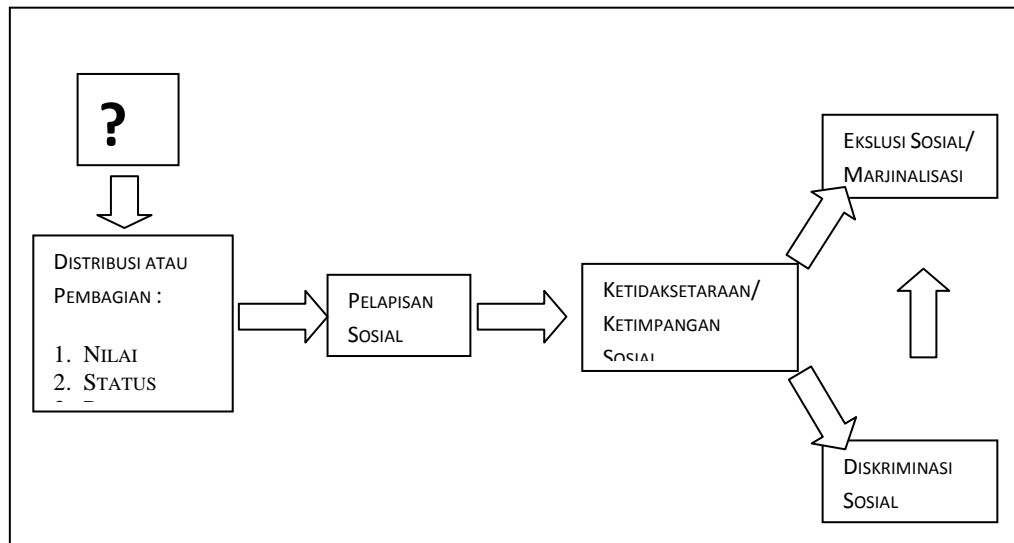
Sebagai contoh, melalui pendidikan seseorang menjadi guru. Orang tersebut menjalankan perannya sebagai guru, mulai mengajar, menilai dari seterusnya. Karena proses menjadi guru yang sulit, pekerjaan yang bernilai dan jumlahnya tidak besar, maka orang tersebut didudukkan dalam posisi tertentu. Ada orang yang memiliki pekerjaan yang setara dengan guru, maka orang itu dimasukkan posisi yang kurang lebih sama dengan guru. Kesetaraan itu bisa dilihat dari proses pencapaian, peran hingga pada pendapatan yang dihasilkan. Pendapatan merupakan salah penghargaan masyarakat terhadap peran yang dijalankan. Seorang guru akan menerima gaji dan tunjangan profesinya, begitu pula dengan profesi lainnya.

Dalam perspektif struktural fungsional, pemberian pendapatan dan berikut hak-hak istimewa lainnya (*privilege*) merupakan hal yang wajar. Selain sebagai penghargaan, dengan pendapatan itu, seseorang tetap berperan sesuai dengan kehendak masyarakat. Dengan peran yang dijalankan, seluruh sistem akan berfungsi dan tetap lestari (*survive*). Tidak demikian menurut perspektif Marxian, dalam stratifikasi sosial, kelas sosial atas jauh lebih diuntungkan daripada kelas sosial bawah. Celaknya, jumlah individu dalam kelas sosial atas jauh lebih sedikit daripada kelas sosial bawah. Orang yang dalam jumlah sedikit ini menikmati hasil dari kelas sosial bawah. Untuk hidup saja, kelas sosial bawah harus berjuang setengah mati (lihat gambar 1).



Gambar 1. Ketimpangan atau Kewajaran (Wright, 1979: xxv)

Gambar 1 menggambarkan ada seseorang dengan pendidikan yang tinggi, ternyata digaji dan bekerja seperti buruh. Pendapatannya tidak naik secara signifikan dari tahun ke tahun, bahkan harus berjuang untuk memperoleh kenaikan upahnya. Orang kedua sebagai kelas menengah dengan pendidikan tinggi harus berjuang lebih keras dengan mendapat yang naik secara signifikan. Berbeda orang yang ketiga, kadang-kadang tanpa harus berpendidikan tinggi, cukup hanya SD, SMP atau SMA, tetapi telah berhasil dan tidak perlu bekerja keras dapat menikmati hidup. Setiap orang, termasuk Saudara, pasti akan bertanya bagaimana bisa terjadi demikian. Di sekitar kita, di dalam kehidupan sehari-hari ada hal-hal itu terasa nyata. Seolah-olah ada ketidakadilan. Ketika menunjuk hal itu tidak adil, maka orang lebih suka menggunakan istilah ketimpangan daripada ketidaksetaraan.



Gambar 2. Mencari akar Ketimpangan Sosial

Singkat kata, ketimpangan sosial merupakan konsekuensi merupakan konsekuensi dari stratifikasi sosial. Ketimpangan Sosial atau Ketidaksetaraan Sosial merupakan satu konsep tentang posisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak sama dibandingkan seseorang atau sekelompok orang lainnya. Ketimpangan sosial ini lebih terlembagakan (*institutionalized inequality*) daripada bersifat individual. Bentuknya bisa ketidaksetaraan yang terstruktur antara kategori individu yang diciptakan secara sistematis, direproduksi, dilegitimasi oleh seperangkat ide dan relatif bersifat stabil (Hurst, 2010: 4). Di dalam perspektif sosiologi, ketimpangan sosial tidak dilihat dari individu per individu, seperti: kisah Bill Gates pendiri Microsoft atau Mark Zuckerberg dari Facebook, tetapi bagaimana satu lapisan sosial dengan jumlah sedikit dan tidak proporsional menentukan nasib orang yang lebih banyak.

Permasalahan ketimpangan sosial ini menjadi menarik karena tidak hanya berhenti pada persoalan ketidaksamaan distribusi, tetapi dua hal yang mengikuti kemudian, yaitu diskriminasi sosial dan eksklusi sosial. Ketimpangan sosial akan memberikan prasangka sosial (*social prejudice*) pada kelompok yang kurang beruntung. Akibatnya, mereka memperoleh perlakuan yang berbeda. Perlakuan yang berbeda ini disebut diskriminasi sosial. Perlakuan yang berbeda akan menyebabkan seseorang atau

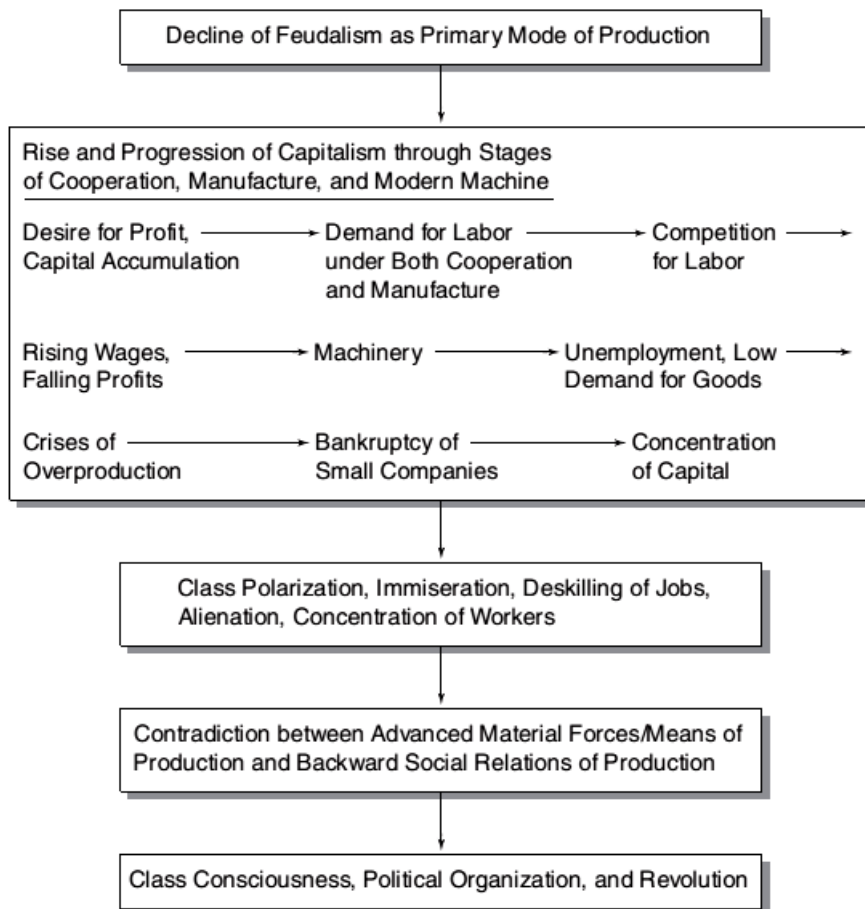


sekelompok orang mengalami “*blocking*” atas segala akses yang seharusnya didapat. Mereka dikelompokkan atau dipaksa dikelompokkan (*social exclusion*), kemudian mengalami proses peminggiran (*marginalization*). Kondisi yang demikian ini, oleh sejumlah ahli, dianggap sebagai bentuk dari ketidakadilan sosial (*social injustice*).

## 2. PENJELASAN TEORI-TEORI SOSIOLOGI KLASIK

Bagaimana hal itu bisa terjadi. Dalam pemikiran Karl Marx (1818-1883), ketimpangan itu terjadi karena persoalan distribusi yang tidak merata di dalam masyarakat. Persoalan distribusi ini terkait dengan model produksi (*mode of production*) dan hubungan produksi (*relation of production*). Pada masyarakat industri di Eropa pada abad ke-19, masyarakat senyatanya terbagi dua, yaitu sekelompok orang yang memiliki alat produksi dan sekelompok orang yang hanya mengandalkan tenaganya (kelompok pekerja) dalam sistem industri. Jumlah orang yang memiliki alat produksi jauh dan jauh lebih kecil dibandingkan kelompok pekerja.

Kelompok pemilik alat produksi (*bourgeoisie*) mengatur mode produksi dan hubungan produksi. Untuk memperoleh keuntungan yang besar, dalam menjalankan industri mereka menggunakan mesin. Mesin adalah faktor yang tidak bisa diminimalisir secara biaya. Sementara itu, manusia sebagai tenaga ini bisa di-“atur,” termasuk pengupahannya. Mereka yang mengandalkan tenaganya dibayar, meski tidak sesuai. Keuntungan dari hubungan produksi antara pekerja dan pemilik ini dikatakan Marx sebagai bentuk eksploitasi. Keuntungan menjadi berlipat ganda ketika barang yang dihasilkan dinilai lebih dari biaya produksi. Barang menjadi komoditi mengikuti hukum penawaran dan permintaan. Para pemilik ini menjaga terus keuntungannya dengan berbagai cara, mulai dari pengaturan hukum dan ideologi, pemerintah hingga kaum agamawan. Pekerja diminta patuh bekerja dengan rajin sebagai pengabdian terhadap negara dan agama (lihat Hurst, 2010: 182-188).

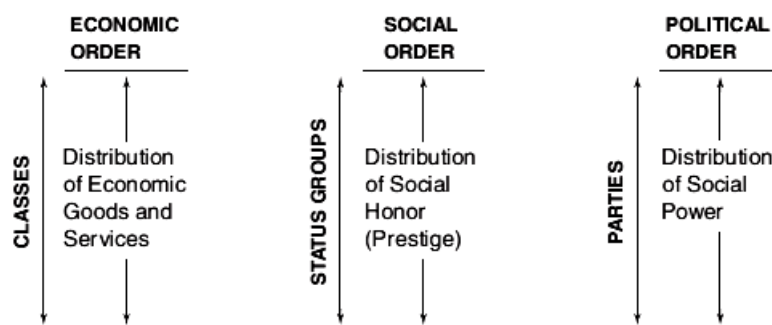


Gambar 3 Alur Ketimpangan Sosial Masyarakat Industri

Sementara itu, mereka mengalami produksi berlebih (*over production*) di tengah-tengah kemampuan daya beli yang rendah. Kemampuan daya beli yang rendah terbentuk karena masyarakat yang juga sebagai pekerja industri dibayar dengan murah. Akibatnya terjadi kehancuran perusahaan-perusahaan kecil. Pada gilirannya, kehancuran perusahaan tersebut menghasilkan konsentrasi modal dan seterusnya sebagaimana ditunjukkan dalam alur gambar 3.

Pemikiran Karl Marx tentang masyarakat industri dan ketimpangan sosial ini turut berpengaruh pada Max Weber (1864-1920). Ada perbedaan dari Karl Marx, Max Weber mencermati hal itu sebagai konsekuensi dari rasionalitas masyarakat. Ada 4 (empat) rasionalitas menurut pemikirannya, yaitu: (1) rasionalitas nilai, (2) rasionalitas instrumental, (3) afeksi dan (4) tradisi. Dalam rasionalitas nilai, nilai menjadi dasar tindakan sosial, seperti orang berbuat baik

karena takut dosa. Hal itu berbeda dengan rasionalitas instrumental yang mempertimbangkan antara nilai dan cara yang akan untuk mencapai tujuan sebagaimana diharapkan oleh nilai tersebut. Selain kedua hal itu, ada tindakan yang didasarkan perasaan, seperti seseorang memilih tindakan tertentu karena memilih hubungan emosional. Ada pula yang bertindak berdasarkan tradisi yang pernah dilakukan oleh leluhurnya. Pada masyarakat modern, orang bertindak dengan memperhitungkan antara cara dan tujuan yang hendak dicapai.



Rasionalitas tindakan ini akan menghasilkan kelembagaan/tatanan dan kekuasaan untuk mengatur distribusi dalam kelembagaan tersebut. Kekuasaan yang diartikan sebagai kesempatan seseorang atau sejumlah orang merealisasikan keinginan dalam tindakan bersama untuk melawan resistensi orang lain yang berpartisipasi dalam tindakan tersebut (Hurst, 2010: 194; kutip dari Gerth and Mills 1962: 180). Ada tiga tatanan dalam masyarakat, yaitu tatanan sosial, tatanan ekonomi dan tatanan politik. Di dalam tatanan sosial, kekuasaan direpresentasikan pada status sosial. Di dalam status sosial, ada kehormatan sosial yang dimiliki seseorang. Di dalam ekonomi, ada kelas yang memungkinkan untuk melakukan distribusi barang dan pelayanan. Terakhir, di dalam politik keanggotaan partai akan memberikan pengaruh pada pengambilan keputusan masyarakat (lihat gambar 4).

Ketimpangan lahir dari didistribusikan kekuasaan yang tidak sama pada ketiga tatanan ini. Ketika seseorang tidak memiliki modal, maka orang tidak memiliki kekuasaan dalam mengatur distribusi barang. Mereka tergolong orang yang bukan pemilik barang dan jasa. Mereka menjadi pekerja biasa yang diatur

oleh pemilik modal. Demikian pula, bila seseorang hanya seroang anggota partai atau tidak sama sekali, maka tidak memiliki kekuasaan sosial untuk mempengaruhi kebijakan publik. Di dalam masyarakat, orang juga tidak memiliki kehormatan.

Emile Durkheim (1858-1917) ini adalah seorang tokoh sosiolog yang mengembangkan struktural fungsional. Menurutnya, dalam masyarakat sebenarnya tidak ada ketimpangan sosial apabila memahami benar tentang hak dan kewajibannya. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menduduki posisi sesuai dengan kemampuannya. Seandainya hal-hal yang demikian, maka bentuk yang tidak umum dari pembagian kerja yang berkembang. Mereka menjalankan fungsi bukan atas dasar nilai dan keyakinannya, tetapi sepenuhnya menggunakan privasi pemilik. Ketidakadilan terjadi akibat nilai yang diterapkan tidak sesuai dengan bakat, kepentingan dan fungsi kerjanya. Di dalam kondisi demikian, tidak bisa disalahkan bila terjadi benturan kelas sosial (Hurst, 2010: 201-203).

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Herbert Spencer (1820-1903). Hebert Spencer ini mendapat pengaruh sangat kuat dari teori-teori evolusi yang dikembangkan oleh ahli senegaranya, yaitu Charles Darwin. Menurutnya, pada dasarnya masyarakat berkembang (evolusi) dari satu tingkat ke tingkat lain. Evolusi fisik manusia telah menciptakan laki-laki sebagai *the rulling class* dan perempuan sebagai *the subjects class*. Perang telah menghasilkan tuan dan budak, hingga seterusnya. Struktur kelas dibentuk atas dasar kemampuan dan kebiasaan dari kelas yang tanggap. Kelas tersebut akan mengontrol dan mendominasi.

Ia juga mengakui bahwa ada persaingan di antara kelas. Baginya, dikatakan kelas pemenang kalau ada yang dikalahkan. Kompetisi ini menghasilkan apa yang diistilahkan oleh Darwin sebagai *the survival of the fittest* (kelestarian bagi pihak yang bisa menyesuaikan. Kebebasan (*freedom*) memberikan kesempatan pada individu-individu untuk mengembangkan kemampuan adaptasinya. Kemampuan adaptasi ini penting tidak saja untuk dirinya, tetapi untuk generasi berikutnya. Individu yang lemah tidak memiliki kemampuan untuk tetap survival. Ketergantungannya pada bantuan negara akan menjadi “ke-

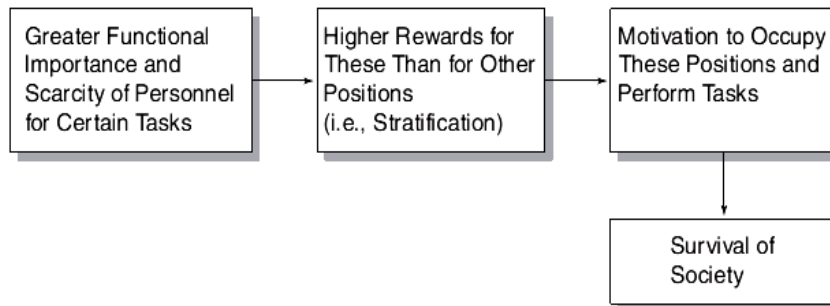
jahatan,” karena bentuk dan kondisi yang tidak adaptif. Negara harus mengurangi perannya, cukup melindungi hak-hak pribadi, seperti: masalah perkawinan yang menjamin kesetaraan antara wanita dan laki-laki. Program kesejahteraan tidak boleh diberikan secara gratis agar tidak terlalu tergantung (Hurst, 2010: 203-207).

<b>Theorist</b>	<b>Major Concern</b>	<b>Forms</b>	<b>Theorists' Views on Inequality</b>		
			<b>Causes</b>	<b>Inevitability</b>	<b>Future</b>
<b>Marx</b>	Classes in capitalist society	Historical class structures	Private property	No	Revolution and classless society
<b>Weber</b>	Dimensions of inequality and shifts in their prominence	Class, status, party	Market situation; granting of status honor; political power	Yes	Rationalization of society and growing salience of class
<b>Durkheim</b>	Abnormal forms of division of labor	Masters and workers	Anomic and forced divisions of labor	Mixed	Decline of class conflict in industrial society
<b>Spencer</b>	Evolutionary changes in bases and degree of inequality	Classes and gender relations	Form and evolutionary stage of society	Yes	Greater egalitarian ethos and inequality based on achievement

Tabel 1. Ringkasan Pemikiran Teori-teori Sosiologi Klasik tentang Ketimpangan Sosial  
(Hurst, 2010: 210)

### 3. PENJELASAN TEORI-TEORI SOSIOLOGI MODERN

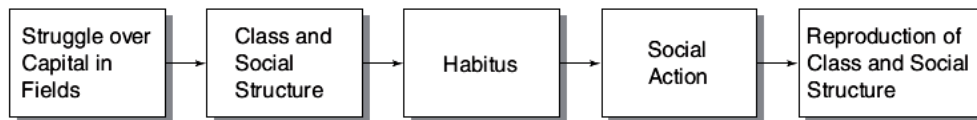
Dari perspektif struktural fungsional, pemikiran modern tentang stratifikasi dan ketimpangan sosial dijelaskan oleh Kingsley Davis (1908-1997) dan Wilbert Moore (1914-1987). Pada tahun 1945, di dalam paper yang berjudul “*Some principles of Stratification*”, keduanya bersepakat bahwa stratifikasi sosial merupakan keharusan universal masyarakat agar tetap lestari. Posisi secara berbeda dirangking atas dasar sistem imbalan (*reward*) di dalam masyarakat. Rangking yang tertinggi diberikan pada pekerjaan yang sulit dan sangat dibutuhkan dan diberikan kompesasi untuk memotivasi individu untuk mencapainya. Lebih lanjut, posisi yang tinggi sebenarnya tidak membawa hak-hak istimewa (*privilege*) dan kekuasaan karena memperoleh gaji yang tinggi. Orang tersebut lebih dipandang penting dan langka.



Teori Davis dan Moore ini memang sulit menjelaskan ketimpangan dalam kehidupan keseharian masyarakat. Pertama, tidak bisa menjelaskan mengapa satu pekerjaan dan status sosial yang satu dianggap sangat penting. Mereka kemudian mengakui bahwa ada penilaian subjektif menyangkut posisi yang penting. Kedua, terkait dengan sistem imbalan, maka seolah-olah kelompok yang paling bawah tidak diberi kesempatan untuk berkompetisi dalam mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Orang tidak bisa memperoleh keuntungan maksimal dari bakatnya. Selain itu, meskipun menyadari peranan kekuasaan dan kekayaan (*power and wealth*), teori ini tidak menjadikan sebagai faktor determinan dari penyebab ketimpangan sosial.

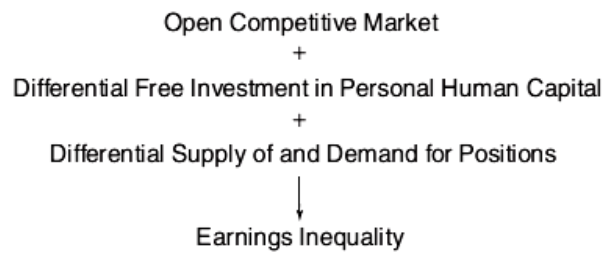
Berbeda dengan teori Davis dan Moore, McLeod (1987) memberikan penjelasan dengan melanjutkan pandangan Marxian. Menurutnya, ketimpangan sosial merupakan reproduksi hubungan sosial dan sikap yang melanggengkan hubungan produksi sistem kapitalis. Reproduksi ini dilakukan oleh lembaga sosial, budaya dan individu. Lembaga sebagai struktur sosial membuat jalan, sekaligus menghambat untuk berprestasi. Nilai-nilai sosial dan subkultur mendorong atau juga menghambat sikap dan perilaku berprestasi. Mereka, nilai sosial dan subkultur, memperlakukan dengan cara berbeda dengan situasi yang berbeda. Mereka mengesahkan aturan, kebijakan dan prosedur yang dapat menerima atau menolak perilaku individu. Mereka mengendalikan lembaga dan bentuk aturan yang mengatur distribusi sumber daya dan menafsirkan aturan untuk masyarakat (Hurst, 2010: 216-217). Salah satunya dilakukan melalui sistem pendidikan. Caranya adalah (1) melalui kurikulum, lembaga pendidikan memberikan keahlian sesuai dengan kebutuhan kelasnya, (2) melalui struktur dan kurikulum, sistem pendidikan membantu menjustifikasi dan melegitimasi ketimpangan ekonomi dan pekerjaan, (3) ia juga mendukung pengembangan dan

internalisasi sikap dan konsep diri yang sesuai dengan peran ekonomi individu yang akan ditampilkan, (4) dengan penciptaan perbedaan status antar sekolah, lembaga turut memperkuat penerimaan stratifikasi sosial sebagai *the taken for granted* (Hurst, 2010: 220; kutip dari Bowles and Gintis, 1976).



Meskipun demikian, hal tersebut tidak sederhana sebagaimana dikatakan Bowles dan Gintis (1976), teori reproduksi sosial dijelaskan lebih detil oleh Pierre Boudieu (1930-2002), sosiolog dari Perancis. Dengan menggabungkan berbagai perspektif dari Marxian dan Durkhemia, ia menjelaskan bahwa pada mulanya telah terjadi perjuangan perebutan modal, sehingga terbentuk struktur dan kelas sosial. Struktur dan kelas sosial ini melanggengkan dengan melakukan internalisasi nilai dalam kerangka membentuk habitus dan seterusnya hingga terjadi reproduksi tindakan sosial, sekaligus reproduksi kelas dan struktur sosial yang sudah timpang dari awalnya (lihat gambar 6).

Teori berikutnya adalah Teori Pasar-Tenaga Kerja Neo-klasik (*Neo-classical Labor-Market Theory*). Teori ini menggunakan asumsi (1) ada pasar yang terbuka dan relatif bebas di mana individu yang kompeten untuk posisinya, (2) posisi tersebut sangat tergantung dari usaha, kemampuan, pelatihan, atau modal manusia (*human capital*), (3) ada mekanisme otomatis yang bekerja di pasar untuk meyakinkan ketidakseimbangan antara masukan (*human capital*) dan imbalan (upah) dikoreksi dalam mencapai kesimbangan (Hurst, 2010: 224). Dengan asumsi ini, penganut teori ini menjelaskan ketimpangan dengan persaingan pasar yang terbuka sebagai kondisi awalnya. Untuk memasuki dunia pasar kerja, setiap orang menginvestasikan untuk pengembangan kemampuannya (*personal human capital*). Besarannya tidak sama pada setiap orang dan setiap jenjang pendidikan dan pelatihan. Di pihak lain, di dunia kerja ada perbedaan penawaran dan permintaan. Akibatnya, terjadi pendapatan yang tidak sama atau tepatnya tidak setara (lihat gambar 7).



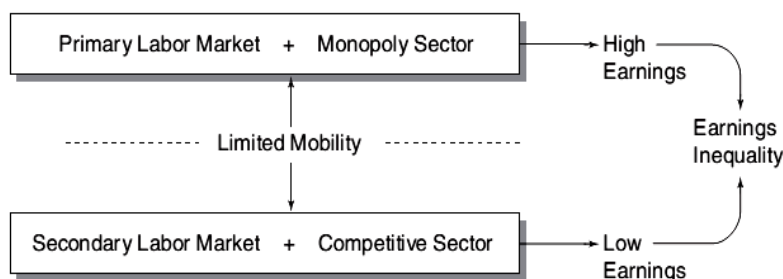
Kerangka berpikir teori neo-klasik seperti gambar 7 ternyata belum bisa menjawab mengapa kemiskinan masih berlanjut, belum juga menjawab ketimpangan pendapatan, serta ketidakefektifan program pendidikan dan pelatihan untuk mengurangi ketidakseimbangan. Selain itu, kerangka ini tidak bisa menjelaskan penggunaan pendidikan sebagai perangkat seleksi untuk hanya menjamin keberterimaan secara kultural tidak didasarkan atas kemampuan. Kerangka ini juga tidak menjelaskan keberadaan diskriminasi terhadap kelompok minoritas di pasar kerja. Hal-hal lain yang diabaikan dalam kerangka ini adalah (1) kekuatan serikat pekerja, monopoli-monopoli pekerja serta intervensi pemerintah justru memperlemah pasar yang kompetitif, (2) sikap atau tindakan buruk lebih dihasilkan dari dalam sistem itu, bukan di luar sistem, dan terakhir (3) keterasingan yang meluas di antara pekerja, menunjukkan bahwa ekonomi yang kompetitif dan seimbang tidak bekerja dengan baik (Hurst, 2010: 226; kutip dari Cain 1976). Untuk itu, penganut teori ini menambahkan 4 (empat) asumsi, yaitu (1) sektor ekonomi privat tidak tunggal, tetapi terdiri dari dua sektor utama, (2) dengan demikian, pasar kerja pun juga terdiri dua bagian dua bagian, (3) mobilitas, pendapatan dan keluaran untuk pekerja bergantung di sektor mana berada, dan terakhir ada hubungan sistematis antara ras/etnisitas, gender dan posisi di pasar kerja tersebut (Hurst, 2010: 226; kutip dari Hodson and Kaufman 1982).

Dua sektor dalam ekonomi privat itu memiliki sifat yang bertolak belakang satu sama lain. Sektor primer yang bersifat eksklusif, kelompok yang kurang beruntung tidak bisa masuk ke dalamnya. Pekerjaan di sektor primer bersifat stabil, upah tinggi, kondisi kerja yang baik, tingkat yang tinggi di struktur pekerjaan internal dan berserikat. Sementara itu, di sektor sekunder pekerjaannya tidak stabil, upah rendah dan kondisi kerja yang buruk. Celakanya, sektor primer ini adalah sektor inti (*core*) atau sektor monopoli, sektor sekunder adalah



sektor pinggiran atau sektor kompetitif (Hurst, 2010: 226-227). Pergerakan atau mobilitasnya sangat terbatas, setiap individu dipertahankan dalam proses pelatihan yang mapan, ditambah dengan kehadiran serikat yang terbatas dan regulasi pemerintah. Peluang lebih pada sektor primer (Hurst, 2010: 227). Teori ini disebut teori ekonomi privat ganda tentang ketimpangan (lihat gambar 8).

Hal itu mengingatkan pada film *Upside Down* (2012). Di dalam film itu, dunia digambar terbelah menjadi dua yang saling bertolak belakang. Gravitasinya pun berbeda. Kedua dunia itu terhubung oleh satu gedung pencakar langit. Di satu lantai tertentu, nampak orang beraktivitas, sementara di atasnya adalah lantai bagi orang yang di atas. Orang yang di bawah tidak bisa di atas karena akan mengambang. Tubuhnya hanya khusus digunakan untuk gravitasi dunianya. Dunia bawah tempat yang kotor, jorok dan mengalami hujan asam karena alamnya tereksplorasi untuk dunia atas. Dunia atas tempat pemilik usaha dunia bawah dengan segala kenyamanannya. Orang dunia bawah harus berkompetisi untuk bisa bekerja di gedung tersebut. Namun demikian, tidak bisa menjadi bagian dunia atas, dan seterusnya. Film ini bisa menjadi analogi dari teori ini.



Perpektif teori sosiologi modern lainnya adalah konstruksionis yang kemudian digunakan lagi pada teori-teori kritis dan postmodern. Pada kelompok konstruksionis, ukuran-ukuran yang digunakan untuk stratifikasi sosial dan kemudian menciptakan ketimpangan sosial sebenarnya merupakan hasil konstruksi dari masyarakat saja. Apa yang dipandang bernilai oleh masyarakat itu tidak lebih merupakan bangunan konsep yang disepakati. Apa yang dinilai ini kemudian menjadi faktor pembeda antar warga masyarakat. Faktor ini dibicarakan dan selalu dibicarakan dalam kehidupan kesehariannya. Tidak saja dibicarakan, tetapi diperkuat di dalam kelompoknya. Hurst (2010: 232; kutip dari Schwalbe et al. 2000) mencontohkan tentang test IQ. Test IQ merupakan rekayasa ilmuwan

psikologi yang pada gilirannya untuk membedakan antara satu dan lainnya. Orang yang memiliki IQ di bawah standar normal menurut psikolog dianggap orang bodoh dan tidak memiliki harapan untuk hidup mandiri. Sebaliknya, orang yang memiliki IQ jauh di atas normal digolongkan sebagai “manusia setengah dewa,” dengan segala kelebihan. IQ menjadi satu-satunya ukuran kecerdasan manusia dan celakanya digunakan untuk seleksi masuk sebagai pekerja atau pegawai suatu perusahaan.

Dengan menggunakan teori-teori Marxist, pengikut teori-teori kritis membongkar penyebab mengapa faktor pembeda ini terus menerus diterima sebagai ideologi untuk mengatur tatanan masyarakat. Mereka menjelaskan bahwa faktor pembeda ini menjadi ideologi masyarakat tidak lain karena disosialisasikan oleh pihak yang memiliki kekuasaan (*power*) dalam kerangka dunia kapitalis. Bagi pemilik kekuasaan, faktor pembeda ini merupakan keuntungan bagi mereka. Oleh kaum postmodernis, karena merupakan wacana atau teks dan kekuasaan itu dimiliki oleh setiap orang, faktor pembeda tersebut harus dibongkar. Ketika membongkar faktor pembeda, kaum postmodernis membangun kembali di dalam konstruksi yang lebih netral dan berterima bagi setiap orang. Orang disadarkan bahwa faktor pembeda itu sangat merugikan. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Michel Foucault yang membongkar ideologi *homophobia* (membenci dan mendiskriminasikan kelompok homoseksual). Dengan menggunakan metode arkeologi dan genealogi, ia menjelaskan bahwa perilaku homoseksual telah ada dan pernah diterima oleh masyarakat, bahkan menjadi bagian gaya hidup. Kebencian, meski juga diiringi oleh “kemunafikan” sangat menjadi-jadi terjadi pada masa Victorian.

#### **D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN**

Materi ketimpangan atau ketidaksetaraan sosial memang agak sulit untuk dipahami. Materi ini baru bagi pengajar sosiologi di SMA sederajat. Namun demikian, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, ada baiknya dilakukan secara berkelompok dalam satu diskusi. Sebelum melakukan diskusi kelompok, pemahaman secara individual harus ada terlebih dahulu. Caranya,

bacalah dengan seksama uraian materi di atas. Kalau perlu, pembelajar membuat coretan-coretan di sisi samping atau digarisbawahi konsep-konsep yang menjadi kata kunci dari masing-masing teori. Lebih lanjut, pembelajar dapat menghubungkan konsep-konsep itu dan menjelaskan dengan kata-kata sendiri.

Selain itu, pembelajar dapat memperhatikan dengan seksama gambar yang berisi alur konsep (bagan). Karena dalam bahasa Inggris, pembelajar harus menterjemahkan lebih dahulu. Untuk itu, hati-hati mengambil kata terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kalau memiliki kamus Sosiologi, pengambilan kata terjemahan menjadi tepat. Cara ini jauh lebih mudah, meski akan mengabaikan konteksnya.

Ada baiknya diskusi dilakukan dengan mengambil kasus. Kasus-kasus tertentu digunakan agar pembelajar dapat mengaplikasi teori-teori mana yang tepat untuk menjelaskannya. Pengaplikasian ini jauh lebih berguna daripada menghafal teori-teori yang disajikan di uraian materi.

## E. LATIHAN/KASUS/TUGAS

Lengkapi tabel dan jelaskan masing-masing teori sosiologi di bawah ini:

TOKOH	PERHATIAN UTAMA	BENTUK	PENYEBAB	KENISCAYAAN	LANGKAH SELANJUTNYA
MARX	KELAS DALAM MASY. KAPITALIS	SEJARAH STRUKTUR KELAS		TIDAK	REVOLUSI DAN MASY. TANPA KELAS
WEBER		KELAS, STATUS, PARTAI	SITUASI PASAR, PEMBERIAN STATUS KEHORMATAN, KEKUASAN POLITIK	YA	
DURKHEIM	BENTUK PEMBAGIAN KERJA YANG ABNORMAL		ANOMITAS DAN PEMBAGIAN KERJA YG DIPAKSAKAN		KERUNTUHAN KONFLIK KELAS DALAM MASY. INDUSTRI
SPENCER		KELAS DAN HUBUNGAN ANTAR JENDER		YA	ETHOS EGALITER YANG LEBIH BESAR DAN KETIMPANGAN YANG DIDASARKAN OLEH USAHA

## **F. RANGKUMAN**

Ketimpangan atau ketidaksetaraan sosial merupakan gejala yang serba hadir. Ada beberapa hal yang harus dipahami tentang ketimpangan sosial. Pertama, pemilihan istilah “ketimpangan” atau “ketidaksetaraan” telah menunjukkan perspektif teori yang digunakan dalam sosiologi. Perspektif konflik atau Marxian lebih suka menggunakan istilah ketimpangan daripada ketidaksetaraan. Kedua, ketimpangan sosial ini menjadi sangat penting karena memiliki imbas pada hal-hal lain, seperti eksklusi sosial dan diskriminasi. Lebih lanjut, ketimpangan sosial dapat dipahami dengan menggunakan pemikiran Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim dan Hebert Spencer. Tokoh-tokoh itu telah menjelaskan lebih gamblang apa menyebabkan pembentukan stratifikasi dan pada gilirannya menghasilkan ketimpangan sosial, bahkan Karl Marx secara ekstrim menawarkan penghapusan ketimpangan sosial dengan cara revolusi dan membentuk masyarakat tanpa kelas. Meskipun demikian, hal itu ternyata hingga merupakan gambaran atau usaha yang utopis belaka.

Penjelasan tentang ketimpangan sosial juga diberikan oleh para sosiolog paska tahun 1945. Sebut saja, Kingsley Davis dan Wilbert Moore, Cain, Hudson dan Kaufmann, hingga Michel Foucault. Singkat kata, ada dua pola tentang penjelasan para pemikir. Ada yang sangat memahami mengapa ketimpangan sosial sebagai konsekuensi dari masyarakat industri, ada pula yang memahami tetapi sekaligus menolak. Davis dan Moore melihat sebagai gejala yang hadir akibat sistem imbalan dan motivasi yang berbeda individu, sedangkan tokoh neo-klasik menjelaskan bahwa hal itu merupakan produk dari masa sebelumnya yang sangat merugikan kelompok yang kurang beruntung.

## **G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT**

Sungguh menarik bukan bahasan tentang ketimpangan sosial. Apakah saudara memperoleh pengetahuan baru tentang ketimpangan ini? Ataukah, semakin membingungkan? Bila masih bingung, hal itu wajar karena hal ini adalah baru dalam pemahaman atau pembelajaran Sosiologi di SMA. Untuk memperjelas masalah-masalah ini, ada sejumlah bahan bacaan yang dapat

dilihat pada daftar pustaka. Ini salah satu rencana tindak lanjut yang bisa dilakukan. Lantas, apa rencana selanjutnya?, terserah pada para pembelajar. Seorang pendidik tidak harus berhenti dan sekedar tahu saja, tetapi harus lebih tahu dan ingin lebih mengetahui dan mendalami.

## **KEGIATAN BELAJAR 3**

### **DIMENSI-DIMENSI KETIMPANGAN SOSIAL**

#### **A. TUJUAN**

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memahami dimensi-dimensi ketimpangan sosial.

#### **B. INDIKATOR**

1. Menjelaskan ketimpangan atas dasar Seks dan Gender;
2. Menjelaskan ketimpangan atas dasar Ras dan Etnis;
3. Menjelaskan ketimpangan atas dasar Ekonomi;
4. Menjelaskan dampak-dampak ketimpangan sosial.

#### **C. URAIAN MATERI**

##### **1. KETIMPANGAN ATAS DASAR SEKS DAN JENDER**

Untuk memahami tentang ketidaksetaraan atas dasar seks dan gender, terlebih dahulu dipahami tentang seks (jenis kelamin), orientasi seks dan gender. Seks atau jenis kelamin adalah organ reproduksi yang melekat atau berada di dalam tubuh seseorang sejak lahir. Secara biologis, proses ini terbentuk ketika janin berusia kurang lebih 6 s.d 8 minggu di dalam kandungan. Pembentukan organ kelamin ini sebenarnya jauh sebelumnya diawali pada waktu pertemuan antara sel telur dan sperma. Masing-masing sel telur dan sperma membawa kromosom kelamin (X) untuk telur, serta X dan Y untuk kromosom dari sel sperma. Bila sel telur dan sperma bertemu dan membentuk pasangan kromosom XY, maka janin itu akan menjadi anak laki-laki, sebaliknya bila XX, maka janin itu menjadi anak perempuan. Pada kenyataannya, meski dalam perbandingan yang kecil, tidak terjadi pemisahan pada sel telur, sehingga ketika dibuahi dengan sel sperma, kromosom kelaminnya menjadi XXY, bila lahir bisa tumbuh menjadi perempuan yang lebih tepat hemaprodit. Atau, pada waktu pertumbuhan menjadi bayi, perkembangan organ reproduksi itu tidak sempurna, sehingga

menampilkan, seperti: kletit yang lebih besar menyerupai batang penis, atau batang penis yang kecil dengan bentuk kantong zakar yang tidak sempurna, sehingga menyerupai kelamin perempuan.

Ketika tumbuh menjadi akil balik dan dewasa, maka setiap manusia akan menampilkan ciri-ciri kelamin sekundernya, perempuan dengan payudaranya dan laki-laki dengan kumisnya. Di balik itu, mereka mengembangkan orientasi seksual, kepada siapa mereka jatuh cinta, dan melakukan hubungan seks. Di dalam kajian Alfred Kinsey, orientasi seks ini digambarkan dalam dua kutub yang bersifat kontinyu, homoseksual yang lebih tertarik dan melakukan hubungan seks dengan sejenis, biseksual dengan orientasi pada kedua jenis kelamin, dan akhirnya yang dianggap “lazim”, yaitu heteroseksual dengan mencintai lawan jenisnya. Dari hasil penelitiannya, tidak ada atau hanya sedikit saja yang merupakan homoseksual murni dan sebaliknya heteroseksual murni.

Istilah berikutnya adalah jender. Jender atau *gender* merupakan peran yang ditampilkan oleh seseorang atas dasar jenis kelaminnya. Peran ini dibedakan menjadi dua, yaitu feminin yang “diacu” untuk perilaku orang yang



Gambar 3. Menjalankan fungsi domestik atau ISTI (Ikatan Suami takut Istri)

berjenis kelamin perempuan dan maskulin “diacu” untuk perilaku orang yang berjenis kelamin laki-laki.

Karakteristik feminin diarahkan pada perilaku yang lemahlembut, halus, dan sikap *introvert* (tertutup), sedangkan maskulin adalah perilaku yang kasar, lugas dan sikap *ekstrovert* (terbuka).

Di dalam kajian sosiologi klasik, perbedaan atas dasar seks (jenis kelamin) dianggap sebagai pembedaan sosial. Perbedaan yang terjadi sebagai bagian dari kodrat manusia yang “*given*,” tidak ada pilihan kecuali dijadikan dari sejak lahir. Perbedaan organ kelamin ini pada gilirannya akan menentukan seseorang mengambil kedudukan dan bertindak sesuai perannya. Seorang anak perempuan yang dijadikan memiliki organ reproduksi berupa rahim yang

digunakan untuk mengandung anak, maka kelak ia akan dan “harus” mengandung dan melahirkan anak, serta menyusui dan merawatnya hingga anak tersebut tumbuh besar. Karena fungsinya untuk merawat anak, seorang perempuan harus menampilkan **feminin**. Sementara itu, anak laki-laki yang hanya memiliki organ reproduksi untuk membuahi, maka tidak “diwajibkan” menggantikan fungsi perempuan dalam merawat anak. Ia dibebaskan, tetapi diberi konsekuensi untuk menjamin hidup anak dan istrinya dengan bekerja di luar rumah. Ia harus berjuang dalam ruang untuk mencari makan, mulai dari berburu, bersaing dan bertarung. Tampilannya adalah **maskulin**. Pandangan yang demikian ini oleh Arief Budiman (1980) dan Julia I Surya Kusuma (1991) dikenal sebagai **nature**. Pandangan menjadi pijakan dari aliteran struktural-fungsional dalam menjelaskan posisi perempuan di keluarga dan masyarakat.

Sementara itu, ada pula yang berpandangan bahwa pembagian kerja yang didasari oleh perbedaan bentuk dan fungsi fisik antara laki-laki dan perempuan sebenarnya merupakan “rekayasa sosial” dari masyarakat. Rekayasa itu dalam bentuk konstruksi sosial atau nilai-nilai itu dimaksudkan untuk menguntungkan satu pihak, dan dilakukan untuk menguasai pihak lain. Konstruksi ini dikenal sebagai budaya patriarki atau diistilahkan oleh Michael Foucault sebagai rezim patriarki. Melalui budaya ini, setiap individu yang dilahirkan, dididik dan dilatih untuk melakukan peran sesuai dengan nilai-nilai atas dasar bentuk kelaminnya. Perempuan dikarakterkan harus tunduk dan lemah, sedangkan laki-laki sebagai penguasa ditampilkan harus keras, menunduk dan kuat. Pandangan ini dikenal sebagai **nurture**. Perilaku feminin dan maskulin merupakan bentukan budaya. Perdebatan ini mengingatkan pada kita tentang lagu “Sabda Alam.”

*Diciptakan alam pria dan perempuan.  
Dua makhluk dalam asuhan Dewata  
Ditakdirkan bahwa pria berkuasa.  
Adapun wanita lemah lembut manja.*

*Wanita dijajah pria sejak dulu.  
Dijadikan perhiasan sangkar madu.  
Namun ada kala pria tak berdaya  
Tekuk lutut di sudut kerling wanita.*



Tabel 2. Laki-laki versus Perempuan dalam Perspektif *Nature*

Tubuh besar	Tubuh Kecil
Berbadan tinggi	Relatif lebih pendek
Tidak berpayudara	Berpayudara
Tidak memiliki kandungan	Memiliki kandungan
Hanya bisa membuahi	Mengandung dan melahirkan
Berotot	Tidak Berotot
Berkulit kasar	Halus
Berlari cepat	Berlari lambat
Mengandalkan rasio	Mengandalkan perasaan
Otak kanan lebih dominan	Otak kiri lebih dominan
Kasar	Lembut
Agresif	Pasif
Berburu	Memasak, merawat anak
<i>Maskulin</i>	<i>Feminin</i>

Ada penolakan pada anggapan bahwa hubungan pria dan perempuan merupakan hubungan yang serbajadi, “sudah takdir” dan tidak setuju dikriminasi atas perempuan. Sejak abad 19 tumbuh gerakan feminis yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Gerakan pertama adalah feminis liberal yang menghendaki hak-hak politik dan ekonomi perempuan. Dalam perkembangannya, dengan diwarnai pemikiran Marxian, khususnya Frederick Engels, “*The Origin of Family, Private Property and State*”, gerakan feminis yang dikenal dengan feminis radikal tidak saja menuntut hak-hak politik dan ekonomi saja, tetapi juga berkeinginan membongkar budaya patriarki, antara lain: sistem keluarga, budaya dan sistem heteroseksual. Sementara itu, gerakan feminis sosialis lebih menuntut pada penguatan hak-hak ekonomi. Meski telah bekerja di sektor publik, pada kenyataannya kelompok perempuan dinilai tetap dieksploitasi, seperti terlihat pada penerimaan upah di bawah ini. Perempuan dibayar kurang dari 85% dibandingkan laki-laki.

Tabel 3  
Pendapatan berdasarkan Jenis Kelamin dan Lokasi di Indonesia bulan Agustus 2015 (BPS, 2015:

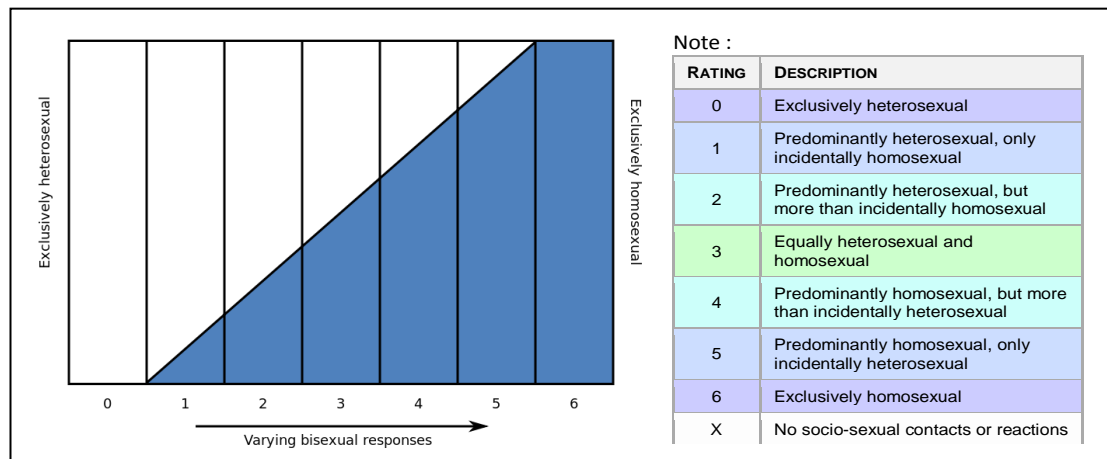
Upah/Gaji/ Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan Net Wage/Salary/ Income (rupiah) per Month	Perkotaan/Urban			Perdesaan/Rural			Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki+ Perempuan Male+Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki+ Perempuan Male+Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki+ Perempuan Male+Female
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
< 200 000	479 698	417 465	897 163	367 474	404 238	771 712	847 172	821 703	1 668 875
200 000 - 399 999	1 470 179	1 120 995	2 591 174	1 175 782	1 107 572	2 283 354	2 645 961	2 228 567	4 874 528
400 000 - 599 999	1 525 714	1 321 920	2 847 634	1 402 985	943 685	2 346 670	2 928 699	2 265 605	5 194 304
600 000 - 799 999	1 459 268	1 056 106	2 515 374	1 504 052	716 212	2 220 264	2 963 320	1 772 318	4 735 638
800 000 - 999 999	1 646 935	833 833	2 480 768	1 507 662	429 875	1 937 537	3 154 597	1 263 708	4 418 305
1 000 000 - 1 499 999	4 555 848	1 731 628	6 287 476	3 112 964	698 591	3 811 555	7 668 812	2 430 219	10 099 031
1 500 000 - 1 999 999	3 867 538	1 360 118	5 227 656	2 295 184	439 564	2 734 748	6 162 722	1 799 682	7 962 404
2 000 000 +	9 694 144	4 592 054	14 286 198	2 884 315	846 025	3 730 340	12 578 459	5 438 079	18 016 538
Jumlah/Total	24 699 324	12 434 119	37 133 443	14 250 418	5 585 762	19 836 180	38 949 742	18 019 881	56 969 623

56).

Gambaran yang menyedihkan ditunjukkan pada tabel 3. Bila memperhatikan satu per satu pada skala gajinya, maka mulai pendapatan di atas Rp 200.000 perempuan mulai tertinggal. Terus berlanjut hingga di atas 2 juta, di kota jumlah perempuan hanya separuh dari jumlah laki-laki. Di desa, kurang dari sepertiga saja jumlah perempuan bila dibandingkan laki-laki. Hal ini seolah-olah pendapatan perempuan hanya untuk menutup kekurangan dari pendapatan suaminya.

Persoalan berikutnya terkait dengan jenis kelamin dan gender adalah orientasi seks. Oleh Alfred Kinsey (1894-1956), orientasi seks manusia merupakan pola yang kontinum (menyambung), seperti kurve. Kutub ektrim sebelah kiri adalah homoseksual, yaitu orang yang menyukai dan melakukan hubungan seks dengan sesama jenis kelamin. Kutub ektrim sebelah kanan adalah heteroseksual, yaitu orang yang menyukai dan melakukan hubungan seks dengan lain jenis. Orientasi seksual ini menjadi identitas gender seseorang. Saat ini, juga ada pula orang yang tidak bisa dan tidak nyaman melakukan hubungan seks, baik dengan sesama jenis maupun lawan jenisnya. Kategori baru ini dikenal dengan a-seksual. Ia bisa saja laki-laki ataupun perempuan,

tetapi tidak memiliki kegairahan seks. Orientasi seksual ini menjadi sangat penting dibicarakan akhir-akhir ini, terutama setelah ada pernyataan persetujuan pernikahan sejenis di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat.



Ketimpangan dan anggapan sebagai perilaku menyimpang yang harus dihukum terjadi tatkala ada tatanan nilai yang tidak membenarkan orientasi dan perilaku seksual itu. Di dalam sejumlah ajaran agama, hubungan seks merupakan perilaku yang sakral (suci). Kesuciannya terletak pada hasil dari hubungan seks. Hubungan seks antara laki-laki dan perempuan akan menghasilkan anak. Agar suci, hubungan seks tersebut dilembagakan dalam pranata keluarga. Anak pun merupakan kehendak Tuhan di satu sisi, di pihak lain kehadirannya menyelamatkan masyarakat dari kepunahan. Oleh karena itu, perilaku-perilaku seks yang tidak menghasilkan anak dianggap dosa, bahkan harus dihukum. Tidak saja hubungan seks dengan sesama jenis, perilaku seks dengan memasukkan alat kelamin bukan pada tempatnya pun dianggap menyimpang. Ajaran-ajaran agama mengesahkan perbuatan perkelaminan yang boleh dan tidak boleh, termasuk hukumannya.

Nilai-nilai budaya nampaknya agak berbeda. Pelaku berorientasi seks yang berbeda memang diperlakukan secara berbeda dalam budaya berbeda. Budaya dengan nilai-nilai keagamaan tertentu menolak pelaku tersebut, tetapi budaya lain menerimanya sebagai keadaan yang tidak bisa dihindari. Budaya Jawa misalnya dalam wajah depannya menolak pelaku orientasi yang berbeda, tetapi sistem kebhasaannya mengakui eksistensinya. Bahasa Jawa tidak sepenuhnya membagi jenis kelamin menjadi dua kutub, yaitu laki-laki dan

perempuan, tetapi juga memasukkan *wandu* atau *waria* (transgender) sebagai seks ketiga. Lebih dari itu, pelaku transgender yang lemah lembut itu juga berterima dalam konteks budaya *warok*. Dulu seorang *warok* memiliki hubungan khusus dengan *jathilan*, seorang laki-laki yang gemulai (feminin). Kehadiran *jathilan* diperlukan karena hubungan seks dengan perempuan pada saat perang dianggap dapat mengurangi kesaktian dan membawa sial. Sementara itu, dalam kesenian *ludruk*, tokoh perempuan diganti dengan laki-laki berdandan, bersuara lembut dan perilaku yang gemulai. Pada masyarakat Bugis, salah satu tokoh spiritual yang dihormati dan dianggap sebagai penghubung dunia atas dan manusia, yaitu *Bissu*. Masyarakat Tahliland dengan agama Budha sebagai agama mayoritas, bisa menerima transgender sebagai seks ketiga. Ketika berterima, mereka memperoleh pekerjaan yang layak, tetapi sebaliknya terpuruk menjadi PSK atau pekerjaan yang dianggap rendah bila tidak diterima oleh masyarakat.

## 2. KETIMPANGAN ATAS DASAR ETNIS DAN RAS

Dua kata, yaitu: suku bangsa (etnis) dan ras sebenarnya merupakan konstruksi sosial, baik merupakan bentuk dari kelompok akademisi, khususnya antropologi ragawi dan budaya, maupun bentukan sosial. Secara antropologis (budaya), etnik dipandang sebagai kumpulan orang yang disatukan atas dasar salah satu atau beberapa unsur budaya universalnya, khususnya bahasa. Kelompok ini kemudian tumbuh secara alami, mensosialisasikan unsur budaya tersebut sebagai penciri atau identitas kelompok tersebut.

Naroll menyebutkan bahwa yang menjadi obyek peneliti antropologi, dalam hal ini etnografi, etnis diartikan sebagai unit pemangku budaya (***cultural bearing unit***), ***siapa pun bentuknya***. Ia pun mendefinisikannya sebagai satu kelompok dari person yang (1) berbicara dalam bahasa yang sama di rumahnya, (2) mendiami kawasan yang sama, dan (3) merupakan anggota unit politik yang transeden dengan komunitas lokal atau (karena banyak orang memasuki institusi politik dalam berbagai tingkat kompleksitasannya) tinggal sepenuhnya akrab dengan yang lain untuk menjaga kontaknya. Kriteria ini lebih berakibat pemilihan dua ciri dalam himpunan unit budaya, yang pertama bahasa, yang lain ***rantai komunikasi***, yakni batasan unit politik atau kelompok hubungan (Clifton 1968: 14).

Dalam perkembangannya, ia memperbaiki definisinya. Kelompok etnis adalah sebagai suatu populasi yang :

1. secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan;
2. mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan raas kebersamaan dalam suatu bentuk budaya;
3. membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri;
4. menentukan cirri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain (Barth, 1988: 11; dikutip dari Naroll 1964).

Namun, melalui diskusi-diskusi tentang konsep yang diberikan Naroll dengan beberapa ahli, J.A. Clifton mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kelompok etnis atau unit pemangku budaya. Adapun unit pemangku budaya adalah kesatuan (unit) yang :

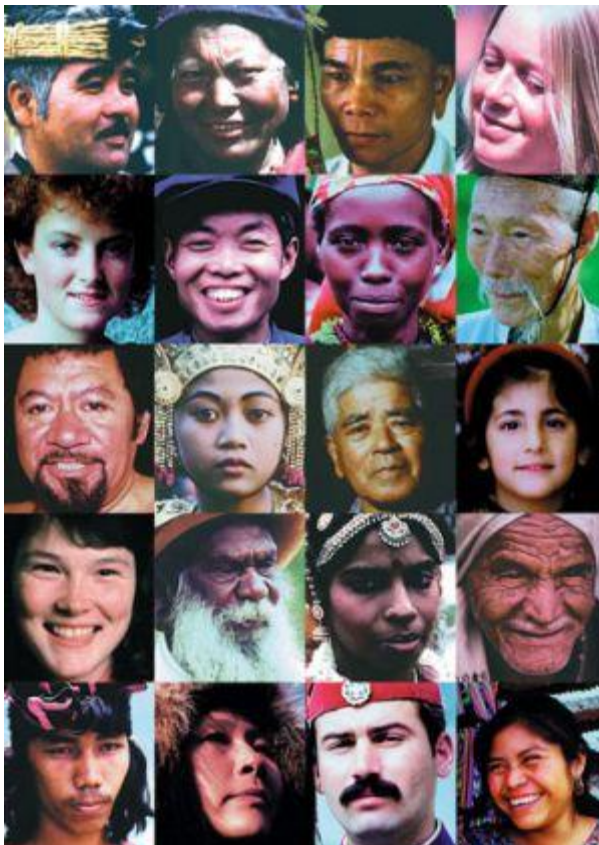
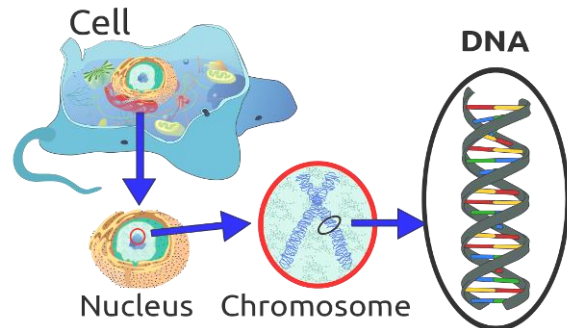
1. terdiri dari satu masyarakat, atau satu atau lebih komunitas;
2. terdiri dari sekelompok orang yang berbicara dalam bahasa yang sama atau kelompok yang berdialek saling dapat dimengerti;
3. terdiri dari kesatuan wilayah administrasi politik tunggal;
4. terdiri dari kesatuan social lebih terkhususkan dan sebagian besar yang dibatasi dan diakui oleh penduduk asli sendiri;
5. terdiri dari sekelompok orang yang menempati wilayah yang sama;
6. menyatakan adanya kesamaan adaptasi ekologis terhadap lingkungan (*landscape*);
7. terdiri dari sekelompok orang yang berbagi (umumnya nama) identitas yang sama dan percaya adanya kesamaan sejarah dan asal-usul (seketurunan);
8. terdiri dari sekelompok orang yang tinggi frekuensi interaksi timbul baliknya;
9. terdiri dari sekelompok orang dengan struktur social yang tegas, berbeda dengan yang lainnya;
10. bisa dibatasi oleh demografi, seperti besar populasi minimal, dan tiga generasi;
11. terdiri dari sekelompok orang (atau satu wilayah) dengan jumlah trait budaya yang sama, asal usul dan pola budayanya berbeda dengan kelompok lainnya (atau wilayah lainnya) (Clifton 1968: 15; bandingkan dengan Koentjaraningrat 1979: 344-345).

Pada tahun 1973 Raoul Naroll (1973: 726-731), dalam "The Culture-Bearing Unit in Cross-Cultural Surveys", kembali memberikan definisi baru tentang kelompok etnis lagi. Ia terpenggil untuk melakukan itu karena dengan batasan di atas kelompok mana yang harus diteliti menjadi tumpang tindih. Batasan antar satu kelompok dengan kelompok yang lain menjadi kabur. Suatu misal, batasan no. 3 dalam kenyataannya sering terjadi dalam beberapa komunitas local dan tidak membedakan apakah sama dalam adaptasi ekologis dan bahasa dialek yang bisa saling dimengerti. Hal yang sama diabaikan oleh etnolog dan etnografer adalah nama asli dari kelompok itu. Mereka tidak tahu bahwa sejumlah orang (1) tidak mempunyai nama sebagai kelompok etnis, (2) belum yakin apa nama itu nama kelompoknya, (3) bisa jadi mempunyai dua atau lebih nama yang membedakan dengan yang lainnya merupakan taksonomi asli, atau nama aslinya bisa digunakan secara tidak beraturan dalam kawasan yang sama. Nama yang diusulkannya adalah **Cultunit**. Cultunit adalah penutur asli dari bahasa khas (**distinet language**) yang sama, yang tinggal pada daerah yang sama (**state**) atau kelompok hubungan yang sama. Penutur asli adalah orang secara dominat menggunakan dialek dalam pembicaraannya dengan keluarga batih, suami dan istri serta beberapa anaknya, sedangkan yang dimaksud dengan bahasa khas adalah bahasa homogen atau serantai bahasa. Bahasa homogen adalah (a) seperangkat dialek dimana penutur dialek di luar seperangkat itu tidak akan memahami dialek yang lain, sedangkan serantai bahasa adalah seperangkat dialek yang bisa digolongkan dengan yang lain. Golongan bahasa yang satu dan yang lain bisa saling dimengerti, tetapi antar dialek di dalamnya belum tentu saling dipahami (Naroll 1973: 731).

Penamaan atau pengidentifikasi diri itu bisa berasal dari dalam atau sebaliknya dari luar yang diterima sebagai penunduk budaya dari pemberi nama. Orang Aborijin di Australia, orang Daya di Kalimantan dan Orang Indian di Amerika Serikat diberi nama oleh sekelompok orang yang menganggap dirinya sah dan memiliki superioritas atas etnik tersebut. Penyebutan Daya pada penutur asli di Kalimantan awalnya sebagai jawaban dari pertanyaan pendatang (orang Eropa) tentang dirinya. "Aku ini Daya," artinya aku ini manusia, sedangkan kata Indian sebenarnya diberikan untuk mengacu pada orang-orang di tanah Hindustan. Penjelajahan orang Eropa untuk mencari pusat perdagangan dan

penghasil rempah-rempah di India, memberikan penamaan kata India untuk mengacu pada penduduk asli Amerika yang dianggap telah sampai ke India.

Demikian pula dengan ras, kalangan antropologi ragawi dalam mencermati fisik manusia di dunia melihat ada keanekaragaman. Keanekaragaman ini terbentuk atas dasar penciri fisiknya yang nampak (*fenotipe*) dan tidak nampak (*genotipe*). Penciri fisik tampak antara lain adalah warna kulit, tinggi badan, dan bentuk rambut. Penciri fisik yang tidak tampak antara lain adalah golongan darah, kromosom dan DNA. Kromosom adalah rangkaian protein yang membawa penanda sifat. Rangkaian molekul protein itu disebut DNA (*Deoxyribonucleic acid*).



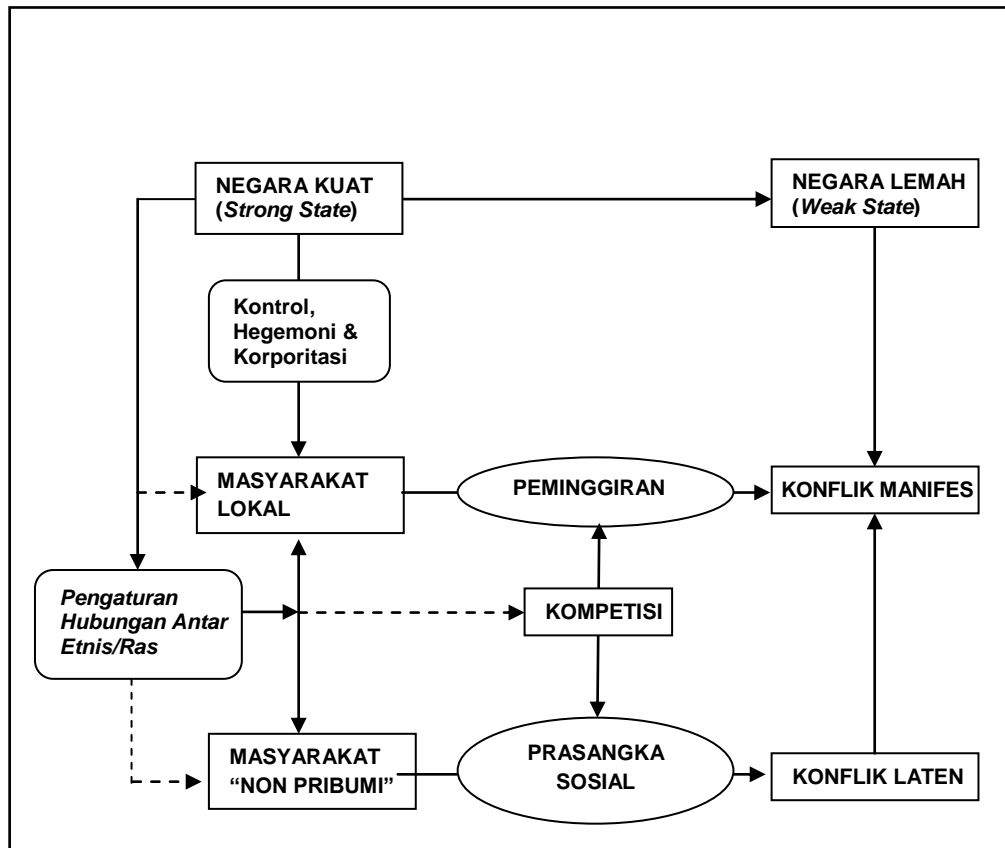
Gambar 4 Ras-ras Manusia  
<http://news.softpedia.com/news/12-of-the-DNA-Differs-Amongst-Human-Races-and-Populations-40872.shtml>

Atas dasar itu, manusia di dunia dibedakan atas tiga ras besar, yaitu: Mongoloid, Caucasoid, dan Negroid, meski terdapat pula sub-sub ras campuran dari ras besar ini. Hal itu tidak terlepas dari pola migrasi manusia di dunia ini. Di Indonesia misalnya, di bagian barat merupakan hingga mendekati wilayah Papua merupakan ras Mongoloid dengan varian Melayu Muda (*Deutero Melayu*) dan Melayu tua (*Proto Melayu*), sementara itu di bagian Papua, Australia dan wilayah Melanesia diduga merupakan hasil percampuran antara Mongoloid dan Negroid yang telah datang lebih dahulu,

membentuk sub-ras Australo-Melanosoid.

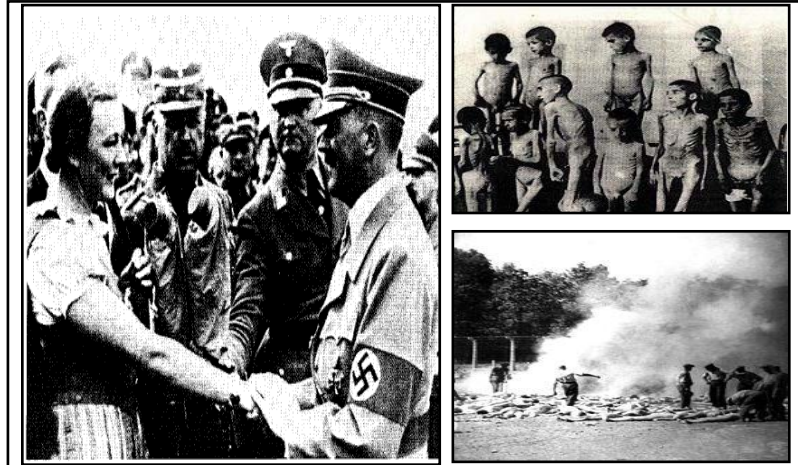
Hubungan antar ras atau etnik sebenarnya lebih merupakan hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas, atau hubungan antara kelompok dominan dan subordinat. Ada tiga factor yang menentukan corak hubungan antar kelompok etnis dalam suatu masyarakat majemuk, yaitu (1) kekuasaan (**power**), (2) persepsi (**perception**), dan (3) tujuan (**purpose**). Kekuasaan merupakan factor yang utama dalam menentukan hubungan antar etnis, sedangkan factor-faktor lainnya ditentukan oleh factor utama ini. Kelompok etnis yang memegang kekuasaan disebut juga sebagai dominan-group atau kelompok dominan yang banyak menentukan **aturan permainan** dalam masyarakat majemuk tersebut, tetapi kelompok sangat jarang merasa sebagai salah satu dari sekian kelompok etnis masyarakat di mana mereka berada (Pelly 1988: 1; kutip dari Royce 1982: 3). Kekuasaan kelompok dominan ini berasal dari kombinasi kekuatan material, ideology dan hak histories. Kekuasaan material meliputi kekuatan ekonomi dan demografi, yaitu penguasaan sumber hidup dan jumlah manusia (**man-power**), sedangkan faktor ideology bertalian dengan tingkat budaya (peradaban) yang dimiliki oleh kelompok etnis/ras tertentu. Hak historis menentukan status kelompok etnis/ras tersebut apakah dia dianggap sebagai tuan rumah, yang disebut juga sebagai penduduk asli, atau pendatang dalam suatu wilayah pemukiman tertentu. Bruner, seorang ahli antropologi Amerika, berdasarkan penelitiannya di Indonesia, mengungkapkan bahwa ada tiga faktor yang menentukan suatu kelompok etnis/ras itu berstatus dominan, yaitu faktor demokratis, politis dan budaya lokal. Dalam hubungan ini ia mengemukakan salah satu contoh kelompok etnis Sunda di kota Bandung menduduki status dominan terhadap kelompok etnis lainnya karena secara kombinasi orang Sunda memiliki keunggulan dalam ketiga faktor di atas di bandingkan dengan kelompok etnis lainnya (Pelly 1989: 1-2).





Di dalam kondisi negara kuat, kelompok dominan dan subordinat memiliki peluang dalam memperebutkan arena untuk pengambilan kebijakan publik. Namun demikian, peranan sumber-sumber yang dimiliki masing-masing kelompok menentukan arah kebijakan dalam pengaturan hubungan antar etnis. Meski memiliki kekuatan politik, tetapi tidak ditunjang oleh kekuatan ekonomi, kelompok tersebut akan mengalami kesulitan dalam pengambilan kebijakan publik. Di dalam sejumlah kasus hubungan antar etnis/ras di Indonesia dan di dunia, kelompok "non-pribumi" memiliki kemampuan dalam mempengaruhi kebijakan publik yang berujung pada pengaturan hubungan antar etnis, serta kontrol, hegemoni dan korporatisasi terhadap masyarakat lokal. Salah satu unsur adalah kekuatan ekonomi dan jaringan yang dimiliki. Dalam kerangka yang tidak transparan, hal itu menyebabkan prasangka sosial. Di lain pihak, proses yang demikian ini menyebabkan peminggiran (*marginalisasi*) pada kelompok lokal. Pada perubahan politik, negara dalam kondisi lemah, tidak menggunakan segala aparatusnya, mulai dari *Ideological State Apparatus* hingga *Repressive State Apparatus*, maka konstelasi hubungan antar etnis/ras ini menjadi runtuh dan

menimbulkan kerusuhan etnis. Di Indonesia, kerusuhan antar etnis seperti di Sampit dan Sambas, Poso, dan Ambon, sebagai satu bukti keruntuhan kelompok dominan. Demikian pula, di Afrika dengan kasus Hutu –Tutsi di Rwanda, serta terjadinya anti-semitis yang diakhiri dengan *genocide* oleh Nazi di Jerman.

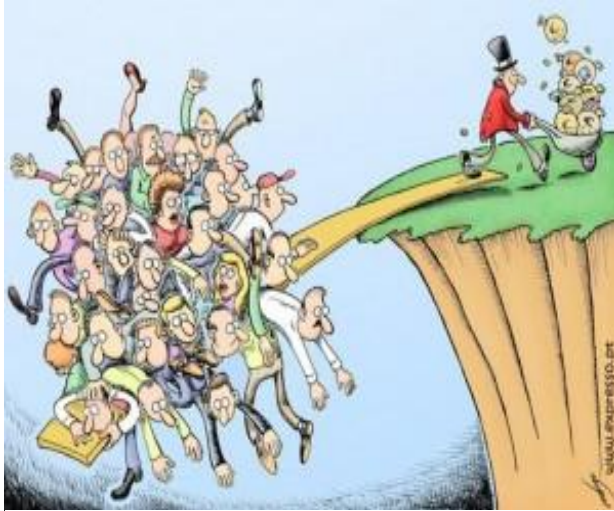


Gambar 5. Keramahan Hitler yang mengorbankan 6 Juta Jiwa orang ‘Semit’  
(diambil dari Corea, 1989)

### 3. KETIMPANGAN ATAS DASAR EKONOMI

Perihal ketimpangan ekonomi ini merupakan pembicaraan atau diskusi para ahli dari sejak awal. Mereka sebenarnya lebih tertuju pada kelompok-kelompok yang secara ekonomi tidak beruntung. Pembicaraan ini juga terus menerus bergaung hingga saat ini. Pada piagam *Millenium Development Goals* misalnya, tujuan para negara ingin mengurangi jumlah orang yang kurang beruntung. Secara ekonomi, orang atau sekelompok orang yang kurang beruntung disebut orang atau sekelompok yang berada di bawah garis kemiskinan. John Pilger (2002) dalam satu film dokumenter yang diproduksi oleh IGJ dan INFID juga menceritakan tentang pernikahan anak konglomerat yang bergemerlapan dan tidak jauh dari tempat pesta, ribuan buruh yang mengalami kesulitan hidup. Atau, cerita seorang anak pembuat sepatu Nike yang dibayar hanya satu dollar sehari, sementara itu Magic Johnson yang dibayar jutaan dollar untuk menjadi bintang iklan sepatu tersebut. Anak itu hanya bisa membuat, tetapi tidak bisa membeli. Kalau nekat, maka ia harus tidak makan puluhan hari.

Contoh lain juga disampaikan oleh salah seorang direktur Sekolah Frankfurt Marx Hocreimer yang menulis surat pada saudaranya. Ketika di pabrik ayahnya, ia memperhatikan seorang buruh perempuan. Karena upahnya kurang,



Gambar 6. Ketimpangan Ekonomi  
[http://keepthemiddleclassalive.com/wp-content/uploads/2011/03/the\\_abyss\\_of\\_inequality\\_3075151-300x214.jpg](http://keepthemiddleclassalive.com/wp-content/uploads/2011/03/the_abyss_of_inequality_3075151-300x214.jpg)

ia dari hari ke hari mengurangi jatah makanan yang harus dikonsumsi. Usaha ini tidak menambah keberuntungan, tetapi sebaliknya akhirnya ibu itu tidak bisa bekerja karena jatuh sakit. Hocreimer sangat marah pada saudara perempuannya. Ia begitu enak menikmati kehidupan. Hanya tidur-tiduran, sementara buruh harus bekerja keras agar pemilik bisa menikmati hidupnya.

Sungguh celaka menjadi buruh!

Bila ingin mengetahui penyebabnya, sudah dari sejak awal sejumlah ahli sosiologi dan ekonomi menjelaskan fenomena tersebut. Sebagaimana telah disebutkan dalam wacana modul ketimpangan sosial pertama, Karl Marx misalnya menjelaskan sebagai bentuk relasi produksi yang tidak seimbang, bahkan teori-teori neo-klasik juga mengatakan yang kurang lebih serupa. Persoalannya lebih menyedihkan lagi dengan apa yang diamati oleh Thorstein Bunde Veblen (1857-1929) bagaimana orang-orang kaya ini menikmati kekayaannya. Hal itu dilihat dari pemanfaatan waktu luang dan konsumsi yang tidak bergunanya. Pemanfaatan hal-hal yang bersifat simbolik tersebut dilakukan untuk menunjukkan status sosial dan ekonomi ia berada.

Tabel 4. Koefisien Gini Indonesia tahun 1996, 1999, 2002, 2005, 2007 s/d 2013 (BPS, 2014)

Provinsi	996	999	'002	'005	'007	'008	'009	'010	'011	'012	'013
Aceh	0,259	0,240	<sup>(1)</sup>	0,299 <sup>(2)</sup>	0,268	0,27	0,29	0,30	0,33	0,32	0,341
Sumatera Utara	0,301	0,254	0,288	0,327	0,307	0,31	0,32	0,35	0,35	0,33	0,354
Sumatera Barat	0,278	0,256	0,268	0,303	0,305	0,29	0,30	0,33	0,35	0,36	0,363
Riau	0,300	0,224	0,292	0,283	0,323	0,31	0,33	0,33	0,36	0,40	0,374
Jambi	0,246	0,240	0,260	0,311	0,306	0,28	0,27	0,30	0,34	0,34	0,348
Sumatera Selatan	0,300	0,260	0,291	0,311	0,316	0,30	0,31	0,34	0,34	0,40	0,383
Bengkulu	0,273	0,254	0,253	0,353	0,338	0,33	0,30	0,37	0,36	0,35	0,386
Lampung	0,276	0,288	0,254	0,375	0,390	0,35	0,35	0,36	0,37	0,36	0,356
Kepulauan Bangka Belitung	n.a	n.a	0,247	0,281	0,259	0,26	0,29	0,30	0,30	0,29	0,313
Kepulauan Riau	n.a	n.a	n.a	0,274	0,302	0,30	0,29	0,29	0,32	0,35	0,362
DKI Jakarta	0,363	0,317	0,322	0,269	0,336	0,33	0,36	0,36	0,44	0,42	0,433
Jawa Barat	0,356	0,286	0,289	0,336	0,344	0,35	0,36	0,36	0,41	0,41	0,411
Jawa Tengah	0,291	0,264	0,284	0,306	0,326	0,31	0,32	0,34	0,38	0,38	0,387
DI Yogyakarta	0,353	0,337	0,367	0,415	0,366	0,36	0,38	0,41	0,40	0,43	0,439
Jawa Timur	0,311	0,291	0,311	0,356	0,337	0,33	0,33	0,34	0,37	0,36	0,364
Banten	n.a	n.a	0,330	0,356	0,365	0,34	0,37	0,42	0,40	0,39	0,399
Bali	0,309	0,270	0,298	0,330	0,333	0,30	0,31	0,37	0,41	0,43	0,403
Nusa Tenggara Barat	0,286	0,261	0,266	0,318	0,328	0,33	0,35	0,40	0,36	0,35	0,364
Nusa Tenggara Timur	0,296	0,267	0,292	0,351	0,353	0,34	0,36	0,38	0,36	0,36	0,352
Kalimantan Barat	0,300	0,271	0,301	0,310	0,309	0,31	0,32	0,37	0,40	0,38	0,396
Kalimantan Tengah	0,271	0,237	0,245	0,283	0,297	0,29	0,29	0,30	0,34	0,33	0,350
Kalimantan Selatan	0,292	0,264	0,292	0,279	0,341	0,33	0,35	0,37	0,37	0,38	0,359
Kalimantan Timur	0,318	0,277	0,304	0,318	0,334	0,34	0,38	0,37	0,38	0,36	0,371
Sulawesi Utara	0,344	0,272	0,270	0,323	0,324	0,28	0,31	0,37	0,39	0,43	0,422
Sulawesi Tengah	0,302	0,286	0,283	0,301	0,320	0,33	0,34	0,37	0,38	0,40	0,407
Sulawesi Selatan	0,323	0,296	0,301	0,353	0,370	0,36	0,39	0,40	0,41	0,41	0,429
Sulawesi Tenggara	0,311	0,276	0,270	0,364	0,353	0,33	0,36	0,42	0,41	0,40	0,426
Gorontalo	n.a	n.a	0,241	0,355	0,388	0,34	0,35	0,43	0,46	0,44	0,437
Sulawesi Barat	n.a	n.a	n.a	n.a	0,310	0,31	0,30	0,36	0,34	0,31	0,349
Maluku	0,269	0,241	<sup>(1)</sup>	0,258	0,328	0,31	0,31	0,33	0,41	0,38	0,370
Maluku Utara	n.a	n.a	n.a	0,261	0,332	0,33	0,33	0,34	0,33	0,34	0,318
Papua Barat	n.a	n.a	n.a	n.a	0,299	0,31	0,35	0,38	0,40	0,43	0,431
Papua	0,386	0,360	<sup>(1)</sup>	0,389	0,412	0,40	0,38	0,41	0,42	0,44	0,442
<b>INDONESIA</b>	<b>0,355</b>	<b>0,308</b>	<b>0,329</b>	<b>0,363</b>	<b>0,364</b>	<b>0,35</b>	<b>0,37</b>	<b>0,38</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>	<b>0,413</b>

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS (2014)

Catatan : Berdasarkan Susena Maret

(1) : Hanya Dilakukan pengumpulan data KOR di Ibukota Propinsi

(2) : Tidak digunakan untuk estimasi angka Indonesia

Untuk mencermati ketimpangan ekonomi atau pendapatan, sekaligus melihat pemerataan distribusinya, Corrado Gini (1912), seorang statistik Italia mengembangkan rumus Koefisi-

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (Fc_i + Fc_{i-1})$$

GR= Koefisisen gini

Fpi= frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

Fci= frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

Fci-1 = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

en Gini. Dengan rumus tersebut, pada prinsip bila angka koefisien Gini mendekati 0, maka tidak ada ketimpangan atau terjadi pemerataan pendapatan. Sebaliknya, bila angka koefisien mendekati 1, maka ada ketimpangan pendapatan. Bila memperhatikan tabel 2, maka masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun ternyata mengalami ketimpangan pendapatan. Meskipun mengalami kenaikan 0,03 pada tahun 2013, angka itu tetap menunjukkan lebih terjadi

Gambar 7. Koefisien Gini Provinsi Tahun 2013 (BPS, 2014)



60

Ada yang benci dirinya  
Ada yang butuh dirinya  
Ada yang berlutut mencintanya  
Ada pula yang kejam menyiksa dirinya

Ini hidup wanita si kupu-kupu malam  
Bekerja bertaruh seluruh jiwa raga  
Bibir senyum kata halus merayu memanja  
Kepada setiap mereka yang datang

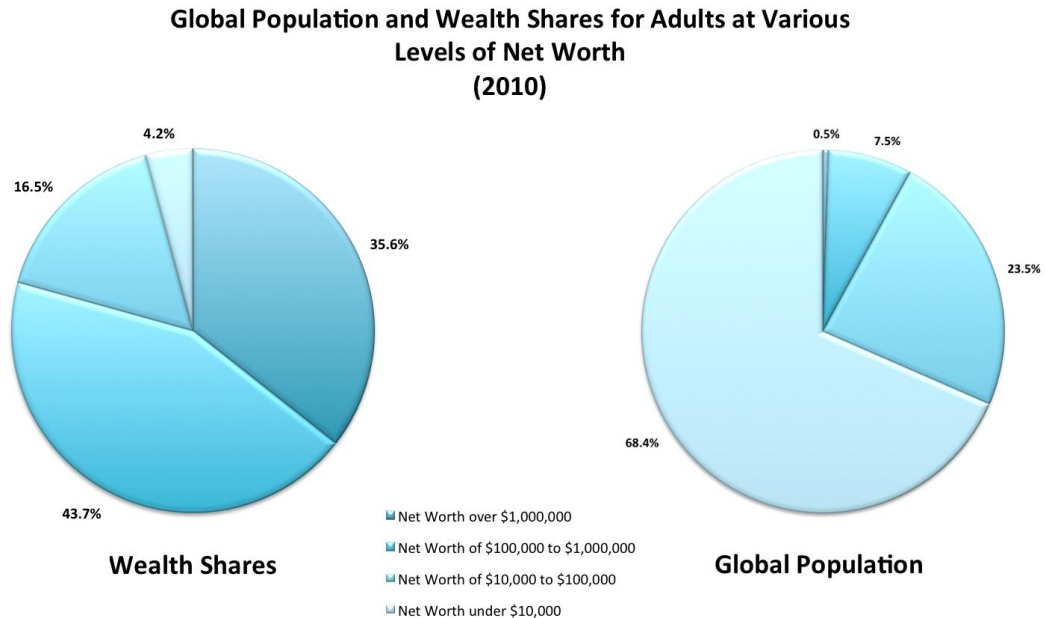
Dosakah yang dia kerjakan  
Sucikah mereka yang dating  
Kadang dia tersenyum dalam tangis  
Kadang dia menangis di dalam senyuman

Oh apa yang terjadi, terjadilah  
Yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya  
Oh apa yang terjadi, terjadilah  
Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa

Oh apa yang terjadi, terjadilah  
Yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya  
Oh apa yang terjadi, terjadilah  
Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa

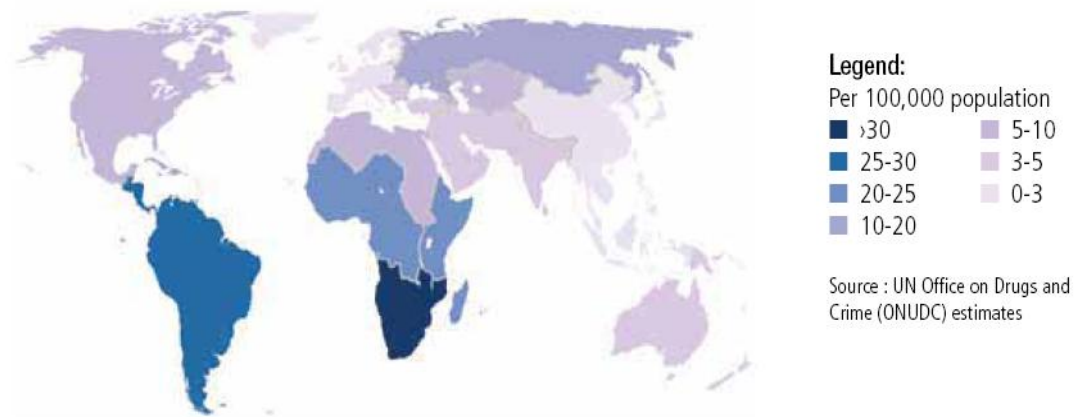
Di tingkat global (dunia), ketidakseimbangan itu bukan sekedar perbandingan kekayaan atau pendapatan negara, tetapi kini pemain usaha sudah mengarah pada perusahaan pribadi yang memiliki jangkauan luas atau dikenal dengan MNC (*Multinational Cooperation*). Oleh karena itu, Forbes, salah satu lembaga nir laba menghitung kekayaan para pemilik usaha tersebut. Hasilnya seperti gambar 8. Jumlah kekayaan sekitar 79,3% dari pendapatan keseluruhann orang dewasa di dunia. Namun demikian, jumlah orangnya tidak lebih dari 8% dari penduduk dunia. Sungguh tidak adil, bisa dibayangkan segelintir orang menikmati pendapatan yang begitu besar.

Gambar 8. Penduduk Dunia dan Pembagian Kekayaan untuk Orang Dewasa dengan Berbagai Tingkatan

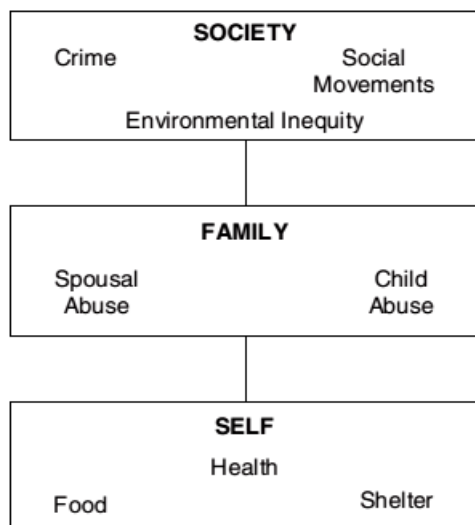


Ketimpangan global ini berimbas pada tingkat kejahatan. Bila memperhatikan gambar 9, maka nampak kasus-kasus kejahatan yang berujung kematian terjadi pada wilayah-wilayah negara yang secara ekonomi kurang beruntung. Angka kematian akibat pembunuhan di atas 20 per 100.000 terjadi di Benua Afrika, dan lebih parah pada bagian tengah hingga ke Afrika Selatan. Negara Afrika Selatan adalah negara yang baru kurang lebih dua dekade tidak mempraktikkan politik apartheid (pemisahan ras kulit hitam dari kulit putih). Hal yang serupa terjadi juga di wilayah Amerika Tengah hingga Amerika Latin. Indonesia termasuk negara yang cukup beruntung karena angka pembunuhannya relatif sangat kecil.

Gambar 9. Peta Angka Pembunuhan di Area Konflik-Tidak Konflik per 100.000 penduduk (Idriss,et.al, 2010)



Di era dekade 1960-an hingga 1980-an, ketimpangan ekonomi yang dikritisi oleh para pemikir Marxian kemudian disikapi oleh berbagai gerakan yang beberapa di antaranya telah mengarah pada terorisme. Sebut saja, laskar



*brigade merah* di Italia yang melakukan penculikan terhadap pemilik industri hingga pembunuhan perdana menteri. Di Jerman, sekelompok pemuda militan yang menamakan diri sebagai kelompok *Beider Meinhoff* juga melakukan hal yang serupa. Kelompok-kelompok itu dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial (*social movement*) karena memiliki tujuan untuk melakukan perubahan. Hanya saja, caranya dengan penggunaan kekerasan (*violence*). Kekerasan dilakukan sebagai modus operandi untuk menekan

kelompok penguasa agar mengikuti kemauannya. Cara yang demikian bisa dikategorikan sebagai terorisme.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Di dunia saat ini, ada sejumlah gerakan yang menggunakan pola yang sama. Perbedaannya adalah ideologi yang digunakan. Ideologi tidak lagi Marxisme, tetapi agama. Agama menjadi alat pembenar tindakan yang dilakukan. Hal itu jauh lebih berbahaya karena alih-alih membela agama dan Tuhan, mereka melakukan kekerasan. Dengan dasar itu, mereka merasa tidak bersalah. Walaupun harus bunuh diri, tindakannya merupakan mati syahid.



Ada hal yang menarik dari kasus gerakan sosial yang menggunakan terorisme pada masa tahun 1960-an s/d 1980-an. Sebagian besar para pelakunya berasal dari keluarga kelas menengah ke atas. Mereka seolah-olah melakukan penebusan dosa. Sayangnya, caranya yang salah. Mereka mencoba meniru Robin Hood. Robin Hood melakukan perampokan dan pencurian pada orang kaya dan kemudian dibagi-bagikan kepada keluarga miskin.

Gerakan sosial sebenarnya tidak selalu mengambil model seperti pada tahun 1960-an s/d 1980-an. Ada yang mengatakan bahwa cara-cara ekstra parlemen, bahkan hingga tindakan kekerasan, dilakukan ketika lawan yang dihadapi bersikeras. Namun demikian, gerakan-gerakan lain lebih mengambil cara yang *soft*, yaitu masuk kedalam sistem. Gerakan lingkungan hidup yang mencegah eksploitasi alam oleh kaum industrialis misalnya mendirikan partai Hijau dan memperjuangkan penyelamatan lingkungan hidup. Sementara itu, gerakan *green peace* atau sejenisnya tetap mengambil langkah ekstra-parleментар untuk daya kejut. Kelompok lingkungan hidup telah memaksa negara-negara untuk melakukan konferensi iklim akhir tahun 2015.

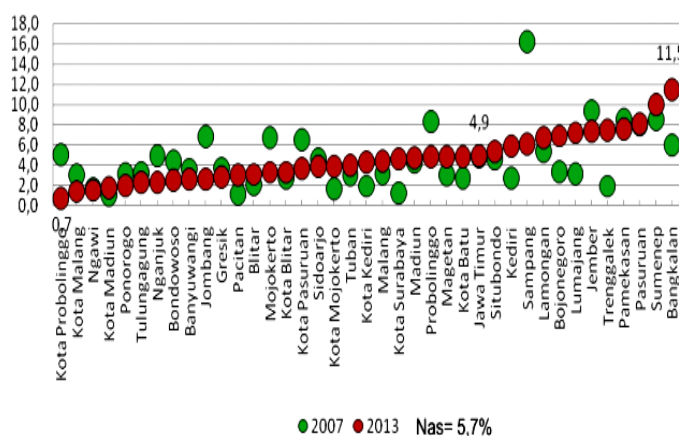
Tidak saja gerakan lingkungan hidup, ada juga gerakan perempuan, gerakan kelompok-kelompok seks minoritas (LGBT), gerakan anti-korupsi dan gerakan perdamaian juga mengambil cara parlemen untuk menyuarakan haknya. Melalui perjuangan, gerakan LGBT pada tahun 2015 telah berhasil memperjuangkan hak perkawinan sesama jenis di AS. Suatu perjuangan yang cukup lama, bahkan sejumlah pelaku orientasi seks tersebut mati terbunuh akibat *bullying* dari orang-orang yang *homophobia*. Kejadian pengesahan perkawinan sejenis ini sangat mengejutkan bagi masyarakat Indonesia. UU No. 1 tahun 1974 yang belum direvisi saat masih melarang perkawinan semacam ini.

Namun demikian, ketika mencermati ketimpangan, kita tidak bisa melihat bahwa kelompok dominan (atau kelompok yang diuntungkan) dan kelompok subordinat (atau kelompok yang dirugikan) memiliki sifat yang statis. Beberapa orang dari kelompok dominan secara ekonomi misalnya telah juga memiliki kesadaran terhadap masyarakat di sekitarnya. Kepedulian itu diwujudkan dalam program CSR (*Coorporation Social Responsibility*). Dalam program itu, perusahaan memiliki kewajiban memberdayakan masyarakat sekitarnya melalui berbagai cara, mulai dari pendidikan, kesehatan atau lainnya. Dengan menggunakan perundang-undangan, pemerintah juga memaksa setiap perusahaan melakukan

demikian. Hal itu dibiayai oleh perusahaan di luar pajak yang dibayar pada pemerintah. Secara individual, sejumlah orang kaya memilih membentuk yayasan untuk melakukan pengabdian pada masyarakat. Pilihan itu dipakai selain menyalurkan semangat *charity* (berbelas kasih), sekaligus untuk “menghindari” pajak.

Ketimpangan berpengaruh di dalam keluarga (lihat gambar 10). Akibatnya adalah kekerasan terhadap pasangan dan anak. Budaya patriaki yang mendudukan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi sering mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di sepanjang tahun 2015, hampir setiap hari para pembaca dikejutkan oleh berita tentang istri disiksa, dibunuh atau apapun oleh suami dengan alasan cemburu atau keinginan untuk

berhubungan badan ditolak. Tidak saja istri, tetapi juga kisah tentang anak-anak yang disiksa dan diperkosa. Budaya patriaki seolah-olah memberikan kewenangan pada laki-laki untuk berbuat apa saja pada perempuan. Konstruk budaya patriaki juga terjadi pada relasi antara kelompok kaya dan miskin. Kisah kematian Angelin dari



Pulau Bali merupakan kisah pilu konstruk patriaki orang kaya yang memperlakukan anak punggutnya. Bayi itu berasal dari keluarga miskin diserahkan oleh orangtua dengan harapan hidup lebih baik di masa mendatang. Pada kenyataannya, ia menjadi budak, harus memberi makan ternak dan seterusnya hingga mati terkubur di bawah kandang ayam.

Dari sisi kesehatan, ketimpangan ini ditunjukkan oleh gambar 11. Angka gizi buruk menunjukkan kekurangan asupan gizi pada anak balita, sekaligus menunjukkan perhatian yang kurang terhadap kesehatan anak. Bila memperhatikan gambar 11, maka nampak angka gizi buruk lebih berada pada kabupaten yang angka kemiskinan tinggi dan ditambah dengan budaya patriaki yang kuat seperti pada wilayah Madura dan Pedalungan.

## D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Dari uraian materi, telah dipaparkan berbagai dimensi atau aspek dalam ketimpangan sosial. Tentulah, hal ini tidak perlu harus diingat, tetapi pemahaman jauh lebih penting dan pada gilirannya menjadi materi itu sebagai pengetahuan yang harus di-*praxis*-kan, diterapkan dengan peduli terhadap ketimpangan sosial. Diam merupakan hal yang tidak baik ketika terjadi ketimpangan sosial. Kemampuan untuk peduli terletak dari pemahaman yang utuh pada materi ini. Untuk itu, pembelajar dapat membaca, menarik benang merah dari uraian materi, dan lebih dari itu mencari contoh di lingkungan sekitarnya.

Bila peserta diklat mengalami kesulitan dalam memahami substansi materi dalam uraian materi, peserta diklat diharapkan mendiskusikan kesulitan-kesulitan tersebut dengan membentuk kelompok. Dalam kegiatan pembelajaran ini menyarankan agar peserta diklat belajar dalam kelompok. Dengan belajar dalam kelompok diharapkan akan terjadi tukar pengetahuan untuk memecahkan kesulitan-kesulitan atau masalah. Bila dalam kelompok belum bisa memecahkan kesulitan atau masalah, peserta diklat diharapkan berkonsultasi dengan para tutor atau widyaiswara.

## E. LATIHAN/KASUS/TUGAS

### Angka Perceraian di Jatim Capai 100 Ribu

Kamis, 20 Agustus 2015 18:06 WIB

Pewarta: Laili Widya Arisandhi

*“Angka perceraian di Jawa Timur (Jatim) pada tahun 2015 mencapai 100 ribu kasus dengan perbandingan 20 persen dari angka perkawinan sebanyak 500 ribu yang disebabkan oleh faktor beragam.”*

Surabaya (Antara Jatim) - Angka perceraian di Jawa Timur (Jatim) pada tahun 2015 mencapai 100 ribu kasus dengan perbandingan 20 persen dari angka perkawinan dan sisanya disebabkan oleh faktor beragam.

"Dari data Pengadilan Agama Jatim, angka perceraian memang terus meningkat setiap tahunnya," kata Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf, saat menghadiri Kongres I Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender Indonesia (ASWGI) di Surabaya, Kamis.

Pada tahun 2010, jumlah mencapai 69.956 kasus, tahun 2011 meningkat sebesar 6 persen menjadi 74.777 kasus, pada tahun 2012 meningkat lagi sebesar 14 persen menjadi 81.672 kasus perceraian, dan sekarang mencapai 100 ribu kasus

la mengatakan data tersebut diambil dari data yang mengajukan cerai di Jatim, sedangkan untuk perkara yang nantinya akan disetujui atau tidak, maka diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan untuk memutuskannya.

"Perceraian di Jatim memang mengalami peningkatan yang sangat tinggi dan dialami paling banyak oleh profesi guru, karena dilatarbelakangi banyak faktor, diantaranya adalah masalah ekonomi maupun hubungan pasutri yang tidak harmonis sekitar 33 persen," ujarnya.

Dia mengungkapkan ketidakcocokan atau ketidakharmonisan antara pasangan suami istri menjadi penyebab utamanya, kemudian faktor ekonomi yang suami tidak lagi menafkahi istri dan keluarganya, serta suami tidak bertanggung jawab lagi dengan istri dan keluarganya.

Di samping ini adalah Berita tentang angka perceraian di Jawa Timur. Dari berita tersebut analisislah apakah ada ketimpangan relasi antara pelaku perceraian tersebut !

## **F. RANGKUMAN**

Dalam modul ini, setidaknya-tidaknya ada tiga dimensi atau aspek dalam ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial yang pertama berkaitan dengan jenis kelamin, jender dan orientasi seks. Jenis kelamin dan jender sebenarnya hanya persoalan biologis dan konstruksi sosial. Perkembangan jenis kelamin seseorang merupakan proses biologi dari pertemuan sel telur dan sperma. Namun demikian, pada kenyataannya direkonstruksi berdasarkan bentuk fisik dan pada gilirannya dipaksakan pada perilaku yang diharapkan. Dari titik inilah, budaya patriaki mengedepan. Jenis kelamin dan jender ini kemudian menjadi alat stratifikasi baru. Orang tidak saja dibedakan, tetapi disubordinasi. Perempuan harus tunduk pada laki-laki. Hingga menjadi masyarakat industri, perempuan disudutkan dengan diberi upah yang lebih dan seterusnya hingga seterusnya. Pada akhirnya, sejumlah perempuan memiliki kesadaran untuk melihat keadaan ini bukan hal yang benar.

Hal yang serupa pada ras dan etnis. Ras adalah konstruk para ahli antropologi ragawi. Dengan ras, para ahli dapat mengidentifikasi dan memetakan varian manusia berdasarkan ciri-ciri tubuh yang kelihatan dan tidak kelihatan. Sementara itu, etnis adalah pengelompokan manusia yang dibangun dengan dasar tatanan nilai. Etnis dengan bahasa sebagai identitas tidak bermaksud untuk memisahkan antara satu kelompok dan kelompok lain. Pada kenyataannya, etnis dan ras ini kemudian menjadi pembeda dalam stratifikasi sosial ketika memandang etnis dan ras yang satu lebih baik daripada yang lainnya. Pembedaan ini mengakibatkan ketimpangan karena anggota kelompok etnis dan ras yang subordinat tidak dapat mengakses apa yang dibutuhkan dari masyarakatnya. Lebih dari itu, pembedaan ini menyebabkan kematian, seperti kasus pada perang dunia kedua.

Terakhir, pendapatan atau penghasilan sudah disadari dari sejak awal sebagai faktor pembeda. Pendapatan ini pada kenyataannya memang tidak adil di dunia ini. Orang dalam jumlah sedikit memiliki jumlah yang banyak, sementara itu orang dalam jumlah besar hanya hidup dari penghasilan yang terbatas. Gambar-gambar di atas telah menunjukkan hal tersebut.

## **G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT**

Ketimpangan sosial memang jarang dibicarakan dalam mata pelajaran Sosiologi. Namun demikian, dari materi ini sudahkah melihat hal tersebut memang nampak untuk diperbincangkan bersama. Apabila belum memahami, menjadi lebih baik bila berdiskusi dengan rekan-rekan lainnya.

## **Kegiatan Pembelajaran 4**

### **Model-Model Pembelajaran**

#### **A. Tujuan**

Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran 4, peserta diklat mampu memahami konsep model-model pembelajaran sosiologi dengan benar sehingga mampu menerapkan model-model pembelajaran pada pembelajaran sosiologi.

#### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Menguraikan Model *Project Based Learning*,
2. Menguraikan Model *Problem Based Learning*, dan
3. Menguraikan Model *Discovery Learning*
4. Menyusun rancangan pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran

#### **C. Uraian Materi**

##### **1. Model Pembelajaran Berbasis Proyek/*Project Based Learning***

###### **a. Konsep/Definisi Pembelajaran Berbasis Proyek**

Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project Based Learning*=*PjBL*) adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai inti pembelajaran. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar.

Pembelajaran berbasis proyek merupakan model belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Masalah tersebut menjadi pengalamannya dalam beraktifitas secara nyata. Melalui *PjBL*, proses *inquiry* dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun (*a guiding question*) dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek (materi) dalam

kurikulum. *PjBL* merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata, hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik.

Pembelajaran Berbasis Proyek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja,
- 2) adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik,
- 3) peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan,
- 4) peserta didik secara kolaboratif bertanggungjawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan,
- 5) proses evaluasi dijalankan secara kontinyu,
- 6) peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan,
- 7) produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif,
- 8) situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan

Peran guru dalam Pembelajaran Berbasis Proyek sebaiknya sebagai fasilitator, pelatih, penasehat dan perantara untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan daya imajinasi, kreasi dan inovasi dari siswa.

## b. Langkah-Langkah Operasional

Langkah langkah pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek dapat dijelaskan dengan diagram sebagai berikut.



Penjelasan langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Proyek sebagai berikut.

### 1) Penentuan Pertanyaan Mendasar (*Start With the Essential Question*)

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam dan topik yang diangkat relevan untuk para peserta didik.

### 2) Mendesain Perencanaan Proyek (*Design a Plan for the Project*)

Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. Peserta didik diharapkan akan merasa “memiliki” atas proyek tersebut. Perencanaan berisi aturan kegiatandalam penyelesaian proyek.

### 3) Menyusun Jadwal (*Create a Schedule*)

Pengajar dan peserta didik menyusun jadwal aktivitas penyelesaian proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: (1) membuat timeline penyelesaian proyek, (2) membuat deadline penyelesaian proyek, (3) membimbing peserta didik agar merencanakan cara yang baru, (4) membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, dan (5) meminta peserta didik untuk membuat penjelasan (alasan) tentang pemilihan suatu cara.

### 4) Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek (*Monitor the Students and the Progress of the Project*)



Pengajar bertanggungjawab untuk memonitor aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek, menggunakan rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.

5) Menguji Hasil (*Assess the Outcome*)

Penilaian dilakukan untuk mengukur ketercapaian kompetensi, mengevaluasi kemajuan masing - masing peserta didik, memberi umpan balik terhadap pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, dan membantu pengajar dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya.

6) Mengevaluasi Pengalaman (*Evaluate the Experience*)

Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Pada tahap ini peserta didik diminta untuk mengungkapkan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Pengajar dan peserta didik mengembangkan diskusi untuk memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru (*new inquiry*) untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Peran guru dan peserta didik dalam pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek sebagai berikut.

### **c. Peran Guru dan Peserta Didik**

Peran guru pada Pembelajaran Berbasis Proyek meliputi: a) Merencanakan dan mendesain pembelajaran, b) Membuat strategi pembelajaran, c) Membayangkan interaksi yang akan terjadi antara guru dan siswa, d) Mencari keunikan siswa, e) Menilai siswa dengan cara transparan dan berbagai macam penilaian dan f) Membuat portofolio pekerjaan siswa.

Peran peserta didik pada Pembelajaran Berbasis Proyek meliputi :

a) Menggunakan kemampuan bertanya dan berpikir, b) Melakukan riset sederhana, c) Mempelajari ide dan konsep baru, d) Belajar mengatur waktu dengan baik, e) Melakukan kegiatan belajar sendiri/kelompok, f) Mengaplikasikan hasil belajar lewat tindakan dan g) Melakukan interaksi sosial (wawancara, survey, observasi, dll).

#### **d. Sistem Penilaian**

Penilaian pembelajaran berbasis proyek harus dilakukan secara menyeluruh terhadap sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa selama pembelajaran. Penilaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penilaian proyek pada model ini merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas.

Pada penilaian proyek setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan yaitu:

- 1) Kemampuan pengelolaan : Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan.
- 2) Relevansi: Kesesuaian dengan mata pelajaran, dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam pembelajaran.
- 3) Keaslian: Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya, dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik.

Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, proses pengerjaan, sampai hasil akhir proyek. Untuk itu, guru perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan disain, pengumpulan data, analisis data, dan menyiapkan laporan tertulis. Laporan tugas atau hasil penelitian juga dapat disajikan dalam bentuk poster. Pelaksanaan penilaian dapat menggunakan alat/ instrumen penilaian berupa daftar cek ataupun skala penilaian

#### e. Fase-fase PjBL

TAHAP PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. Penentuan Pertanyaan Mendasar	
2. Mendesain Perencanaan Proyek	
3. Menyusun Jadwal	
4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek	
5. Menguji Hasil	
6. Mengevaluasi Pengalaman	

## 2. Model Pembelajaran Penemuan (*Discovery Learning*)

### a. Definisi dan Konsep

*Discovery* mempunyai prinsip yang sama dengan inkuiri (*inquiry*) dan *Problem Solving*. Tidak ada perbedaan yang prinsipil pada ketiga istilah ini, pada *Discovery Learning* lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Masalah yang diberikan kepada siswa adalah semacam masalah yang direkayasa oleh guru. Sedangkan pada inkuiri masalahnya bukan hasil rekayasa, sehingga siswa harus mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui proses penelitian, sedangkan *Problem Solving* lebih memberi tekanan pada kemampuan menyelesaikan masalah. Pada *Discovery Learning* materi yang akan disampaikan tidak disampaikan dalam bentuk final akan tetapi peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri kemudian mengorganisasi atau membentuk (konstruktif) apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir.

Penggunaan *Discovery Learning*, ingin merubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif. Mengubah pembelajaran yang *teacher oriented* ke *student oriented*. Merubah modus Ekspository siswa hanya menerima informasi secara keseluruhan dari guru ke modus Discovery siswa menemukan informasisendiri.

Di dalam proses belajar, Bruner mementingkan partisipasi aktif dari tiap siswa, dan mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan. Untuk menunjang proses belajar perlu lingkungan memfasilitasi rasa ingin tahu siswa pada tahap eksplorasi. Lingkungan ini dinamakan *Discovery Learning Environment*. Di lingkungan itu, siswa dapat melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang belum dikenal atau pengertian yang mirip dengan yang sudah diketahui. Lingkungan seperti itu bertujuan agar siswa dalam proses belajar dapat berjalan dengan baik dan lebih kreatif.

Dalam *Discovery Learning* bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir, siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Bruner mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya (Budiningsih, 2005:41). Pada akhirnya yang menjadi tujuan dalam *Discovery Learning* menurut Bruner adalah hendaklah guru memberikan kesempatan kepada muridnya untuk menjadi seorang *problem solver*, seorang scientist, historin, atau ahli matematika. Melalui kegiatan tersebut, siswa akan menguasainya, menerapkan, serta menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya.

## **b. Langkah-langkah Operasional Implementasi dalam Proses Pembelajaran**

Langkah-langkah dalam mengaplikasikan model *discovery learning* di kelas adalah sebagai berikut:

### **1). Perencanaan**

Perencanaan pada model ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

- Menentukan tujuan pembelajaran
- Melakukan identifikasi karakteristik siswa (kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya)
- Memilih materi pelajaran.
- Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif (dari contoh-contoh generalisasi)
- Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas dan sebagainya untuk dipelajari siswa
- Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai ke simbolik
- Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa

### **2). Pelaksanaan**

Menurut Syah (2004) dalam mengaplikasikan metode *Discovery Learning* di kelas, ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar secara umum sebagai berikut.

#### **a) *Stimulation* (stimulasi/pemberian rangsangan)**

Pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya dan timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi

bahan. Dengan demikian seorang Guru harus menguasai teknik-teknik dalam memberi stimulus kepada siswa agar tujuan mengaktifkan siswa untuk mengeksplorasi dapat tercapai.

**b) *Problem statement* (pernyataan/ identifikasi masalah)**

Setelah dilakukan stimulation guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah)

**c) *Data collection* (pengumpulan data)**

Pada saat peserta didik melakukan eksperimen atau eksplorasi, guru memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Data dapat diperoleh melalui membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan nara sumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya.

**d) *Data processing* (pengolahan data)**

Menurut Syah (2004:244) pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan.

**e) *Verification* (pembuktian)**

Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan, dihubungkan dengan hasil data processing. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran, atau informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek, apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak.

**f) *Generalization* (menarik kesimpulan/generalisasi)**

Tahap generalisasi/ menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi.


### 3). Sistem Penilaian

Dalam Model Pembelajaran *Discovery*, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan tes maupun non tes. Penilaian dapat berupa penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap, atau penilaian hasil kerja siswa. Jika bentuk penialainnya berupa penilaian pengetahuan, maka dalam model pembelajaran *discovery* dapat menggunakan tes tertulis. Jika bentuk penilaiannya menggunakan penilaian proses, sikap, atau penilaian hasil kerja siswa, maka pelaksanaan penilaian dapat menggunakan contoh-contoh format penilaian sikap seperti yang ada pada uraian penilaian proses dan hasil belajar pada materi berikutnya

### 4). Fase-fase *Discovery Learning*

TAHAP PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. <i>Stimulation</i> (simullasi/Pemberian rangsangan)	
2. <i>Problem statemen</i> (pertanyaan/identifikasi masalah)	
3. <i>Data collection</i> (pengumpulandata)	
1. Data processing (pengolahan Data)	
2. <i>Verification</i> (pembuktian)	
3. <i>Generalization</i> (menarik kesimpulan/generalisasi)	

### 3. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem Based Learning*)

 <p>The diagram illustrates the Problem-Based Learning Process as a continuous cycle. It starts with 'Problem' (blue arrow pointing right), followed by 'Ideas' (red arrow pointing down), then 'Knowledge' (dark red arrow pointing left), then 'Learning Issues' (green arrow pointing up), then 'Course of Action' (yellow arrow pointing right), and finally back to 'Problem'.</p>	<p><i>Problem Based Learning</i> (PBL) adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapat pengetahuan penting, yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistemik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.</p>
--	--

#### a. Konsep

Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata (*real world*). Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk “belajar bagaimana belajar”, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Masalah diberikan kepada peserta didik, sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan.

Ada lima strategi dalam menggunakan model pembelajaran berbasis masalah (PBL) yaitu:

- 1) Permasalahan sebagai kajian.
- 2) Permasalahan sebagai penjajakan pemahaman
- 3) Permasalahan sebagai contoh
- 4) Permasalahan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses
- 5) Permasalahan sebagai stimulus aktivitas autentik



Peran guru, peserta didik dan masalah dalam pembelajaran berbasis masalah dapat digambarkan sebagai berikut.

Guru sebagai pelatih	Peserta didik sebagai <i>problem solver</i>	Masalah sebagai awal tantangan dan motivasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Asking about thinking</i> (bertanya tentang pemikiran)</li> <li>- <i>memonitor</i> pembelajaran</li> <li>- <i>probbing</i> ( menantang peserta didik untuk berfikir )</li> <li>- <i>menjaga</i> agar peserta didik terlibat</li> <li>- <i>mengatur</i> dinamika kelompok</li> <li>- <i>menjaga</i> berlangsungnya proses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>peserta yang aktif</i></li> <li>- <i>terlibat langsung dalam pembelajaran</i></li> <li>- <i>membangun pembelajaran</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>enarik untuk dipecahkan</i></li> <li>- <i>menyediakan kebutuhan yang ada hubungannya dengan pelajaran yang dipelajari</i></li> </ul>

Tabel 5. Peran guru, peserta didik dan masalah dalam pembelajaran berbasis masalah

## b. Tujuan dan hasil dari model pembelajaran berbasis masalah

- 1) Keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah

Pembelajaran berbasis masalah ini ditujukan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi.

- 2) Pemodelan peranan orang dewasa.

Bentuk pembelajaran berbasis masalah penting menjembatani *gap* antara pembelajaran sekolah formal dengan aktivitas mental yang lebih praktis yang dijumpai di luar sekolah. Aktivitas-aktivitas mental di luar sekolah yang dapat dikembangkan adalah :

- PBL mendorong kerjasama dalam menyelesaikan tugas.
- PBL memiliki elemen-elemen magang. Hal ini mendorong pengamatan dan dialog dengan yang lain sehingga peserta didik secara bertahap dapat memiliki peran yang diamati tersebut.

- PBL melibatkan peserta didik dalam penyelidikan pilihan sendiri, yang memungkinkan mereka menginterpretasikan dan menjelaskan fenomena dunia nyata dan membangun pemahannya tentang fenomena itu.
- 3) Belajar Pengarahan Sendiri (*self directed learning*)  
Pembelajaran berbasis masalah berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus dapat menentukan sendiri apa yang harus dipelajari, dan dari mana informasi harus diperoleh, di bawah bimbingan guru.

**c. Model PBL mengacu pada hal-hal sebagai berikut :**

- 1) Kurikulum: PBL tidak seperti pada kurikulum tradisional, karena memerlukan suatu strategi sasaran di mana proyek sebagai pusat.
- 2) *Responsibility*: PBL menekankan *responsibility* dan *answerability* para peserta didik ke diri dan pasangannya.
- 3) Realisme: kegiatan peserta didik difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Aktivitas ini mengintegrasikan tugas autentik dan menghasilkan sikap profesional.
- 4) *Active-learning*: menumbuhkan isu yang berujung pada pertanyaan dan keinginan peserta didik untuk menemukan jawaban yang relevan, sehingga dengan demikian telah terjadi proses pembelajaran yang mandiri.
- 5) Umpan Balik: diskusi, presentasi, dan evaluasi terhadap para peserta didik menghasilkan umpan balik yang berharga. Ini mendorong ke arah pembelajaran berdasarkan pengalaman.
- 6) Keterampilan Umum: PBL dikembangkan tidak hanya pada keterampilan pokok dan pengetahuan saja, tetapi juga mempunyai pengaruh besar pada keterampilan yang mendasar seperti pemecahan masalah, kerja kelompok, dan *self-management*.
- 7) *Driving Questions*: PBL difokuskan pada permasalahan yang memicu peserta didik berbuat menyelesaikan permasalahan dengan konsep, prinsip dan ilmu pengetahuan yang sesuai.
- 8) *Constructive Investigations*: sebagai titik pusat, proyek harus disesuaikan dengan pengetahuan para peserta didik.
- 9) *Autonomy*: proyek menjadikan aktivitas peserta didik sangat penting.

#### **d. Prinsip Proses Pembelajaran PBL**

Prinsip-prinsip PBL yang harus diperhatikan meliputi konsep dasar, pendefinisian masalah, pembelajaran mandiri, pertukaran pengetahuan dan penialainnya

##### **1) Konsep Dasar (*Basic Concept*)**

Pada pembelajaran ini fasilitator dapat memberikan konsep dasar, petunjuk, referensi, atau *link* dan *skill* yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik lebih cepat mendapatkan 'peta' yang akurat tentang arah dan tujuan pembelajaran. Konsep yang diberikan tidak perlu detail, diutamakan dalam bentuk garis besar saja, sehingga peserta didik dapat mengembangkannya secara mandiri secara mendalam.

##### **2) Pendefinisian Masalah (*Defining the Problem*)**

Dalam langkah ini fasilitator menyampaikan skenario atau permasalahan dan dalam kelompoknya peserta didik melakukan berbagai kegiatan. Pertama, *brainstorming* dengan cara semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kedua, melakukan seleksi untuk memilih pendapat yang lebih fokus. Ketiga, menentukan permasalahan dan melakukan pembagian tugas dalam kelompok untuk mencari referensi penyelesaian dari isu permasalahan yang didapat. Fasilitator memvalidasi pilihan-pilihan yang diambil peserta didik yang akhirnya diharapkan memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang mereka ketahui, apa saja yang mereka tidak ketahui, dan pengetahuan apa saja yang diperlukan untuk menjembatannya.

##### **3) Pembelajaran Mandiri (*Self Learning*)**

Setelah mengetahui tugasnya, masing-masing peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas isu yang sedang diinvestigasi misalnya dari artikel tertulis di perpustakaan, halaman web, atau bahkan pakar dalam bidang yang relevan. Tujuan utama tahap investigasi, yaitu:

(1) agar peserta didik mencari informasi dan mengembangkan pemahaman yang relevan dengan permasalahan yang telah didiskusikan di kelas, dan (2) informasi dikumpulkan untuk dipresentasikan di kelas relevan dan dapat dipahami.

#### 4) **Pertukaran Pengetahuan (*Exchange knowledge*)**

Setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi secara mandiri, pada pertemuan berikutnya peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya dapat dibantu guru untuk mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dari permasalahan kelompok. Langkah selanjutnya presentasi hasil dalam kelas dengan mengakomodasi masukan dari pleno, menentukan kesimpulan akhir, dan dokumentasi akhir. Untuk memastikan setiap peserta didik mengikuti langkah ini maka dilakukan dengan mengikuti petunjuk.

#### 5) **Penilaian (*Assessment*)**

Penilaian dilakukan dengan memadukan tiga aspek pengetahuan (*knowledge*), kecakapan (*skill*), dan sikap (*attitude*). Penilaian terhadap penguasaan pengetahuan yang mencakup seluruh Penilaian terhadap kecakapan dapat diukur dari penguasaan alat bantu pembelajaran, baik *software*, *hardware*, maupun kemampuan perancangan dan pengujian. Sedangkan penilaian terhadap sikap dititikberatkan pada penguasaan *soft skill*, yaitu keaktifan dan partisipasi dalam diskusi, kemampuan bekerjasama dalam tim, dan kehadiran dalam pembelajaran. Bobot penilaian untuk ketiga aspek tersebut ditentukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.

#### 6) **Langkah langkah Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Masalah**

FASE-FASE	PERILAKU GURU
<b>Fase 1</b> Orientasi peserta didik kepada masalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan</li> <li>Memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang dipilih</li> </ul>
<b>Fase 2</b> Mengorganisasikan peserta	Membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang

FASE-FASE	PERILAKU GURU
didik	berhubungan dengan masalah tersebut
<b>Fase 3</b> Membimbing penyelidikan individu dan kelompok	Mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah
<b>Fase 4</b> Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, model dan berbagi tugas dengan teman
<b>Fase 5</b> Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari /meminta kelompok presentasi hasil kerja

Tabel 6. Langkah – langkar pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah

#### D. Aktivitas Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi lebih mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta diklat menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :

1. Aktivitas individu, meliputi :
  - Memahami dan mencermati materi diklat
  - Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar, menyimpulkan
  - Melakukan refleksi
2. Aktivitas kelompok, meliputi :
  - Mendiskusikan materi pelatihan
  - Bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan penyelesaian masalah /kasus
  - Melaksanakan refleksi

#### E. Latihan/ Kasus /Tugas

Buatlah contoh pembelajaran menggunakan salah satu model pembelajaran d atas!

## F. Rangkuman

Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan model belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktifitas secara nyata. langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Proyek sebagai berikut: Penentuan Pertanyaan Mendasar (*Start With the Essential Question*), Mendesain Perencanaan Proyek (*Design a Plan for the Project*), Menyusun Jadwal (*Create a Schedule*), Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek (*Monitor the Students and the Progress of the Project*), Menguji Hasil (*Assess the Outcome*), Mengevaluasi Pengalaman (*Evaluate the Experience*). Penilaian pembelajaran berbasis proyek harus dilakukan secara menyeluruh terhadap sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa selama pembelajaran. Pada penilaian proyek setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan yaitu: Kemampuan pengelolaan, Relevansi dan Keaslian.

Untuk menunjang proses belajar perlu lingkungan memfasilitasi rasa ingin tahu siswa pada tahap eksplorasi. Lingkungan ini dinamakan *Discovery Learning Environment*, yaitu lingkungan dimana siswa dapat melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang belum dikenal atau pengertian yang mirip dengan yang sudah diketahui. Langkah-langkah dalam mengaplikasikan model *discovery learning* di kelas adalah sebagai berikut: *Stimulation* (stimulasi/pemberian rangsangan), *Problem statement* (pernyataan/ identifikasi masalah), *Data collection* (pengumpulan data), *Data processing* (pengolahan data), *Verification* (pembuktian), *Generalization* (menarik kesimpulan/generalisasi). Dalam Model Pembelajaran *Discovery*, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan tes maupun non tes. Penilaian dapat berupa penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap, atau penilaian hasil kerja siswa.

*Problem Based Learning* (PBL) adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapat pengetahuan penting, yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata (*real world*). Prinsip-prinsip PBL yang harus diperhatikan meliputi konsep dasar, pendefinisian masalah, pembelajaran mandiri, pertukaran pengetahuan dan penialainnya.

### G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang anda pahami setelah mempelajari model-model pembelajaran ?
2. Pengalaman penting apa yang anda peroleh setelah mempelajari model-model pembelajaran?
3. Apa manfaat materi model-model pembelajaran terhadap tugas anda ?
4. Apa rencana tindak lanjut anda setelah kegiatan pelatihan ini ?

### H. Kunci Jawaban

#### Model *Project Based Learning*

Kompetensi Dasar	:	1. Menerapkan metode-metode penelitian sosial untuk memahami berbagai gejala sosial 2. Menyusun rancangan, melaksanakan dan menyusun laporan penelitian sederhana serta mengomunikasikannya dalam bentuk tulisan, lisan dan audio-visual
Topik	:	Penelitian sosial sederhana
Tujuan	:	Melalui kerja kelompok siswa melakukan penelitian sosial sederhana tentang fenomena adanya kenakalan remaja yang terdapat di lingkungan sekolah yaitu “perilaku membolos”
Alokasi Waktu	:	6 x 3 x 45 menit ( 1,5 bulan )

TAHAP PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. Penentuan Pertanyaan Mendasar	Siswa disajikan beberapa gambar tentang siswa yang sedang membolos sekolah, kemudian diharapkan timbul rasa ingin tahu yang berkaitan dengan adanya fakta teman di lingkungan sekolah masing-masing yang sering membolos  Siswa mendiskusikan Pertanyaan sebagai permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian, diantaranya sebagai berikut :  1. Berapa jumlah siswa yang membolos dalam 1 bulan terakhir?

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengapa siswa melakukan tindakan membolos sekolah ?</li> <li>3. Bagaimana latar belakang kehidupan siswa yang melakukan tindakan membolos sekolah</li> </ol>
2. Mendesain Perencanaan Proyek	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru membimbing siswa Membuat permasalahan dan latar belakang penelitian</li> <li>2. Guru membimbing siswa dalam mendesain Pengumpulan datayang akan dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data sekunder</li> <li>3. Guru membimbing siswa membuat instrument untuk mengumpulkan data</li> <li>4. Untuk mendapatkan data ditentukan pihak-pihak yang diperlukan informasinya seperti, siswa,teman sejawat, guru kelas, guru BK, orang tua.</li> </ol>
3. Menyusun Jadwal	<p>Guru dan siswa bersama-sama membahas dan menyusun jadwal penelitian yang akan dilakukan, mulai dari kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perancangan</li> <li>2. Pengumpulan data</li> <li>3. Klasifikasi/pengelompokan</li> <li>4. Menganalisis</li> <li>5. Membuat laporan dan presentasi laporan</li> </ol>
4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek	Guru memonitor tugas proyek yang dilakukan siswa secara berkala.dan siswa melaporkan perkembangan penelitian yang dilakukan
5.Menguji Hasil	Peserta didik mengolah data hasil penelitian Dipresentasikan untuk mendapatkan masukan dan saran mengenai struktur dan redaksi serta isi laporan
6.Mengevaluasi Pengalaman	Hasil setelah adanya saran dan masukan dari presentasi dipakai untuk menyempurnakan laporan akhir



## Kegiatan Pembelajaran 5

# METODE *FIELD TRIP* DALAM PEMBELAJARAN SOSIOLOGI

### A. Tujuan

Setelah menyelesaikan Kegiatan Pembelajaran ini, peserta Diklat mampu memahami pelaksanaan pembelajaran sosiologi menggunakan metode Field Trip dengan benar sehingga dapat melaksanakan pembelajaran dengan metode tersebut di waktu-waktu yang selanjutnya secara optimal.

### B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan metode Field Trip sesuai dengan kajian teori pembelajaran
2. Menguraikan Langkah-langkah dalam penyusunan pembelajaran dengan metode tersebut.
3. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan metode tersebut
4. Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi kegiatan siswa dengan metode tersebut

### C. Uraian Materi

#### 1. Pendahuluan

Dalam pembelajaran sosiologi terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan, di antaranya adalah metode *Field Trip*. Pembelajaran dengan metode ini akan memiliki perbedaan hasil yang lebih baik dan lebih melekat pada diri siswa dari pada metode-metode lainnya, karena pengalaman langsung yang mereka rasakan (Nasution, 1997). Namun berbeda dengan pembelajaran yang biasanya dilakukan di dalam kelas, pelaksanaan metode ini mensyaratkan beberapa hal, persiapan yang lebih teknis dan terperinci, pemantauan di lapangan maupun dalam penyusunan laporan kegiatan. Disamping itu hubungan dengan banyak pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut, mensyaratkan beberapa aktivitas, seperti perijinan, kesediaan suatu komunitas untuk dikunjungi, maupun juga yang sangat penting adalah ijin dan persetujuan orang tua siswa, serta bantuan pendanaannya. Menyadari akan kompleksitas dari sejak perencanaan sampai dengan pelaporan kegiatan pembelajaran tersebut, maka akan dikemukakan beberapa hal yang perlu dilakukan.

## **2. Jenis Lokasi Kunjungan Pembelajaran**

Pemilihan lokasi yang akan dikunjungi pada umumnya terdiri dari dua hal, pertama komunitas adat, dan kedua suatu objek atau situs sosial budaya. Sebagai suatu bentuk pembelajaran "perjalanan lapangan" akan mengeluarkan ekstra tenaga, pikiran, waktu, dan juga dana. Maka pemilihan lokasi kunjungan akan mempertimbangkan semua aspek tersebut. Khususnya terhadap waktu dan dana yang tersedia, pemilihan lokasi tersebut harus dipertimbangkan dengan matang. Sekiranya di dekat sekolah (dalam satu kota dengan sekolah) tempat lokasi kunjungan tersebut, maka proses pembelajaran tersebut akan relatif lebih sederhana, dibandingkan dengan lokasi yang lebih jauh (bahkan sampai ke luar pulau) yang harus dilakukan selama beberapa hari.

Pemilihan dan penentuan lokasi kunjungan yang paling ideal jika berada di dalam kota, sehingga para siswa SMA/SMK dapat mempelajari suatu komunitas atau objek sosial budaya tersebut dapat lebih mendalam, karena dilakukan beberapa kali di bawah arahan guru. Namun seringkali pemilihan dan penentuan lokasi kunjungan tersebut menyangkut suatu komunitas atau objek sosial budaya yang jauh lokasinya, karena dimaksudkan juga sebagai rekreasi. Dalam hal ini pilihan waktu harus cerdas, agar kemampuan dan ketrampilan yang diperoleh dari studi lapangan ini bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran sosiologi. Menempatkan kegiatan tersebut di akhir waktu pembelajaran (Kelas XII sesudah mereka melakukan UNAS/ Ujian Akhir Nasional) akan kurang efektif, serta hanya akan lebih dominan nuansa rekreasinya. Pada Kelas XI akan lebih ideal jika dilakukan, karena akumulasi pengetahuan tentang teori dan konsep sosiologi relatif sudah cukup banyak, serta hasil pembelajaran lapangan tersebut akan terus berproses dalam pembelajaran sampai waktu yang selanjutnya.

Tidak kurang penting pula adalah memilih dan menentukan lokasi kunjungan yang lebih dekat dengan sekolah, sehingga lebih sering dapat digunakan para siswa untuk belajar. Permasalahannya tidak semua kota memiliki objek kunjungan yang relatif memenuhi syarat untuk belajar sosiologi dengan lebih baik dan lebih variatif. Jika terdapat lokasi kunjungan yang representatif, maka rencana pembelajaran dan kunjungan lapangan akan dapat dilakukan secara lebih sederhana. Karena pembelajaran dilakukan di luar lingkungan sekolah beberapa syarat dan peraturan harus dijalankan dengan seksama. Untuk jenis lokasi kunjungan dalam pembelajaran sosiologi siswa-siswa SMA/SMK terdapat dua macam, yaitu komunitas adat dan situs sosial budaya.

#### a. Komunitas Desa

Di beberapa pulau di Indonesia terdapat beberapa komunitas adat yang dapat dijangkau untuk keperluan pembelajaran sosiologi dengan metode *field trip*, di antaranya: Tihingan/ Pegringsingan, Panglipuran, Trunyan (Bali), Sade (Lombok-NTB), Tengger (Jawa Timur).

##### 1. Komunitas Adat Tihingan

Sekitar tujuh km arah pegunungan dari Kabupaten Klungkung terletak Desa Tihingan. Apabila berjalan naik dari desa tetangga, melalui sawah-sawah bertingkat ke arah Tihingan, maka Desa Tihingan tidak akan segera nampak karena seluruhnya tertutup oleh pohon-pohon kelapa, sehingga terasa sekonyong-konyong sudah berada di tengah-tengah desa. Walau demikian tidak akan terdapat banyak hal yang bisa dilihat, karena penduduk hidup di belakang dinding-dinding tinggi dari bata dan tanah liat yang mengapit jalan-jalan sempit saling menyilang.

Desa ini memiliki *Pura* (tempat pemujaan cikal bakal desa), *Pura Puseh*, atau *Pura Dalem* (tempat memuja mereka yang telah meninggal dunia), dan terdapat *Pura Bale Agung* yang dimiliki bersama dengan perkampungan di bawahnya.

Walaupun Tihingan disebut sebagai "desa", namun penentuan batas-batas itu dipersulit oleh suatu fakta bahwa: berbeda dengan banyak desa di Pulau Jawa, di Pulau Bali pada umumnya, wilayah perkampungan dan wilayah pertanian masing-masing tidak masuk keseluruhannya ke dalam satu ikatan yang bersifat korporasi atau semi korporasi. Sebaliknya terdapat suatu perbedaan yang tegas antara kesatuan perkampungan atau *banjar*, dengan kesatuan pertanian dan irigasi atau *subak*. Organisasi dan tata kelakuan dari kehidupan sehari-hari terpisah dari organisasi dan tata kelakuan pertanian, meskipun *banjar* dan *subak* itu berdasarkan atas landasan yang sama, namun terpisah satu sama lain dan masing-masing bersifat otonom. Hal itu menyebabkan dikenalnya dua macam adat istiadat: *yang kering untuk banjar*, dan adat istiadat *yang basah untuk subak*.

Meskipun biasanya tanah yang dimiliki oleh warga masyarakat yang tinggal di sesuatu banjar berada di *subak-subak* yang terdekat, namun tidak terdapat suatu hubungan yang mutlak antara *banjar* dan *subak* tersebut. Dipandang dari sudut *banjar*, tanah warganya tersebar di berbagai *subak* yang berbeda. Sedangkan jika dilihat dari sudut *subak*,

tanahnya adalah milik warga yang hidup di berbagai *banjar* yang berlainan. Dengan demikian untuk mendapatkan gambaran tentang konsep desa di Bali orang harus memandangnya dari dua sudut, yaitu dari sudut *banjar* dan sudut *subak*.

Berbeda dengan desa-desa lainnya di Bali, Desa Tihingan hanya terdiri dari satu *banjar*. Sebagai suatu kesatuan sosial yang berdasarkan adat, sebuah *banjar* berpusat pada suatu balai pertemuan yang biasa dikenal sebagai *balebanjar*, tempat semua laki-laki yang menjadi Kepala Rumah Tangga mengadakan pertemuan setiap 35 hari sekali (sekali sebulan dalam kalender Bali). Pertemuan ini hukumnya wajib, dan akan mendapatkan sanksi bagi mereka yang tidak menghadirinya tanpa sebab yang jelas. Sebuah *banjar* dipimpin oleh para *klian banjar* (orang-orang tua dari *banjar*) yang berjumlah lima orang dan dipilih atas persetujuan bersama untuk masa bakti lima tahun. Sesudahnya mereka tidak dapat dipilih kembali. Berbagai hak, kewajiban dan pantangan-pantangan dari kekuasaan *banjar* ditentukan dalam suatu peraturan tertulis (*awigawig banjar*) yang terdapat dalam naskah-naskah daun lontar. Sebagai suatu pranata sosial, pemerintahan *banjar* adalah suatu kesatuan hukum adat (Hadi. N., 2012).

#### STRATIFIKASI SOSIAL

Para anggota *banjar* terbagi ke dalam dua macam sistem gelar yang tidak saling berhubungan. Sistem pertama, adalah sistem *teknonimi* yang dipakai secara luas di seluruh Bali. Seseorang yang tidak memiliki anak akan dipanggil namanya saja (kecuali oleh kaum kerabatnya yang dekat), dengan didahului oleh gelar yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin dan susunan urutan kelahiran. Seorang laki-laki yang memiliki anak umunya dipanggil "Ayah Si....", atau "Ibu Si...." (anak yang sulung). Apabila sudah memiliki cucu, maka mereka berubah sebutan menjadi "Kakek Si....", atau "Nenek Si...." (cucu yang sulung). Dan serupa itu pula bagi tingkat buyut, dan seterusnya.

Sistem *teknonimi* ini memiliki dua arti yang penting dalam klasifikasi simbolis dari warga *banjar*: 1) menekankan adanya konsepsi suami-isteri sebagai dwi-tunggal (karena mereka dipanggil secara bersama sebagai "Ayah Si..." dan "Ibu Si..." dari anak yang sama). Hal ini menunjukkan fakta bahwa suami-isteri adalah pasangan yang tak dapat dipisah-pisahkan dalam berbagai urusan sosial, tidak hanya mengenai kewargaan *banjar*, namun juga dalam berbagai perkumpulan tempat-tempat pemujaan, hubungan-hubungan kekerabatan, dan keanggotaan dalam berbagai kelompok kebutuhan. 2) Sistem tersebut menyebabkan lahirnya penggolongan menurut umur yang luas. Golongan para

"Ayah Si..." memegang pimpinan dalam aktivitas-aktivitas kemasyarakatan. Golongan para "Kakek Si..." adalah kaum tua yang terpandang, tetapi yang hanya berfungsi sebagai penasehat yang tidak aktif. Sedangkan golongan para "Buyut Si..." adalah kaum tua yang sudah pikun. Seorang laki-laki atau wanita yang tidak pernah mendapat anak, dalam sistem sebutan seolah-olah tetap tinggal sebagai anak, dan rasa malu untuk keadaan serupa itu dialami dalam hati nurani yang paling dalam, sehingga sistem *teknonimi* itu memperkuat keinginan orang Bali untuk memiliki banyak anak).

Sistem gelar kedua yang menyusun penduduk desa menurut kedudukan-kedudukan berlapis adalah sistem *kasta*. Dilihat dari segi nama, nampaknya istilah tersebut berasal dari tradisi Hindu di India, namun secara sosiologis terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Fungsi sistem *kasta* di Indonesia pada umumnya dan di Bali pada khususnya bukanlah kelompok-kelompok karya atau jabatan, bukan merupakan badan-badan hukum yang melintasi batas-batas desa, tidak terikat oleh suatu hubungan pengabdian dari anak buah terhadap pelindungnya, dan tidak mengandung adat tata kelakuan tentang segala aspek hubungan antar individu. *Kasta* di Tihingan, bukanlah suatu pranata utama dari masyarakat, namun hanya salah satu diantara aneka warna besar dari pranata-pranata sosial yang saling berpadu dan membagi perhatian dari warga desa..

Di Tihingan, tiap orang memiliki gelar yang menunjukkan wangsanya dan yang diwarisi dari ayahnya. Terdapat dua gelar serupa itu, yaitu *triwangsa* dan gelar *jaba*. Gelar *triwangsa* dianggap milik orang-orang yang termasuk salah satu dari ketiga *kasta* tertinggi, atau *warna* dalam konsepsi adat Hindu: Brahmana, Ksatria dan Weisa. Adapun gelar-gelar *jaba* dianggap milik dari orang dari warna keempat, ialah *kasta* Sudra (*jaba* berarti luar, namun hal ini tidak ada hubungannya dengan konsep "luar *kasta*" atau "orang tanpa *kasta*", karena hal semacam itu tidak ada di Bali).

Gelar *wangsa* hanya berfungsi untuk memberi suatu kedudukan sosial dan gengsi berdasarkan keturunan kepada seseorang, lepas dari alasan-alasan politik, ekonomi atau kesusilaan, sungguhpun hal ini tentulah mempengaruhinya. Pada tingkatan di atas desa, gelar *triwangsa* sangat mempengaruhi seseorang mendapatkan suatu pekerjaan atau jabatan. Namun secara umum *triwangsa* itu hanya menyangkut gengsi. Pada kenyataan banyak mereka yang berasal dari *triwangsa* hidup miskin dan sebagai pembantu dari mereka orang-orang *jaba* yang memiliki lahan pertanian yang luas dan subur. Di Tihingan sistem *kasta* ini memiliki pengaruh yang besar tapi tidak menentukan.

Masalah gengsi berkaitan dengan sistem *kasta* ini misalnya menyangkut adat berbicara, posisi duduk, posisi berjalan, berbicara, gerak gerik yang ditahan dan sopan, orang dari golongan rendah dengan mudah dapat makan makanan dari mereka dari golongan yang lebih tinggi, dan tidak sebaliknya. Kecuali itu terdapat banyak pantangan terhadap kepemilikan barang atau bentuk bangunan yang boleh dimiliki oleh golongan rendah.

#### SISTEM KEKERABATAN

Sistem kekerabatan orang Tihingan dan orang Bali pada umumnya bersifat *patrilineal* dan adat menetap sesudah menikah adalah *patrilokal*. Sistem istilah-istilah kekerabatan menunjukkan istilah-istilah yang secara rapi mencakup kaum kerabat menurut angkatan-angkatan, dan tempat tinggal didiami kadang-kadang oleh keluarga luas yang *patrilokal*, atau oleh keluarga-keluarga *batih*, dengan para kaum kerabat yang menumpang. Di samping kesatuan-kesatuan rumah tangga tersebut, terdapat pula kelompok-kelompok kekerabatan besar yang bersifat *patrilineal* yang disebut *dadia*.

#### KESATUAN PERTANIAN

Tiap-tiap daerah yang menempati jalur yang penting di Bali, yang terbujur menurut bentuk gunung ke arah laut, dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi yang bulat. Kesatuan ini, yang berupa suatu daerah yang memanjang, terpusat pada sebuah sungai induk yang disebut *sedahan*. Sebutan ini adalah untuk seorang pegawai pajak tanah, yang sekarang merupakan seorang pegawai pemerintah pusat. Tiap-tiap daerah *sedahan* yang dahulu dikuasai oleh kerajaan kecil, tetapi sekarang oleh pemerintah kabupaten, mempunyai seorang pejabat bernama *Sedahan Agung*, yaitu Kepala Dinas Pajak Tanah. Tiap *sedahan* terdiri dari banyak sekali *subak*, dan kesatuan-kesatuan inilah yang merupakan unsur-unsur pokok dalam sistem pertanian orang Bali karena peranannya yang terpenting adalah mengatur irigasi sawah-sawah. Sesungguhnya *subak* itu lebih dari hanya suatu badan pengatur air sawah saja, karena *subak* juga merupakan suatu badan hukum adat yang otonom, suatu badan perencanaan aktifitas pertanian dan suatu kelompok keagamaan. Kecuali penggarapan pekarangan, boleh dikata semua hal yang berhubungan dengan pertanian menjadi tanggung jawab *subak*. *Subak* Bukan hanya seksi-seksi dari *sedahan*, yang hampir tidak lain adalah wilayah-wilayah pajak, namun *subak* adalah sumber-sumber aktifitas pertanian dan memiliki usia yang sudah sangat tua. Berbeda dengan teori *hydraulic despotism*, pengaturan irigasi di Bali merupakan suatu urusan lokal yang amat demokratis. Suatu *subak* berdasarkan atas suatu bendungan, sehingga ***satu bendungan adalah satu subak*** dengan segala konsekuensi

sosiologis dan antropologis yang menyertainya seperti halnya pada keberadaan suatu *banjar*.

**TUGAS:**

- (1) Sebutkan hak, kekuasaan dan kewajiban-kewajiban suatu *banjar*?
- (2) Bagaimana proses kewargaan *banjar*, serta bagaimana hubungan antara otoritas laki-laki dan perempuan dalam *banjar*?
- (3) Masalah-masalah apa saja yang diurus oleh *banjar*? serta bagaimana hubungan antara *banjar* dan masalah perebutan hegemoni desa?
- (4) Bagaimana hubungan antara *banjar* dengan *perbeke*?
- (5) Apa akibat sistem *kasta* terhadap sistem perkawinan untuk *kasta* rendah (*jaba*)?, serta apa beda antara perkawinan *endogami* dengan *hipergami* di Tihingan?
- (6) Bagaimana persaingan yang timbul antara *triwangsa* dan golongan *jaba* di Tihingan?
- (7) Apa yang disebut *dadia*? kemukakan sejumlah *dadia* di Tihingan? serta bagaimana kekuasaan politik dari keempat *dadia* tersebut?
- (8) Apa perbedaan antara *dadia* dengan golongan-golongan segelar yang lain?
- (9) Bagaimana hubungan antara *dadia* dengan kehidupan para seniman?
- (10) Apa yang diketahui tentang *seka*? serta bagaimana hubungannya dengan kesatuan dan kegiatan sosial lain di Tihingan?
- (11) Coba cari data apa yang dimaksud dengan *subak*, serta kaitannya dengan berbagai aktifitas pertanian lainnya?
- (12) Coba bandingkan antara *subak* dengan *banjar*?
- (13) Bagaimana sistem pembagian hasil pertanian di Tihingan?

**2. Komunitas Adat Panglipuran**

Komunitas adat Desa Penglipuran berlokasi pada kabupaten Bangli yang berjarak 45 km dari kota Denpasar, Desa adat yang juga menjadi objek wisata ini sangat mudah dilalui. Karena letaknya yang berada di Jalan Utama Kintamani – Bangli. Desa Penglipuran ini juga tampak begitu asri, keasrian ini dapat kita rasakan begitu memasuki kawasan Desa. Pada areal Catus pata yang merupakan area batas memasuki Desa Adat Penglipuran, disana terdapat Balai Desa, fasilitas masyarakat dan ruang terbuka untuk pertamanan yang merupakan areal selamat datang.

Desa ini merupakan salah satu kawasan pedesaan di Bali yang memiliki tatanan yang teratur dari struktur desa tradisional, perpaduan tatanan tradisional dengan banyak ruang terbuka pertamanan yang asri

membuat desa ini membuat kita merasakan nuansa Bali pada dahulu kala. Penataan fisik dan struktur desa tersebut tidak lepas dari budaya yang dipegang teguh oleh masyarakat Adat Penglipuran dan budaya masyarakatnya juga sudah berlaku turun temurun (Hadi. N., 2012).

Keunggulan dari desa adat penglipuran ini dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Bali adalah, Bagian depan rumah serupa dan seragam dari ujung utama desa sampai bagian hilir desa. Desa tersusun sedemikian rapinya yang mana daerah utamanya terletak lebih tinggi dan semakin menurun sampai kedaerah hilir. Selain bentuk depan yang sama, adanya juga keseragaman bentuk dari bahan untuk membuat rumah tersebut. Seperti bahan tanah untuk tembok dan untuk bagian atap terbuat dari penyengker dan bambu untuk bangunan diseluruh desa.

Karena Desa Penglipuran terletak didataran yang agak tinggi, suasana terasa cukup sejuk. Selain suasana pertamanan yang asri tetapi juga sangat ramahnya penduduk desa terhadap tamu yang datang. Banyak wisatawan yang datang dapat menikmati suasana desa dan masuk kerumah mereka untuk melihat kerajinan – kerajinan yang penduduk desa buat. Sehingga untuk tinggal berlama lama disini sangatlah menyenangkan.

Desa Adat Penglipuran ini termasuk desa yang banyak melakukan acara ritual, sehingga banyak sekali acara yang diadakan didesa ini seperti pemasangan dan penurunan odalan, Galungan dll. Memang Saat yang sangat tepat untuk datang kedesa ini adalah pada acara tersebut berlangsung, sehingga kita dapat melihat langsung keunikan dan kekhasan dari desa penglipuran ini. Walaupun anda tidak sempat datang pada saat acara tersebut diatas, anda dapat menikmati suasana desa pada sore hari. Karena pada saat sore umumnya penduduk desa keluar rumah setelah selesai melakukan aktifitas rutin mereka dipagi dan siang hari, merek keluar untuk berkumpul bersama sama penduduk desa yang lain dan para pria pada saat sore hari mengeluarkan ayam jago kesayangan mereka dan tidak jarang mereka melakukan tajen/adu ayam tetapi tanpa pisau dikaknya. Sambil menunggu datangnya senja anda dapat menikmati Bubur Ayam diwarung Pak Made yang sangat bersih dan murah meriah dan berbauur bersama penduduk desa adat penglipuran merupakan pengalaman yang tidak akan saya lupakan.



Unik. Itulah satu kata yang dapat menggambarkan Desa Penglipuran, Bangli. Bangunan khas Bali berjajar sepanjang lebih dari 500 meter. Jalanan desa yang sempit dan berundak-undak dilengkapi pintu gerbang yang tampak seragam. Tidak satu pun kendaraan bermotor boleh melintas di sini.

Desa adat Penglipuran merupakan salah satu dari sekian desa tradisional Bali yang sampai saat ini masih tetap dijaga keutuhannya. Nama penglipuran sendiri memiliki dua definisi. Pertama, penglipuran berasal dari kata penglipur yang berarti penghibur. Definisi lainnya menyebutkan penglipuran berasal dari kata pengling dan pura yang berarti ingat pada tanah leluhur. Keseragaman pintu gerbang yang biasa disebut *angkul-angkul* itu memiliki daya tarik tersendiri. Tradisi keseragaman ini adalah simbol kebersamaan yang sudah ditanamkan sejak lama oleh nenek moyang masyarakat Penglipuran. Dalam tatanan bentuk dan letak rumah di masing-masing keluarga, masyarakat Penglipuran masih menaatinya. Menurut tata ruang yang sebenarnya, rumah tradisional Bali terdiri dari tiga bagian utama. "Bangunan rumah umumnya sama seperti daerah lainnya, tetap menggunakan *asta kosala kosali*, ada tempat suci di bagian utara, kemudian dapur, lalu ada *bale dangin* dan *bale dauh* atau *logi*," ucap I Wayan Supat, Kepala Desa Adat Penglipuran.

Pola hidup masyarakat Penglipuran masih memegang teguh kearifan lokal yang diwariskan leluhur mereka. Sebuah rumah contoh terdapat di sisi kanan pintu masuk Penglipuran. Rumah inilah yang menjadi acuan tatanan rumah kuno Penglipuran yang masih terjaga sampai saat ini. Keunikan lainnya terlihat pada tatanan *palemahan* desa. *Palemahan* desa yang teratur dengan tempat suci pada hulu desa dan berada pada daerah yang lebih tinggi sesuai dengan manfaatnya untuk ketuhanan. Sedangkan pada bagian yang lebih rendah, berdiri sekitar 76 bangunan yang masih memiliki arsitektur yang sama dengan keunikan *pintu angkul-angkul* yang berbentuk sama di sisi barat dan timur. Pada bagian hilir terdapat satu kavling tanah kosong yang disebut *karang madu*. Tempat ini akan digunakan jika nantinya ada orang Penglipuran yang melakukan poligami. Kearifan inilah yang diajarkan oleh nenek moyang mereka untuk menghormati perempuan. Sistem pemakaman jenazah di Penglipuran pun tidak seperti Bali pada umumnya. Jika laki-laki yang meninggal dunia, saat pemakaman jenazahnya akan

dikuburkan dalam posisi telungkup atau menghadap tanah. Sebaliknya jika seorang wanita yang meninggal dunia, jenazahnya akan dikuburkan dengan posisi tengadah atau menghadap langit. Tradisi ini sesuai dengan makna seorang laki-laki yang dilambangkan sebagai akasa (langit) dan wanita sebagai pertiwi (Bumi).

**TUGAS:**

- (1) Sebutkan hak, kekuasaan dan kewajiban-kewajiban masing-masing kelompok di Penglipuran?
- (2) Bagaimana tradisi perkawinan berlangsung? Bagaimana pula tradisi menetap sesudah menikah? Bagaimana jika ada warga masyarakat yang melakukan pernikahan poligami?
- (3) Golongan-golongan apa saja yang ada? Serta bagaimana hubungan/komunikasi dan interaksi di antara golongan-golongan tersebut?
- (4) Di tengah situasi yang terlihat homogen (bentuk rumah, jalan dan fungsi bangunan) hal-hal apa saja yang unik di tengah komunitas?
- (5) Bagaimana bentuk persaingan yang timbul?
- (6) Bagaimana sistem penguburan yang dilakukan masyarakat?
- (7) Bagaimana sistem pertanian yang berlangsung?

**3. Komunitas Adat Trunyan**

Komunitas adat Desa Trunyan memiliki religi yang unik. Berbeda pada masyarakat Bali pada umumnya yang menyembah Dewa dalam bentuk Trumurti, pemujaan komunitas ini bermuara pada pemujaan Dewa tertinggi Ratu Sakti Pancering Jagat dan Ratu Ayu Dalam Dasar. Religi mereka tidak terkait dengan Dewa-Dewa dalam agama Hindu yang disebut Trimurti. Berbagai pimpinan agama Hindu Bali telah mencoba meng"Hindu"kan mereka. Komunitas Trunyan akan selalu mengikuti segala yang diperintahkan oleh para pemimpin agama tersebut. Demikian juga para pemimpin agama Hindu itu akan selalu merasa sudah berhasil meng"Hindu"kan orang-orang Trunyan. Di samping itu Pura Ratu Sakti Pancering Jagat dianggap sebagai salah satu pura tua, sehingga setiap waktu akan menjadi tempat umat Hindu Bali dari berbagai tempat melakukan pemujaan.

Namun demikian, jika dilihat dari pemujaan dan sikap hidup mereka berhadapan dengan ajaran Hindu terdapat beberapa perbedaan, bahkan pertentangan. Jika dilihat dari sikap hidup mereka menghadapi

para pemimpin Hindu Bali mereka akan selalu menunjukkan sikap “kepatuhan” mereka untuk melakukan perintah-perintah keagamaan berdasarkan ajaran Hindu. Namun selepas para pemimpin tersebut meninggalkan Terunyan, mereka akan kembali pada tradisi dan keyakinan mereka. Bahkan pada saat umat Hindu di seantero Bali melakukan upacara Nyepi, yang dilakukan dengan tapa brata, dengan tidak menghidupkan api (masak), berbicara dan bekerja, komunitas Terunyan pada saat yang sama justru melakukan ritual besar dengan melakukan pujaan bakti di pura Desa Terunyan dan di Sema Wayah (tempat pemakaman dengan system Mepasah), menyembelih lembu, serta berjudi dengan sabung ayam selama sehari-hari.

Keunikan religi Terunyan ini tidak bisa dilepaskan dengan situasi ekologis gunung Batur dan danau batur. Keberadaan dua bentuk ekologis tersebut memunculkan system religi berupa pemujaan terhadap Dewa gunung yang dilakukan bersama-sama dengan komunitas desa-desa lereng gunung Batur di sekitar danau batur, yang disebut sebagai desa-desa Bintang Danu. Sedangkan secara khusus komunitas Terunyan menyertainya dengan pemujaan terhadap penguasa Danau Batur, yaitu Ratu Ayu Dalam Dasar. Adapun Dewa-Dewa dalam Trimurti: Brahma, Wisnu, Siwa, oleh orang-orang Terunyan ditempatkan sebagai “anak-anak” dari pasangan sesembahan utama mereka: Ratu Sakti Pancering Jagat dan Ratu Ayu Dalam Dasar.

Lain dari itu, yang juga sangat menonjol jika berbicara tentang Religi Terunyan adalah keberadaan pemakaman Sema Wayah. Di Bali terdapat tiga komunitas Desa Adat yang melakukan model pemakaman yang berbeda dengan masyarakat Hindu Bali pada umumnya. Ketiga komunitas Desa Adat tersebut adalah: Tnganan-Pegringsingan, Panglipuran, dan Terunyan. Khusus untuk komunitas Desa Adat Terunyan, di samping terdapat tempat pemakaman umum dengan menanam jasad di dalam bumi untuk mereka yang meninggal dengan cara yang tidak dikehendaki (*mati salah*), atau meninggal ketika masih bayi, terdapat tempat pemakaman dengan model pemakaman *Mepasah*.

Model Pemakaman *Mepasah* inilah beserta dengan pemujaan di seputar kehidupan mitologis suami istri Ratu Sakti Pancering Jagat dan Ratu Ayu Dalam Dasar, yang dianggap sebagai leluhur atau nenek moyang komunitas Terunyan yang akan menjadi pusat kajian tentang

Religi komunitas Terunyan dalam tulisan ini. Bagaimana system keyakinan mereka, bagaimana, system symbol dan peralatan mereka, serta bagaimana upacara dan cahaya Ketuhanan yang muncul dalam berbagai prosesi upacara mereka akan menjadi muatan utama dari komunitas Terunyan di lereng Gunung Batur dan danau Batur (Hadi. N., 2013).

#### **TUGAS:**

- (1) Bagaimana pembagian wilayah Desa Trunyan?
- (2) Terdapat kelompok-kelompok apa saja di Trunyan?
- (3) Sebutkan hak, kekuasaan dan kewajiban-kewajiban masing-masing/kelompok tersebut?
- (4) Bagaimana tradisi perkawinan berlangsung? Bagaimana pula tradisi menetap sesudah menikah?
- (5) Golongan-golongan apa saja yang ada? Serta bagaimana hubungan/komunikasi dan interaksi di antara golongan-golongan tersebut?
- (6) Bagaimana sesungguhnya religi komunitas Terunyan?
- (7) Apa yang terdapat secara eksistensial dalam perayaan *Purnama Kapat*?
- (8) Hal-hal penting apa menyangkut tabu dan pantangan di Trunyan?
- (9) Bagaimana eksistensi dari model pemakaman *exposure* di Trunyan?
- (10) Bagaimana sistem pertanian yang berlangsung?

#### **4. Komunitas Adat Sade**

Secara historis Desa Sade didirikan Tahun 1076, yang juga terkait dengan masjid kuno Rambitan.

Desa yang memiliki luas 6 hektar dan berpenduduk 700 jiwa ini dikenal sebagai perkampungan suku sasak yang masih memegang tradisi budayanya.

Sesuatu yang khas dari desa ini: Secara kultural terdapat aliran PUJUT dengan pusat pemujaan gunung PUJUT, sumber budaya dari batu dinding KIANYAN.

Masyarakat mengembangkan sistem perkawinan UNDAGAMI (Kawin Keturunan) dan system perkawinan REMPUNG PUNTIK. Adapun system pemujaan masyarakat berupa kepercayaan terhadap TOAK LAUK (Pemujaan terhadap arwah nenek moyang), mirip pemujaan orang Bayan dengan WEKTU TELU. Tradisi mereka juga disebut sebagai MULI MUNTUH (Pemulihan jati diri manusia). Muli: suci murni

muntuh:mengandungtigaarti: (1)menjaga eksistensi manusia dengan akal pikirannya (2) menjaga jatidiri manusia 3.menjaga budi pekerti yang baik. Tradisi upacara mereka menggunakan siklus bulan (mulimunti) dan juga perputaran hari (senin-minggu)

*Di Dusun Adat Sade, yang termasuk wilayah Desa Rambitan, Kecamatan Pujut ini masyarakat masih mempertahankan arsitektur rumah adat menurut kosmologi gunung Rinjani, merawat kesenian Gendang Belek, dan meneruskan tradisi menenun kain warisan nenek moyang. Warga dusun pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, pengrajin kain tenun ikat, penganut agama Islam (Wetu Telu), yang masih hidup dalam tradisi budaya mereka dan teraktualisasi dalam konsep bangunan rumah, dan praktek Shalat Tiga Waktu.*

*Jumlah bangunan rumah dipertahankan tetap seperti semula yang terdiri dari 152 rumah, tidak boleh ada penambahan. Saat memasuki desa ini pandangan kita pertama-tama akan tertuju pada bentuk bangunan rumah yang unik bernuansa tradisional.*

Rumah-rumah tersebut milik penduduk asli Dusun sade yang memang telah menetap secara turun temurun. Rumah-rumah ini oleh masyarakat lokal biasa disebut bale. Pola dan bentuk bangunan rumah adalah sama dan seragam. Ukuran rumah 7 x 5 meter. Yang unik dari rumah-rumah tersebut adalah: dibangun dengan menggunakan bahan-bahan alami. Dinding rumah terbuat dari bambu dan atapnya dari rumbia. Seluruh rumah di dusun ini menghadap gunung rinjani, gunung tertinggi di pulau lombok (3.676 m). Arah hadap rumah ke gunung ini berdasarkan kepercayaan gunung rinjani dianggap sebagai tempat bersemayam roh-roh leluhur. Nampak betapa mereka berinteraksi dengan kehidupan dan lingkungan kosmologinya melalui medium rumah adat.

Rumah adat sade unik: keadaan rumah gelap tanpa jendela. Pintunya hanya satu, yaitu pintu muka tempat masuk dan keluar. Bagi orang sasak hal ini memiliki filosofi: hidup manusia itu harus memiliki aturan tunggal, ada yang dijaga dan tidak boleh dilanggar. Pintu rumah di sade dan di kampung tradisional sasak lainnya rata-rata dibuat rendah, setinggi dada orang dewasa, sehingga untuk memasukinya harus menunduk. Hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap tuan rumah. Sebuah rumah adat sade terdiri dari bale dalam dan bale luar.

Bale dalam: ruang privat yang dilengkapi tempat tidur dan dapur beserta perlengkapan untuk masak. Bale luar: ruang tamu namun tidak menyediakan kursi tamu, dengan pintu bergeser antara bale dalam dan bale luar dihubungkan dengan anak tangga. Masyarakat sade memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi: hal ini dapat dilihat dari jumlah anak tangga: pada masa lalu tangga penghubung ini berjumlah tiga, sesuai dengan kepercayaan nenek moyang mereka tentang wetu telu, dimana hidup manusia termaknai dalam 3 tahapan: lahir, berkembang, dan mati. Pada saat pengaruh Islam masuk, wetu telu juga sering dimaknai sebagai waktu shalat yang hanya 3 hari sekali. Inilah yang sering dikemukakan sebagai Islam wetu telu, yakni ajaran Islam yang telah berasimilasi dengan keyakinan Hindu dan Animisme. Namun saat ini ketika pemahaman Islam sudah terbuka, dua anak tangga ditambahkan, guna menambah simbol jumlah waktu shalat yang kurang. Namun untuk menghargai tradisi dan adat, anak tangga keempat dan kelima tidak serta merta ditambahkan selepas anak tangga ketiga, melainkan setelah diberi lantai kecil.

Lantai rumah berupa campuran antara tanah, getah pohon, dan abu jerami yang sudah diolesi kotoran kerbau. Bau kotoran tidak ada sebab sudah mengering. Penggunaan kotoran kerbau untuk menghindari kelembaban tanah.

Selain rumah adat, di sade juga terdapat lumbung padi dan kandang/bare ternak. Bentuk lumbung padi ini menginspirasi dan menjadi simbol bangunan tradisional Lombok. Hampir seluruh bangunan dan gedung-gedung pemerintah, atap depannya selalu dibentuk menyerupai lumbung padi ini. Selain itu terdapat bangunan khas: *berugak*, bangunan panggung yang disangga empat tiang (*berugak sekepet*) atau enam tiang (*berugak sekenem*), yang bentuknya tanpa dinding. Keunikan lain dusun sade: kerajinan tenun ikat, dengan wanita desa sebagai pelaku utama. Alat yang digunakan sederhana dan masih tradisional, sehingga hasilnya sangat indah. Motif yang dihasilkan: gambar rumah, binatang dan manusia serta gambar abstrak. Selain itu juga terdapat souvenir lain seperti gantungan kunci, kalung dan gelang. Rata-rata binatang yang dijadikan motif adalah cecak, yang diyakini sebagai simbol keberuntungan (Hadi. N., 2012).

### TUGAS:

- (1) identifikasi semua keunikan yang terdapat di dusun sade: bangunan rumah, kerajinan, mata pencaharian, sistem religi, dan budaya mereka pada umumnya.
- (2) Apa hubungan antara Desa adat Sade dengan mesjid Rambitan?
- (3) Terdapat kelompok-kelompok apa saja di Sade?
- (4) Sebutkan hak, kekuasaan dan kewajiban-kewajiban masing-masing/kelompok tersebut?
- (5) Apa arti filosofi dari rumah adat di Sade
- (6) Bagaimana tradisi perkawinan berlangsung? Bagaimana pula tradisi menetap sesudah menikah?
- (7) Bagaimana tradisi pemujaan komunitas Sade?
- (8) Bagaimana kehidupan ekonomi masyarakatnya? Apa arti menenun pada wanita sade?
- (9) Bagaimana kehidupan pariwisatanya?
- (10) Bagaimana sistem pertanian yang berlangsung?

### 5. *Komunitas Adat Sembalun*

Komjunitas Adaat Sembalun berada di Lombok Timur. Aktifitas yang paling menonjol untuk Desa adat Sembalun berkaitan dengan dunia kepariwisataan. Pariwisata tidak hanya menampilkan sajian alam yang indah guna disajikan sebagai obyek wisata dalam suatu destinasi pariwisata yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Namun mengangkat atraksi budaya dan melestarikan kearifan lokal juga menjadi daya magis tersendiri bagi tumbuh dan berkembangnya pariwisata. Di sini pengembangan pariwisata di daerah yang terkenal dengan keindahan alam Gunung Rinjani dan hasil pertaniannya juga tidak melepaskan tradisi budaya dan kearifan lokalnya. Sebutlah misalnya, dengan semakin dihidupkannya kembali profil dan performa **Bale** Adat atau rumah adat Sembalun.

Keterangan yang dihimpun dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Timur menyebutkan, pembangunan **bale** adat ini sudah dilakukan beberapa tahun terakhir. "Sekarang dibangun tujuh unit **bale** adat dan tujuh lumbung, bersamaan dengan penembokan keliling di lapangan Sembalun Bumbung," kata Gufran, Kadisbudpar Lombok

Timur. Pembangunan **bale** adat tersebut merupakan rangkaian pengembangan yang ada di Lawang dan lokasinya berada di tempat acara ngayu-ayu di Sembalun Bumbung.

Program pembangunan ini dimaksudkan untuk peningkatan pemukiman yang mengandung nilai budaya. Pemerintah daerah Lotim, penataan kawasan juga dilakukan di Sajang dan Bilukpetung. Dimana, potensi wisata budaya di Sajang dan Bilukpetung. Pembangunan **bale** adat ini didasari dengan adanya nilai sejarah yang lahir di Sembalun. Sembalun dikenal awalnya dihuni oleh tujuh orang tokoh Sembalun yang berpindah dari Sembalun Lawang ke Sembalun Bumbung. Bangunan **bale** adat nantinya akan dikelola secara kolektif terkoordinasi dan akan diserahkan ke daerah. Keputusan kepada siapa yang akan diserahkan pengelolaannya, mekanismenya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah. Kemungkinan besar akan diserahkan ke komunitas adat di Sembalun.

Demikian juga untuk mendukung ekonomi masyarakat sehari-hari terutama dalam hal bertransaksi menjual hasil bumi dan kebutuhan pokok lainnya, Pemkab Lombok Timur juga sudah membangun pasar tradisonal yang diremajakan. Pasar tradisonal dengan aktivitas masyarakat pedesaan yang serba tradisonal dalam melakukan proses jual beli sehari-harinya di pasar. Pasar tradisonal juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, mengingat transaksi jual beli tradisonal di Lombok juga tak pernah dijumpai di negaranya yang serba modern (Hadi.N, 2014).

#### **TUGAS:**

- (1) Bagaimana pembagian wilayah Desa Sembalun?
- (2) Apa sesungguhnya yang terdapat pada bangunan *Bale*?
- (3) Bagaimanaa keadaan dan susunan kemasyarakatan di Sembalun?
- (4) Sebutkan hak, kekuasaan dan kewajiban-kewajiban masing-masing/ kelompok tersebut?
- (5) Bagaimana tradisi perkawinan berlangsung? Bagaimana pula tradisi menetap sesudah menikah?
- (6) Bagaimana kehidupan kepariwisataan di Sembalun?
- (7) Bagaimana sistem pertanian yang berlangsung?



## 6. Komunitas Adat Tengger

Komunitas adat Tengger berada di empat kabupaten di Jawa Timur: Malang, Pasuruan, Lumajang, dan Probolinggo. Komunitas ini untuk waktu yang panjang telah mengembangkan suatu religi yang unik, terkait dengan pemujaan Dewa gunung dan berhubungan dengan pemujaan arwah leluhur, yang mereka namai *Budo*. Kini mereka telah memeluk beberapa agama (Islam, Hindhu, Budha dan Kristen), di samping juga masih mempercayai agama asli mereka *Budo*. Hal menarik bahwa mereka semua masih mengamalkan berbagai ritual tradisional, seperti *Entas-Entas*, *Unan-Unan*, *Wologoro*, serta berbagai ritual bulanan seperti *Kasa*, *Karo*, *Kapat*, *Kapitu*, *Kasodo*, dan lain-lain.

Masyarakat Tengger memiliki beberapa tradisi budaya, di antaranya *Panca Sradha*, meliputi: (1) percaya adanya Hyang Widi Maha Agung, Pangeran Agung (2) percaya adanya Petra (para pitara/para atman), (3) percaya adanya walat (Karmapala), (4) percaya adanya nitis (reinkarnasi), dan (5) percaya adanya entas atau kalepasan (moksa). Dalam menjalankan adat istiadatnya selalu terikat oleh perasaan kebersamaan. Sampai kini mereka masih memegang tradisi dan nilai-nilai hakiki yang luhur, sebagai warisan nenek moyang yang dapat dirunut dari masa Majapahit (Hefner, 1990).

Ciri budaya lain yang masih diamalkan komunitas Tengger adalah etika atau tata krama yang memerintahkan agar manusia tidak melakukan perbuatan buruk (**Ma-Lima**), yang terdiri dari: (1) *maling* (mencuri) yang merupakan perbuatan tercela, (2) *main* (berjudi), (3) *madat* (minum candu) yang berakibat rusaknya jasmani dan rohani, (4) *minum* (minuman keras yang memabukkan), dan (5) *madon* (melakukan zinah). Ajaran ini nampaknya umum diamalkan oleh berbagai komunitas di Indonesia, termasuk Tengger. Namun untuk masyarakat Tengger juga dikenal tata krama dan nilai-nilai yang dianggap sangat luhur (**Wa-Lima**) dan harus diwujudkan dalam hidup, terdiri dari: (1) *waras*, artinya sehat jasmani dan rohani, (2) *wareg*, artinya cukup makan, (3) *wastra*, artinya pakaian. Bagi masyarakat Tengger pakaian merupakan barang yang amat berharga. Kaum laki-laki biasanya menggunakan sarung, sedangkan wanita berupa kain (*jarit*), (4) *wasis*, artinya cakap atau pandai, dan (5) *wismo*, artinya rumah tempat tinggal (Ismain dan Hadi. N, 2003)

Di samping itu terdapat ajaran Dharma untuk kehidupan (*pepalihe tiang gesang*) yang meliputi: (1)*ajrih dateng luput* (takut terhadap dosa) (2)*senajan bener nanging kudu bener* (Benar sesuai dengan hati nurani) (3)*kudu sempurno ing budhi*(Sempurna dalam berbuat/bekerja) (4)*kedah tepo marang sepodo padan* (saling menghormati antar sesama) (5)*kedah welas marang sepadaning urip* (Harus mengasihi sesama makhluk hidup) (6)*oyo nilik barang sing dhuwur mestine* (jangan mengambil barang yang bukan haknya) (7)*ajrih dateng hukum* (takut terhadap hukum, baik hukum karma maupun hukum alam) (Hadi. N. 2015).

Berbagai tradisi nilai budaya tersebut telah memberikan dasar sekaligus mewarnai pola pikir dan pola tindak komunitas Tengger ketika berinteraksi dengan alam lingkungan Tengger, maupun dengan lingkungan sosial. Bagaimana sesungguhnya isi religi komunitas Tengger dan bagaimana ia dikomunikasikan dalam kehidupan sosialnya, khususnya kepada generasi muda, menarik untuk dikaji secara mendalam dan kritis.

#### TUGAS:

- (1) Bagaimana komunitas Tengger memandang tiga situs utama terkait dengan mitologi mereka: Gunung Batok, kawah gunung Bromo, dan lautan pasir?
- (2) Makna apa yang terdapat pada legenda Roro **AnTeng** dan Joko **SeGer**?
- (3) Upacara apa saja yang dilaksanakan komunitas Tengger? Upacara apa yang paling dominan?
- (4) Bagaimana keadaan dan susunan kemasyarakatan di Tengger (hubungan antara *Dukun-Wong Sepuh-Pak Legen*, serta pemimpin formal yang ada)?
- (5) Sebutkan hak, kekuasaan dan kewajiban-kewajiban masing-masing kelompok tersebut?
- (6) Bagaimana tradisi perkawinan berlangsung? Bagaimana pula tradisi menetap sesudah menikah?
- (7) Apa keunikan-keunikan dalam tradisi budaya mereka?
- (8) Bagaimana sistem pertanian yang berlangsung?
- (9) Bagaimana kehidupan kepariwisataannya?

#### **b. Situs Sosial Budaya**

Di samping objek-objek studi berupa komunitas-komunitas adat, juga terdapat objek-objek penting yang terkait dengan masalah-masalah sosiologis penting. Di berbagai daerah terdapat beberapa objek yang dapat digunakan sebagai objek studi. Beberapa objek studi tersebut dapat dijadikan sebagai rangkaian dari "perjalanan lapangan" bersama dengan objek berupa komunitas adat. Beberapa di antara objek situs sosial budaya tersebut antara lain: a. Beberapa pura di Bali, seperti: Pura Besakih, Tanah Lot, Tirta Empul, Kompleks makam Gunung Kawi. b. Di Lombok terdapat situs Gili Trawangan, c. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah terdapat beberapa percandian: Suku (Karanganyar), Borobudur (Magelang), Penataran (Blitar-Jawa Timur), dll. Objek-objek tersebut terkait dengan masalah-masalah sosiologis penting seperti ritual, pagelaran seni, dll.

### **3. Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran dengan *Field Trip***

Pembelajaran dengan metode Field Trip mensyaratkan beberapa prosedur yang harus dilakukan untuk tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal. Beberapa prosedur tersebut adalah:

#### **1. Merumuskan tujuan pembelajaran**

Tujuan pembelajaran perlu dirumuskan berdasarkan pada KI-KD yang bersangkutan. Di samping itu jika objek studi adalah komunitas-komunitas adat di luar kota yang harus dijalankan dalam waktu yang panjang, maka harus ada perpaduan di antara beberapa KI-KD untuk tercapainya kegiatan secara menyeluruh.

#### **2. Menetapkan lokasi studi**

Lokasi studi ditetapkan dengan melakukan dialog pada berbagai pihak: siswa, guru, kepala sekolah, dan juga orang tua/ wali siswa. Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi terhadap pentingnya kegiatan tersebut dilakukan, termasuk berbagai resiko yang mungkin terjadi, dan pembiayaan yang dibutuhkan.

#### **3. Merencanakan waktu kunjungan**

Waktu kunjungan harus secara cermat diperhitungkan, sebab hal itu terkait dengan aktifitas di lapangan yang akan mengganggu pelaksanaan kegiatan rutin di sekolah. Di samping itu juga dengan mempertimbangkan waktu-waktu penting di lokasi berkaitan dengan momento-moment penting yang saat itu berlangsung di objek kajian.

#### **4. Mengurus perijinan**

Perijinan untuk melaksanakan pembelajaran ini harus dilakukan, baik kepada orang tua/ wali siswa, pengelola objek kajian, pimpinan dari komunitas yang akan dikunjungi, maupun ijin dari pimpinan sekolah. Keperluan ijin itu berkaitan dengan penerimaan komunitas yang bersangkutan terhadap rencana studi, maupun pengetahuan terhadap pantangan dan tabu dari suatu komunitas yang perlu diketahui oleh pendatang yang mengadakan kajian.

5. Melaksanakan pembekalan

Sebelum melaksanakan pembelajaran “perjalanan lapangan” ini, para siswa sebaiknya sudah dibekali dengan pengetahuan tentang objek-objek sosial budaya yang akan dikunjungi ataupun komunitas-komunitas adat yang akan dikaji. Pengetahuan awal tentang masalah tersebut akan sangat membantu siswa dalam menemukan sesuatu yang penting hasil improfisasi yang mereka lakukan di lapangan.

6. Mengurus berbagai keperluan fisik (logistik), transportasi

Berbagai keperluan siswa dan guru selama berada di lapangan perlu dipertimbangkan dengan masak. Dalam hal ini terdapat banyak biro perjalanan yang dapat dimanfaatkan jasanya untuk mendukung dan memudahkan pelaksanaan pembelajaran.

7. Menyusun dan melaksanakan penugasan akademik kepada siswa

Kegiatan pembelajaran dengan metode ini sebaiknya tidak terlalu banyak menekankan pada perjalanan wisata, yang hanya dinikmati untuk berswenang-senang, lepas dari masalah akademik. Berbagai persiapan penugasan perlu diberikan dan ditekankan untuk dicari datanya dalam kegiatan lapangan. Pencarian data tersebut sebaiknya dilakukan secara berkelompok, untuk menjaga kekompakan tim maupun untuk pendalaman dan keamanan dalam mencari narasumber. Tugas-tugas terstruktur disusun dan didialogkan dengan sesama guru (tim) maupun dengan para siswa.

8. Melaksanakan pembimbingan di lapangan

9. Pelaksanaan kegiatan lapangan seyogyanya mendasarkan pada pembelajaran siswa aktif, dalam arti bahwa pencarian data dan informasi dilakukan oleh para siswa. Fungsi dan peran guru adalah menjadi fasilitator dan menuntun mereka dari belakang. Namun guru harus selalu waspada dan menyiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di lapangan.

10. Penugasan/ pelaporan kegiatan dan penilaian

Sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran, maka pelaksanaan kegiatan tersebut juga harus dimintakan pertanggungjawaban akademik, dengan meminta siswa melaporkan hasilnya, dan yang lebih penting untuk mempresentasikan hasil-hasil yang diperoleh dalam diskusi di sekolah/ kelas.

#### **D. Aktivitas Pembelajaran**

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode *Field Trip* lebih mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta diklat menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :

1. Aktivitas individu, meliputi :

- Memahami dan mencermati materi diklat
- Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar, menyimpulkan
- Melakukan refleksi

2. Aktivitas kelompok, meliputi :

- mendiskusikan materi pelatihan
- bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan penyelesaian masalah /kasus
- melaksanakan refleksi

#### **E. Latihan/ Kasus /Tugas**

1. Buatlah contoh rencana pembelajaran dengan menggunakan metode *Field Trip*
2. Susunlah penugasan kepada siswa untuk melaksanakan pembelajaran dengan metode *Field Trip*
3. Susunlah rancangan laporan dan penilaian kegiatan siswa dengan metode tersebut

#### **F. Rangkuman**

Pembelajaran dengan metode *Field Trip* ini memiliki perbedaan hasil yang lebih baik dan lebih melekat pada diri siswa dari pada metode-metode lainnya, karena pengalaman langsung yang mereka rasakan. Namun berbeda dengan pembelajaran yang biasanya dilakukan di dalam kelas, pelaksanaan metode ini mensyaratkan beberapa hal, persiapan yang lebih teknis dan terperinci, pemantauan di lapangan maupun dalam penyusunan laporan kegiatan. Disamping itu hubungan dengan

banyak pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut, mensyaratkan beberapa aktivitas, seperti perijinan, kesediaan suatu komunitas untuk dikunjungi, maupun juga yang sangat penting adalah ijin dan persetujuan orang tua siswa, serta bantuan pendanaannya.

#### **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang anda pahami setelah mempelajari materi pembelajaran dengan metode *Field Trip*?
2. Pengalaman penting apa yang anda peroleh setelah mempelajari materi ini?
3. Apa manfaat materi pembelajaran *Field Trip*?
4. Apa rencana tindak lanjut anda setelah kegiatan pelatihan ini ?

#### **H. Kunci Jawaban/ Prosedur:**

Berdasar atas permasalahan dan kasus pada masing-masing objek kunjungan.

## Daftar Pustaka

- Hadi. N., dkk. 2009. *Pedoman Pelaksanaan KKL*. Malang: FIS UM.
- Hadi. N., 2012. *Laporan Pelaksanaan KKL Mahasiswa: Ekspedisi Lombok-Bali*. Malang: FIS UM.
- Hadi. N., 2013. *Aplikasi Pendidikan Untuk Semua (PUS) Pada Masyarakat Adat Bali Age (Studi Kasus Di Desa Terungan)*. Malang: BLU FIS-UM.
- Hadi. N., 2014 *Makna Pendidikan Pada Masyarakat Petani Desa Senaru, Lombok, NTB (Studi Kasus Modernisasi Budaya di Komunitas Desa Adat Lereng Gunung Rinjani)*. Malang: BLU FIS-UM.
- Hadi. N. 2015. *Pengembangan Bahan Bacaan Berbasis Pendidikan Multikultural, Religi Komunitas Pegunungan: Studi Kasus pada Masyarakat Terungan di Gunung Batur, Tengger di Gunung Bromo dan Kinahrejo di Lereng Merapi*. Malang: LP2M
- Hefner, R. W. 1990. *The Political Economy of Mountain Java An Interpretive History*. Barkeley and Los Angeles, California: University of California Press.
- Ismain, K. dan Hadi. N. (Ed.). 2003. *Sejarah dan Budaya, dari Masa Kuno Sampai Kontemporer*. Malang: UM Press Bekerjasama dengan Jurusan Sejarah FS-UM.

## Glosarium

1. *Project Based Learning (PjBL)* = Pembelajaran Berbasis Proyek
2. *Problem Based Learning*, dan
3. *Discovery Learning*
4. *Start With the Essential Question*= Penentuan Pertanyaan Mendasar
5. *Design a Plan for the Project* = Mendesain Perencanaan Proyek
6. *Create a Schedule* = Menyusun Jadwal
7. *Monitor the Students and the Progress of the Project* = Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek
8. *Assess the Outcome* = menguji hasil
9. *Evaluate the Experience* = Mengevaluasi Pengalaman
10. *new inquiry* = penemuan baru
11. *Problem Solving*
12. Ekspository
13. *Discovery Learning Environment*
14. *Problem statement* (pernyataan/ identifikasi masalah)
15. *Data collection* (pengumpulan data)
16. *Data processing* (pengolahan data)
17. *Verification* (pembuktian)
18. *Generalization* (menarik kesimpulan/generalisasi)
19. Belajar Pengarahan Sendiri (*self directed learning*)
20. *Responsibility*
21. *answerability*
22. *Active-learning*
23. *Driving Questions* : pertanyaan permasalahan yang memicu peserta didik berbuat menyelesaikan permasalahan dengan konsep, prinsip dan ilmu pengetahuan yang sesuai.
24. *Constructive Investigations* :sebagai titik pusat, proyek harus disesuaikan dengan pengetahuan para peserta didik.
25. *Autonomy* :proyek menjadikan aktifitas peserta didik sangat penting.
26. *brainstorming*



27. *Field Trip*

28. *Teknonimi*

29. *wangsa* hanya berfungsi untuk memberi suatu kedudukan sosial dan gengsi berdasarkan keturunan kepada seseorang

30. *dadia*.: kelompok-kelompok kekerabatan besar yang bersifat *patrilineal* yang disebut

31. *subak*: suatu sistem pertanian di Bali yang juga merupakan suatu badan hukum adat otonom, suatu badan perencanaan aktifitas pertanian dan suatu kelompok keagamaan.

32. Sema Wayah (tempat pemakaman dengan system Mepasah)

33. Mepasah: system pemakaman dengan meletakkan jenazah di permukaan bumi



# **PPPPTK PKn DAN IPS**

**Jln. Arhanud, Pendem, Kec. Junrejo  
KOTA BATU – JAWA TIMUR**

**Telp. 0341 532 100**

**Fax. 0341 532 110**

**Email [p4tk.pknips@gmail.com](mailto:p4tk.pknips@gmail.com)**

**[www.p4tkpknips.id](http://www.p4tkpknips.id)**